

NILAI PROFETIK DALAM MEDIA MASSA
(Analisis Isi Opini Harian Republika Periode Ramadhan 1434 H)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi**

Disusun Oleh:

IRMA SURYANI

10730081

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : IRMA SURYANI
Nomor Induk : 10730081
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
Konsentrasi : *PUBLIC RELATIONS*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARASISWA BANGSA
TGL. 20
89A8EACF325517
ENAM RIBU RUPIAH
6000
LUP



IRMA SURYANI

NIM. 10730081



NOTA DINAS PEMBIMBING

No. UIN.02/KP 073/PP, 09/022/2013

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : IRMA SURYANI

NIM. : 10730081

Prodi. : ILMU KOMUNIKASI

Judul : *NILAI PROFETIK DALAM MEDIA MASSA (ANALISIS ISI
OPINI HARIAN REPUBLIKA PERIODE RAMADHAN 1334 H)*

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humanioran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Pembimbing,

Dr. Iswandi Syahputra, M.Si.

NIP. 19730423 200501 1 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/07682014

Skripsi dengan judul : NILAI PROFETIK DALAM MEDIA MASSA (Analisis Isi Opini Harian Republika Periode Ramadhan 1434 H)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Irma Suryani
NIM. : 10730081
Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 02 Juni 2014
Dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,

Dr. Iswandi Syahputra, M.Si
NIP. 19730423 200501 1 006

Penguji I

Fatma Dian Pratiwi, S.Sos., M.Si
NIP. 19750307 200604 2 001

Penguji II

Rika Lusri Virga, S.IP., MA.
NIP. 19850914 201101 2 014

Yogyakarta, 23 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

DEKAN



Prof. Dr. H. Diding Abdurrahman, M.Hum
NIP. 19630306 198903 1 010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk :

Keluarga Besar & Almamaterku Tercinta

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(karena mereka adalah kenangan untukku terus meraih mimpi)

HALAMAN MOTTO

*~Aku percaya pada hukum karma, karena siapa yang menanam, dialah
yang akan memetikny~*
WE ARE ONE~

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kekuatan, kesabaran, kelancaran serta keselamatan sehingga sripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya.

Skripsi ini tersusun sebagai salah satu langkah dalam menyelesaikan studi jenjang Strata Satu yang ada dalam prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Selama menyusun penelitian ini telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr Dudung Addurahman, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
2. Bapak Drs. H. Bono Setyo, M.Si selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Iswandi Syahputra, M.Si, yang telah memberikan sebagian waktu dan ilmu yang bermanfaat untuk membimbing peneliti,
4. Ibu Fatma Dian Pratiwi, S.Sos., M.Si dan Ibu Rika Lusri Virga, S.IP., MA., yang telah memberikan saran dan masukan berharganya,

5. Nenek dan kakek (하라버치 & 할머니) peneliti yang telah memberikan spirit tak terhingga semenjak terlahir 22 tahun yang lalu, *“karena merekalah alasan untukku tetap menunggu pagi”*.
6. Ayah (Beja Wijaya), Ibu (Sukasih), Adik (Nanang Riyadi), dan keluarga yang selalu mendukung peneliti dan memberikan semangat yang tak ternilai, *“karena merekalah motivasi untukku terus menatap mentari”*
7. Aegy, *my black pearl*, (애기, 차가 불러 람다니) terimakasih atas dukungan tak ternilai yang tak bisa peneliti balas dengan apapun, *“karena ialah semangat untukku tetap menjalani hari”*
8. Almarhum Budi Khaerul Umam, untaian doa dan terimakasih tak pernah putus atas kesetiiaannya selama 3 tahun lebih, menjadi sahabat terdekat peneliti, berbagi segala cerita, tawa, dan duka bersama, (너무 보고시보),
9. Di Yanti dan Mas Joko Setiawan, dua orang yang sudah peneliti anggap sebagai saudara, terimakasih atas kesedian untuk berproses bersama untuk makin mengerti makna hidup, (난사랑한다),
10. Keluarga dan staff ICRS (Indonesian Concorsium for Religious Studies) UGM yang telah memberikan pengalaman berharga selama peneliti bergabung disana,
11. Keluarga KKN 80 GK 44, Karanggunung, Anis, Mega, Tetch Zayyin, Simbok Riesta, Reza, Mas Arif, Mas Inus, Ekhsan, Ayik, Panji, Fajar, dan keluarga bapak Dukuh serta masyarakat Karanggunung, terimakasih atas kenangan indah yang telah terlalui,

12. Teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2010 (Eti, Resti, David, Handa, Dila, Fahmi, Ryan, Johan, Desi, Devi, Dani, Sari, dkk), terimakasih atas segala informasi dan bantuan yang telah diberikan,
13. Keluarga besar SPA ‘SEGORO’ , Bapak Andi Darmawan, Mas David, Mas Galang, Mbak Lian, Mbak Nina, Mbak Soim, Vitri, Amel, Defi, Lona, Mulad, Puput, dan seluruh santri,
14. Keluarga besar HMI Komisariat Fishum (Tika, Vikran, Chus, Fajri, Galang, Fandi, Fuan, Atik, Cahya Ijo, dan lain – lain),
15. Tim Akademia Joglosemar , terimakasih atas kekompakkannya menjaga nama baik Prodi Ilmu Komunikasi UIN Suka,
16. Teman – teman penghuni Kost Ungu, Perum AD. Gedongkuning No. 872 (Mama Viola, Kak Deby, Mbak Septi, Kak Widya, Kak Lisa, Kak Ida, Vitri, Rani, In Rohi, Hime, Yuni, Feri, Dita, Nurul, Yulia), terimakasih atas kebersamaannya selama ini,
17. EXO (엑서) , terimakasih karena mereka telah ikut menemani selama pembuatan karya ini, sebagai suplemen semangat dan menjadi penghibur peneliti saat galau,
18. Serta kakak dan adik tingkat serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-satu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya,

Demikian kata pengantar dari peneliti. Akhirnya peneliti berharap semoga proposal skripsi ini mendapat banyak masukan dari berbagai pihak demi perbaikan dan kelancaran penelitian kedepannya.

Yogyakarta, 25 Juni 2014

Irma Suryani
NIM. 10730081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
ABSTRACT	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Hipotesis Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka.....	6
G. Landasan Teori	
1. Ilmu Sosial Profetik	10
H. Metodologi Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Metode Pengumpulan Data	15

a. Jenis Data.....	15
b. Teknik Pengumpulan Data.....	16
c. Unit Analisis dan Kategorisasi.....	16
d. Definisi Operasional	21
3. Metode Analisis Data.....	27
I. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	29
BAB II: GAMBARAN UMUM HARIAN REPUBLIKA	
A. Sejarah dan Perkembangannya	30
B. Komposisi Organisasi Harian Republika.....	32
C. Alur Produksi Berita Harian Republika.....	39
D. Susunan Redaksi dan Manajemen Harian Republika	41
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Reliabilitas Antar <i>Coder</i>	46
B. Analisis Data.....	51
1. Frekuensi Unit Analisis 1 (Nilai atau Pesan yang Sesuai dengan Al-Quran dan Hadist	51
2. Frekuensi Unit Analisis 2 (Peneliti Opini).....	59
3. Frekuensi Unit Analisis 3 (Tema Opini).....	65
4. Frekuensi Unit Analisis 4 (Teknik Pemilihan Kata/Diksi).....	71
5. Frekuensi Unit Analisis 5 (Gambaran Isi Opini)	77
6. Frekuensi Unit Analisis 6 (Target Opini)	81
7. Frekuensi Unit Analisis 7 (Pemilihan Judul Opini).....	84
C. Pengujian Hipotesis	86
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel unit analisis dan kategorisasi analisis isi.....	20
Tabel 2: Tabel Frekuensi Unit Analisis 1 (Nilai / Pesan yang Sesuai dengan Al-Quran dan Hadist)	52
Tabel 3: Tabel Frekuensi Unit Analisis 2 (Peneliti Opini)	59
Tabel 4: Tabel Frekuensi Unit Analisis 2 (Peneliti Opini)	65
Tabel 5: Tabel Frekuensi Unit Analisis 4 (Teknik Pemilihan Kata / Diksi)	72
Tabel 6: Tabel Frekuensi Unit Analisis 5 (Gambaran Isi Opini).....	77
Tabel 7: Tabel Frekuensi Unit Analisis 6 (Target Opini)	81
Tabel 8: Frekuensi Unit Analisis 7 (Pemilihan Judul Opini).....	84

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kerangka Pemikiran Penelitian	29
Bagan 2 : Diagram alur produksi berita harian Republika.....	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Grafik profil pembaca harian Republika	43
Grafik 2: Grafik <i>Time Spent Reading</i> Pembaca harian Republika.....	44
Grafik 3: Grafik Frekuensi Nilai / Pesan yang Sesuai dengan	
Al-Quran dan Hadist	53
Grafik 4: Grafik Frekuensi Unit Analisis 2 (Peneliti Opini).....	61
Grafik 5: Grafik Frekuensi Unit Analisis 3 (Tema Opini).....	67
Grafik 6: Grafik Frekuensi Unit Analisis 4 (Teknik Pemilihan Kata/ Diksi)	72
Grafik 7: Grafik Frekuensi Unit Analisis 5 (Gambaran Isi Opini)	78
Grafik 8: Grafik Frekuensi Unit Analisis 6 (Target Opini)	83
Grafik 9: Frekuensi Unit Analisis 7 (Pemilihan Judul Opini)	84

ABSTRACT

Republika is one of the Islamic newspaper in Indonesia which have Islamic value more than any newspapers. Most of Islamic newspaper have aim to give voice to Muslim and their views especially in Ramadhan 1434 H (8 July – 7 August 2013). One of the column inside there called „opinion column’ is one of the way to spread out the idea from society. This phenomenon is linear with the objectification of Prophetic Social Science (Ilmu Sosial Profetik) who said that the Holy Book (wahyu Tuhan) must be integrated with human sciences and arts.

This research is titled “Nilai Profetik dalam Media Massa (Analisis Isi Opini Harian Republika Periode Ramadhan 1434 H) and using quantitative content analysis method. The data was taken with documentation of 48 opinion articles from Republika newspaper during Ramadhan 1434 H and others significant documents. The analysis unit was breakdown from three elements of „Ilmu Sosial Profetik’; humanitation („title selection’, „diction’); liberation („the opinion author’, „opinion content’, „opinion theme’, „opinion target’); and transendention (value or message which linier with Al-Quran and Hadist).

The result is Republika have prophetic value in 48 opinion articles during Ramadhan 1434 H. All of analysis units are reliable with most minor reability number is 0,79167. The chi quadrat calculation have number 0,14286, so the H_1 hipotesis accepted. All of the unit analysis have 70 % (0,7) frequention of prophetic value except the analysis unit of transendention (value or message which linier with Al-Quran and Hadist) which got number 49 % for prophetic value. In fact, because the number less than 70 % so this one was not linear appopriate the limit, although there was another propethic value inside. In addition, Republika should improve their selection about the issued opinion which have more Islamic value and also avoid with arabic phrases which can confuse the readers who do not know arabic well. Its better to use universal phrases and be more easily understood by the common readers.

Keywords : prophetic, ramadhan, republika

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Industri media saat ini, tak terkecuali surat kabar mulai membuka peluang dalam kebebasan berpendapat dengan menyediakan ruang opini bagi masyarakat luas. Ruang opini tersebut disediakan untuk kepentingan publik. Sehingga teks ulasan-ulasan di dalamnya akan bersinggungan dan berkepentingan untuk menjawab permasalahan masyarakat luas. Konsep tersebut selaras dengan pandangan kaum mayoritarian dalam kajian media kritis yang menyamakan kepentingan publik dengan memenuhi keinginan publik dan menyenangkan mayoritas konsumen media (McQuail dalam Syahputra, 2007:87). Sehingga, media surat kabar memberikan ruang partisipasi publik melalui kolom opini dan siapapun boleh mengisi kolom tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu media yang menampung tulisan opini masyarakat tersebut adalah harian Republika. Surat kabar Republika dikenal luas sebagai surat kabar yang bernuansa Islam. Keberadaannya mengimbangi kharisma harian Kompas dan koran Tempo yang populer sebagai koran nasional. Sebagai surat kabar yang berideologi Islam, wajar jika harian Republika memuat tulisan–tulisan yang berkaitan dengan wahyu Tuhan. Praktik relasi antara media dan agama, layaknya relasi Islam dengan harian Republika tersebut, seperti apa yang diungkapkan Hoover (dalam Syahputra, 2007:83)

merupakan pola relasi yang berbentuk ritual. Bila media dengan ritual keagamaan saling berelasi, hal tersebut merupakan bagian dari *media consumption* yang terjadi dalam konteks yang didefinisikan secara sosial dan kultural. Sehingga, wajar jika sebagian isi dari teks yang disajikan harian Republika adalah bagian dari konsumsi media terhadap topik ritual keagamaan berdasar lingkungan sosiokultural di mana harian Republika berada.

Memasuki bulan Ramadhan 1434 H lalu, atau tepatnya pada edisi 8 Juli sampai dengan 8 Agustus 2013, merupakan momentum yang tepat bagi industri media, tak terkecuali surat kabar harian Republika untuk menyajikan informasi yang erat kaitannya dengan ritual ibadah di bulan Ramadhan. Berbagai kolom khusus bernuansa agama Islam disuguhkan menjelang, saat, dan pasca Ramadhan. Misalkan saja kolom ‘Hikmah’, ‘Dialog Jum’at’, dan ‘Manajemen Qalbu’. Peneliti berpendapat, melalui penampilan kolom tersebut menunjukkan jika harian Republika sebagai surat kabar yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dengan menyajikan informasi-informasi yang berhubungan dengan agama Islam.

Adanya kenyataan yang demikian, tidak menutup kemungkinan bagi harian Republika untuk kemudian juga mengisi kolom opininya dengan topik-topik keagamaan khususnya Islam. Relasi dari harian Republika dengan Islam membuat artikel-artikel yang dimuat dalam kolom opini harian Republika lebih memprioritaskan kepentingan publik yang butuh terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran yang dibawa Rasulullah *SAW* mengandung

nilai-nilai universal yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam (*ramatanlil'alam*). Nilai tersebut dituangkan dalam teks opini yang merupakan obyektifikasi dari nilai-nilai profetik. Fakta ini secara tidak langsung memberikan klaim jika harian Republika telah mengakomodasi peran dari Ilmu Sosial Profetik (ISP). Paradigma ISP ini dipahami sebagai wujud ilmu yang integralistik karena menyatukan wahyu Tuhan dan akal pikiran manusia (Kuntowijoyo dalam Syahputra, 2007:130). Sehingga, pada konteks ini, bentuk integralistik tersebut dapat dilihat dari surat kabar harian Republika sebagai hasil karya akal pikir manusia yang diintegrasikan dengan wahyu Tuhan yang tersirat dalam nilai yang terobyektifikasi melalui teks yang dimuatnya.

Kemudian Kuntowijoyo (2006:99) juga melanjutkan pemaparannya bahwa nilai profetik yang dipahami sebagai *sunnah* Nabi, tidak terlepas dari unsur-unsur Ilmu Sosial Profetik yang terdiri dari tiga pilar, yakni humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*tu'minunabillah*). Tujuan dari humanisasi adalah memanusiakan manusia setelah mengalami dehumanisasi. Sementara liberasi adalah membebaskan manusia dari kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan. Serta tujuan dari transendensi untuk membersihkan diri dengan mengingat kembali dimensi transendental yang telah menjadi fitrah manusia.

Dalam konteks komunikasi yang erat kaitannya dengan media massa, ketiga pilar Ilmu Sosial Profetik tersebut ditempatkan oleh harian Republika melalui teks opini, bahkan dapat dikatakan juga sebagai media

dakwah terhadap nilai-nilai Islam. Jika nilai-nilai Islam dituangkan dalam bentuk teks, maka seperti yang disebutkan Syahputra (2007:138), nilai tersebut tidak akan pernah berubah kendati situasi sosial yang melingkupinya terus berubah, karena pada dasarnya prinsip komunikasi adalah tidak bebas nilai. Sebagai contoh misalnya, jika pada suatu teks opini terdapat nilai tauhid, tentu saja nilai tauhid tidak akan berubah walaupun situasi sosial dari pembaca yang melingkupinya beragam, berbeda, bahkan berubah-ubah.

Dengan demikian, teks opini dengan mengakomodasi tiga pilar profetik juga dapat dijadikan sebuah strategi agar ajaran agama Islam tidak disalahpersepsikan oleh publik sebagai ajaran kaku yang eksklusif. Artinya, nilai profetik di sini tidak sekadar tempel ayat dan atau menggunakan kosakata bahasa Arab yang terkesan eksklusif. Dalam penulisan jurnalistik, nilai profetik bisa diterapkan melalui penggunaan kosakata umum yang mengandung nilai religi. Penggunaan kosakata umum inilah yang akan menjadikan sebuah opini bersifat universal dan bisa diterima oleh pihak diluar Islam (Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, Aliran Kepercayaan).

Secara teknis, dalam satu hari, harian Republika ini menampilkan 2 (dua) teks opini yang biasanya terletak pada halaman 7 (tujuh). Teks opini di harian Republika diterbitkan setiap hari kecuali pada hari Ahad. Pada bulan Ramadhan 1434 H lalu, harian Republika menerbitkan sebanyak 48 buah opini selama satu bulan pada periode tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis lebih dalam mengenai nilai-nilai profetik yang terdapat di dalam isi teks opini harian Republika selama bulan Ramadhan 2013 H.

Penelitian ini berjudul: **Nilai Profetik dalam Media Massa (Analisis Isi Opini Harian Republika periode bulan Ramadhan 1434 H.)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah :

Apakah ada nilai profetik dalam opini harian Republika selama bulan Ramadhan 1434 H (periode 8 Juli – 7 Agustus 2013) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai profetik dalam opini harian Republika selama bulan Ramadhan 1434 H (periode 8 Juli – 7 Agustus 2013).

D. HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam penelitian menggunakan metode analisis isi kuantitatif, selalu dibutuhkan hipotesis penelitian yang akan dibuktikan melalui analisis data nantinya. Hipotesis yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah :

H₀ : tidak ada nilai profetik yang terdapat dalam opini harian Republika periode Ramadhan 1434 H.

H₁ : ada nilai profetik yang terdapat dalam opini harian Republika periode Ramadhan 1434 H.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian di bidang disiplin Ilmu Komunikasi terutama pada kajian analisis teks media dengan pendekatan analisis isi kuantitatif.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi para penulis opini yang hendak menawarkannya kepada media surat kabar cetak secara umum dan kepada harian Republika secara khusus mengenai bagaimana menulis artikel opini yang mengandung nilai profetik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan kepada pembaca media surat kabar agar tidak mencerna begitu saja berita-berita yang disuguhkan oleh media massa.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu akan mengawali dengan melakukan tinjauan awal terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang akan diteliti. Selain itu hal ini juga sebagai bahan perbandingan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka yang disertakan pada bagian ini akan mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis isi dan *framing*.

Analisis isi berbeda dengan analisis *framing*. Analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi (Eriyanto, 2011:15). Sedangkan konsep *framing* menurut Pawito (2008:186), dapat dibedakan menjadi dua, *frame* media (*media framing*) dan *frame* khalayak (*audience framing*). *Media framing* pada dasarnya adalah *framing* berita yang mencerminkan produk media ketika mengidentifikasi dan mengklarifikasi serta kemudian menyampaikan informasi kepada khalayak. Kata *framing* dalam bahasa Inggris berasal dari kata dasar *frame* yang berarti kerangka atau bingkai. Gagasan tentang *framing* pertama kali dicetuskan oleh Beterson pada tahun 1955. Beterson memaknai *frame* sebagai struktur konseptual yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sudibyo, 2001:224).

Penelitian pertama yang pernah dilakukan yaitu karya Ummu Jazilah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul '*Klasifikasi Wacana Penyiaran Islam Rubrik Serambi Tabloid Nurani Periode 2003/2004 (Analisis Isi)*'. Pada penelitian yang berbentuk skripsi tersebut, fokus kajiannya ialah mengungkapkan dan mendeskripsikan klasifikasi wacana penyiaran Islam dan mengungkapkan isi rubrik 'Serambi' Tabloid *Nurani* periode 2003/3004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klasifikasi wacana penyiaran Islam dalam rubrik 'Serambi' Tabloid *Nurani* terdiri dari wacana keislaman (*aqidah*), wacana budi pekerti (*akhlak*), wacana

keislaman (*syariah*) dan wacana *muamalah*. Tabloid *Nurani* dalam menyajikan dan menampilkan berita tentang wacana penyiaran Islam mempunyai peran dalam menjaga gawang akhlak dan moral masyarakat. Sedangkan secara kuantitatif, penyiaran Islam dalam tabloid *Nurani* banyak pada wacana Keislaman (*syariah*) karena dalam kurun waktu 1 tahun (Mei 2003–April 2004) banyak menyoroti *Fiqh Munakahat* atau persoalan rumah tangga dikalangan artis/selebritis yang banyak mengalami proses kawin-cerai. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode analisis isi yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek penelitian (Tabloid *Nurani*) dan obyek penelitian (Rubrik ‘Serambi’).

Selanjutnya penelitian berbentuk skripsi yang berjudul ‘*Tipologi Artikel Agama Islam Dalam Kolom Opini Harian Umum Republika Edisi Mei 2002 – April 2003 (Analisis Isi)*’. Skripsi tersebut merupakan hasil penelitian Sri Sabaria, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2005. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan obyek opini harian *Republika* dan metode analisis isi. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada landasan teori dan sampel penelitian yang diambil. Sabaria menarik kesimpulan bahwa selama satu tahun (Mei 2002–April 2003) terdapat 29,42 % artikel yang bernuansa Islam, sisanya (70,27%) merupakan artikel non Islam. Sebagian besar tipe artikel Islam yang terbit adalah bertema politik Islam dengan persentase 34,69%. Kaitannya dengan peningkatan dakwah melalui media Harian Umum *Republika* bahwa *Republika* sebagai koran komunitas Islam yang sasarannya

ditujukan kepada Islam moderat, meningkatkan dakwah islamiyah dengan cara memperbanyak tulisan–tulisan ke-Islaman diantaranya ada kolom ‘Hikmah’ yang terbit tiap hari, ‘Dialog Jumat’, ‘Manajemen Qalbu Aa’ Gym’ dan tulisan–tulisan ke-Islaman di kolom–kolom termasuk penulisan–penulisan (artikel) yang ada di kolom opini. Secara sederhana, Sri Sabaria mengungkapkan bahwa *Republika* banyak memuat tulisan–tulisan dakwah baik di kolom opini maupu di kolom–kolom atau rubrik–rubrik yang dikhususkan bagi para Islam Moderat.

Ketiga, penelitian skripsi karya Agus Purnomo, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga tahun 2004, dengan judul ‘*Analisis Isi Pada Kolom Khotbah Jumat di Majalah Suara Muhammadiyah (Edisi Juli 2002-Juni 2003)*’. Penelitian 10 tahun yang lalu ini mengangkat rumusan masalah yang bertujuan untuk mencari bagaimana pesan yang dimuat teks khutbah jum’at dilihat dari jenis pesan, aktualitas, kecenderungan isi serta komposisi pesan. Kesimpulan yang diambil adalah pesan–pesan dakwah yang tersurat dalam teks tersebut mengandung nilai-nilai *akhlak*, *aqidah*, *syariah*, bersifat aktual. Sedangkan komposisi pesan dakwah yang bersifat kesatuan (*unity*) sebanyak 42,5%, pertautan (*coherence*) sebesar 52,5%, dan titik berat (*empasy*) sebanyak 2%. Persamaan penelitian ini adalah metode analisis isi yang digunakan, dan perbedaannya terletak pada obyek penelitian (teks *khotbah* Jumat Majalah *Suara Muhammadiyah*) dan waktu penelitian.

G. LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini, teori bermanfaat untuk membuat konsep dan unit analisis serta menganalisis dan interpretasi data. Pada kesempatan ini, peneliti menggunakan kerangka teori yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dari peneliti akan mengkorelasikan tiga teori antara lain Ilmu Sosial Profetik, teori media kritis, dan komunikasi profetik. Berikut penjabaran dari masing-masing teori yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1. Ilmu Sosial Profetik (ISP)

Kata profetik berasal dari kata *prophet* yang artinya nabi (Michael Philip dalam Waryani, 2013:29). Kata *prophetic* inilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi profetik yang artinya kenabian. Nilai-nilai profetik dalam penelitian ini mengambil dari gagasan Kuntowijoyo yang disebut sebagai Ilmu Sosial Profetik. Kuntowijoyo mengaku mendapat gagasan ini diilhami dari pemaparan Muhammad Iqbal saat berbicara tentang Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang telah menikmati indahnya bertemu dengan Tuhan, tidak tergoda untuk tidak kembali ke bumi. Nabi tetap kembali ke dunia untuk membimbing umat manusia agar bisa bertemu Allah seperti Nabi Muhammad (Safarudin, 2013:14).

Kuntowijoyo memaparkan bahwa ilmu sosial profetik tidak sekadar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu (Kuntowijoyo, 2006 : 86). Dalam pengertian ini

berarti ilmu sosial profetik secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakatnya (Safarudin, 2013:86). Gagasan ilmu sosial profetik merupakan jalan tengah dari kegalauan filsafat barat yang terombang-ambing dalam dua kutub idealis dan materialis, memisahkan ilmu dari etika ketuhanan dan mencari kebenaran dengan kekuatan nalar, akal, rasio, atau pengalaman (Syahputra, 2007 : 130). Ilmu sosial profetik hadir untuk menempatkan nalar, akal, rasio dan pengalaman (empiri) sebagai alat untuk menafsirkan wahyu Tuhan atas realitas. Ilmu sosial profetik akan menghadaokan Al-Quran pada realitas sosial atau sebaliknya, wahyu akan ditempatkan sebagai sumber bagi terbentuknya konstruksi sosial (Syahputra, 2007 : 130). Secara *nash* Al-Quran, konsep dari Ilmu Sosial Profetik dapat dicermati dalam QS. Ali Imran ayat 110 (Al-Quran dan Tejemahannya:2000).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya:

'Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemunkaran (kejahatan) dan beriman kepada Allah.' (Qs. Ali-Imron:110)

Tiga muatan nilai inilah yang menjadi dasar dari Ilmu Sosial Profetik yang meliputi Humanisasi (*amar ma'ruf*), Liberasi (*nahi munkar*), dan Transendensi (*tu'minunabillah*) (Kuntowijoyo, 2006 : 99). (Syahputra, 2007 : 130) memaparkan bahwa Ilmu Profetik merupakan sebuah revolusi

keilmuan terhadap keilmuan sekuler yang mengagungkan rasio. Revolusi keilmuan ini sama halnya dengan revolusi keilmuan sosial marxisme yang mengkritik keilmuan barat yang dinilai sangat kapitalis. Ilmu profetik merupakan produk orang beriman untuk seluruh manusia, sedangkan ilmu sekuler merupakan produk manusia untuk sebagian manusia. Dengan kata lain, ilmu profetik akan melengkapi bahkan mengembangkan ilmu sosial yang tengah berkembang saat ini.

a. *Humanisasi*

Tujuan humanisasi menurut Syahputra (2007 : 128) adalah untuk memanusiakan manusia setelah mengalami dehumanisasi. Masyarakat industrialis telah menjadikan manusia sebagai masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Manusia dilihat secara parsial, sehingga hakikat kemanusiaan itu sendiri hilang.

‘manusia dalam zaman industri mudah sekali terjatuh. Kehilangan kemanusiaan. Karenanya suatu usaha untuk mengangkat kembali martabat manusia, (emansipasi) manusia, humanization (Fromm, 1968) sangat diperlukan. Dalam QS At-Tin (95) : 5,6 dikatakan bahwa orang dapat terjatuh ke tempat paling rendah. Kemudian ayat itu mengecualikan orang – orang yang beriman dan beramal saleh. Kiranya ayat ini merujuk pada humanisasi, yaitu iman dan amal shaleh...’ (Kuntowijoyo, 2006 : 102)

b. *Liberasi*

Sementara tujuan Liberasi menurut Syahputra (2007 : 128) adalah membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan. Liberasi berasal dari kata *liber* yang berarti bebas, tidak terikat, dan tidak tergantung. Liberasi

menjunjung tinggi martabat pribadi kemanusiaan, seperti kemerdekaan dan seperangkat hak asasi manusia yang melekat.

Sasaran liberasi ada empat, yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik. Liberalisasi sistem pengetahuan ialah usaha – usaha untuk membebaskan orang dari sistem pengetahuan materialistis, dari dominasi struktur... (Kuntowijoyo, 2006 : 103).

c. *Transendensi*

Tujuan transendental masih menurut Syahputra (2006:129) adalah untuk membersihkan diri dengan mengingat kembali dimensi transendental yang telah menjadi bagian dari fitrah kemanusiaan. Berasal dari bahasa latin *transcendera* yang berarti naik ke atas. Selanjutnya, Syahputra (2006:129) mengartikan transendensi sebagai perjalanan diatas atau diluar melewati batas sekat kemanusiaan.

Banyak yang meramalkan bahwa pada abad ke-21 spiritualisme akan berkembang. Ciri peradaban postmodernisme adalah dedifferentiation (agama akan menyatu kembali dengan ‘dunia’) pasti akan ditafsirkan orang barat sebagai ‘agama’ yang lebih tinggi dari agama – agama yang ada. Dalam filsafat sejarah barat ada ‘Teori Spiral’ yang mengatakan bahwa sejarah itu bergerak melingkar seperti suatu per, setiap kali selalu kembali berputar seperti yang dulu tetapi selalu lebih tinggi dari semula. (Kuntowijoyo, 2006:105).

Gagasan ilmu profetik merupakan jalan tengah dari kegalauan filsafat barat yang terombang-ambing dalam dua kutub idealis dan materialis, memisahkan ilmu dari etika ketuhanan dan mencari kebenaran dengan kekuatan nalar, akal, rasio, atau pengalaman. Ilmu sosial profetik hadir untuk menempatkan nalar, akal, rasio, dan

pengalaman sebagai alat untuk menafsirkan wahyu Tuhan atas realitas. Ilmu sosial profetik akan menghadapi Alquran pada realitas sosial atau sebaliknya, wahyu akan ditempatkan sebagai sumber bagi terbentuknya konstruksi sosial.

Ilmu profetik merupakan sebuah revolusi keilmuan terhadap keilmuan sekuler yang mengagungkan rasio. Revolusi keilmuan ini sama halnya dengan revolusi keilmuan sosial marxisme yang mengkritik keilmuan barat yang dinilai sangat kapitalistis. Ilmu profetik merupakan produk manusia untuk sebagian manusia. Hal ini bukan berarti ilmu profetik akan menggeser kedudukan ilmu sosial yang sudah ada dan berkembang saat ini, melainkan akan melengkapi bahkan mengembangkan ilmu sosial yang tengah berkembang saat ini. sebab, ada perbedaan paradigma keilmuan, menyangkut cara produksi dan tujuannya (Syahputra, 2007:150).

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain analisis isi kuantitatif (*quantitative content analysis*). Analisis isi kuantitatif adalah analisis yang dipakai untuk mengukur aspek–aspek tertentu dari berita yang dilakukan secara kuantitatif. Prosedurnya ialah dengan jalan mengukur atau menghitung aspek dari berita itu dan menyajikannya secara kuantitatif (Eriyanto, 2011:412). Peneliti ingin mengetahui apakah ada nilai–nilai

profetik dalam opini yang terbit pada harian Republika periode Ramadhan 1434 H (9 Juli–7 Agustus 2013). Eriyanto (2011:412) menjelaskan bahwa penelitian menggunakan metode ini hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya meng-*coding* (memberi tanda) apa yang dilihat.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Terdapat dua macam jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Jadi peneliti tidak langsung memperoleh informasi dari sumbernya, namun menggunakan data yang sudah tersedia (Susanto, 2006:125). Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks opini pada harian Republika periode Ramadhan 1434 H (9 Juli–7 Agustus 2013) sebanyak 48 buah opini.

2) Data sekunder

Sumber-sumber lain yang menjadai referensi sekunder bagi penelitian ini antara lain buku referensi, surat kabar, laporan atau jurnal yang dinilai relevan dengan objek kajian yang akan diangkat oleh peneliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode ini adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumentasi dapat berupa dokumen publik maupun dokumen privat (Kriyantono, 2006:118) melalui buku-buku, makalah-makalah, dan rekaman yang berhubungan dengan judul yang diangkat dalam penelitian (Kriyantono, 2006:118). Peneliti akan fokus terhadap pengumpulan dokumen untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

c. Unit Analisis dan Kategorisasi

Dalam penelitian analisis isi kuantitatif, keberadaan unit analisis dan kategorisasi memegang peran penting untuk mengetahui kedalaman isi yang diteliti. Unit analisis didefinisikan sebagai apa yang diobservasi, dicatat, dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis berikutnya (Krippendorff dalam Eriyanto, 2011:59). Secara sederhana menurut Eriyanto (2011:59), unit analisis dapat digambarkan sebagai bagian apa dari isi yang kita teliti dan kita pakai untuk menyimpulkan

isi dari suatu teks. Bagian dari isi ini dapat berupa kata, kalimat, foto, *scene* (potongan adegan), paragraf.

Unit analisis yang dipakai dalam penelitian ini dibuat berdasarkan panduan dari buku Analisis Isi milik Eriyanto (2011). Dalam penelitian ini digunakan jenis unit analisis proposisional dan tematik. Unit proposisional adalah unit analisis yang menggunakan pernyataan (proposisi). Peneliti menghubungkan dan mempertautkan satu kalimat dengan kalimat lain dan menyimpulkan pernyataan (proposisi) yang terbentuk dari rangkaian antar kalimat tersebut (Eriyanto, 2011:80). Sedangkan unit analisis tematik adalah unit analisis yang lebih melihat tema (topik) pembicaraan dari suatu teks. Unit tematik secara sederhana berbicara mengenai ‘teks berbicara tentang apa atau mengenai apa’ (Eriyanto, 2011:84).

Peneliti memilih menggunakan kedua teknik unit analisis tersebut karena mempunyai kelebihan selain merupakan unit analisis yang paling umum dipakai, juga keduanya mempunyai tingkat produktivitas (analisis yang dapat menjawab tujuan dan punya potensi menghasilkan temuan menarik) yang tinggi (Eriyanto, 2011:99). Sedangkan kelemahannya adalah, keduanya mempunyai tingkat reliabilitas yang rendah, yakni kemungkinan perbedaan pemahaman antara peneliti dengan peng-*coder* cukup tinggi sehingga diperlukan pembuatan unit analisis yang cermat dan terperinci. Kelemahan ini dapat diatasi dengan pembuatan unit analisis dengan terperinci

sehingga lembar coding yang digunakan mempunyai reliabilitas tinggi. Untuk membuktikan reliabilitas tersebut dilakukan menggunakan uji reliabilitas menggunakan rumus statistik.

Unit analisis dan kategorisasi diturunkan dari landasan teori yang dipakai. Landasan teori yang mendasari pembentukan unit analisis ini adalah Ilmu Sosial Profetik (ISP) dari Kuntowijoyo dengan ketiga elemennya. *Pertama*, humanisasi sebagai konsep abstrak dijabarkan menjadi dua buah unit analisis yakni ‘teknik pemilihan kata / diksi’ dan ‘pemilihan judul opini’. Unit analisis ini menunjukkan bagaimana penulis opini menghormati orang lain (pembaca) melalui diksi yang tepat dan pemilihan judul opini yang tidak menyinggung pembaca. Dengan diksi yang tepat, menunjukkan bahwa penulis opini tersebut sudah berusaha menghormati pembaca. Dengan pemilihan judul yang tepat, pembaca akan berusaha menafsirkan isi dari tulisan tersebut bahkan sebelum membaca keseluruhan. Kedua unit analisis isi merupakan representasi dari elemen humanisasi dari ilmu sosial profetik.

Kedua, konsep liberasi diturunkan menjadi empat buah unit analisis, yakni ‘penulis opini’, ‘tema opini’, ‘target opini’ dan ‘gambaran isi opini’. Keempat unit analisis tersebut ditujukan untuk mencari indikasi tulisan yang mengandung unsur liberasi yang mengangkat tinggi martabat kemanusiaan dengan tetap bertanggung jawab atas apa yang telah disampaikan. Unit analisis ‘*penulis opini*’

merupakan bentuk pertanggungjawaban kredibilitas penulis dalam membuat artikelnya, apakah penulis tersebut memang mempunyai kapabilitas didalam pembuatan opini tersebut atau tidak. Unit analisis '*tema opini*' merupakan bentuk kebebasan mengeksplorasi ide yang bebas agar tidak terjebak dalam kekejaman struktural yang ditentukan media atau pasar. Penerbitan opini yang mempunyai tema beragam akan menunjukkan bahwa media tersebut berani membuka peluang untuk merontokkan belenggu struktural yang hanya mengikuti keinginan pasar. Unit analisis '*target opini*' menunjukkan kepada siapa opini tersebut ditujukan. Dengan kata lain, opini yang berisi gagasan, kritik dan saran tersebut apakah cenderung dibuat untuk mengkritik masyarakat, lembaga militer, pemerintah ataukah lembaga swasta. Makin berani ide yang diutarakan dan kritik yang ditulis, semakin kuat pula nilai liberasi yang ada dalam opini tersebut. Sedangkan unit analisis '*gambaran isi opini*' lebih menunjukkan bahwa keberanian penulis untuk mengeksplorasi ide dalam tulisan ditunjukkan dalam gambaran secara umum secara deskriptif, informatif, ataukah sudah sampai pada tahap solutif.

Ketiga, konsep transendensi diturunkan menjadi satu buah unit analisis, yakni : 'nilai atau pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadist' sebagai representasi dari konsep transendensi. Nilai atau pesan ini bisa ditemui baik secara tersurat maupun tersirat dalam teks opini. Transendensi yang merupakan penafsiran dari

'*tu'minunabillah*' mendasari apakah tulisan opini tersebut mempunyai pesan moral, etika, dan agama yang positif bagi pembaca. Berikut ini adalah unit analisis dan kategorisasi yang peneliti susun untuk penelitian ini :

Tabel 1:
Unit analisis dan kategorisasi analisis isi.
(Sumber : olahan peneliti)

Konsep	Unit Analisis	Kategorisasi
Transendensi	Nilai / Pesan yang Sesuai dengan Al-Quran dan Hadist	Sebagai pendukung fakta dan data Sebagai hal utama yang dibahas Sebagai pendukung opini Tidak ada
Liberasi	Penulis Opini	Ulama / Kiai / Pemuka Agama Dosen / Lembaga Pendidikan / Peneliti/ Akademisi Lembaga Umum Sosial (NGO, LSM) Lembaga Umum Negara (BUMN, LBH) Militer / Polisi Praktisi / Profesional
	Tema Opini	Pendidikan Ekonomi Sosial Politik Budaya Agama

	Gambaran isi opini	Deskriptif Informatif Solutif
	Target opini	Pemerintah dan BUMN Militer / Polri Lembaga Swasta Masyarakat Umum
Humanisasi	Pemilihan Judul Opini	Persuasif Positif Persuasif Negatif Netral
	Teknik Pemilihan Kata (Diksi)	Asertif Negatif Netral

d. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi atau penjelasan singkat mengenai masing – masing kategorisasi yang dimaksudkan untuk mempermudah memahami maksud dari masing–masing unit analisis dan kategorisasi tersebut sehingga memudahkan proses pengodingan. Berikut adalah definisi operasional:

- 1) Nilai / Pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist:
Sebagai pendukung fakta dan data, apabila kutipan wahyu Tuhan yang berupa ayat–ayat Al-Quran diletakkan sebagai pendukung fakta dan data yang dibuat penulis.
- 2) Nilai/pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist:
Sebagai hal utama yang dibahas, apabila kutipan wahyu Tuhan yang berupa ayat–ayat Al-Quran sebagai hal utama yang dibahas oleh penulis.
- 3) Nilai/pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist:
Sebagai pendukung opini, apabila kutipan wahyu Tuhan yang berupa ayat–ayat Al-Quran diposisikan sebagai pendukung opini (pendapat) penulis.
- 4) Nilai / Pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist:
Tidak ada, apabila tidak ada sama sekali nilai–nilai yang sesuai dengan Al-Quran dan *Hadist Rasul*.
- 5) Penulis opini:
Ulama / kyai / pemuka agama, apabila penulis opini dikenal dan diketahui sebagai seorang ulama, kyai, atau pemuka agama, dilihat dari keterangan penulis (yang tertulis di bawah nama penulis dalam opini yang dimuat harian Republika).
- 6) Penulis opini :
Dosen/lembaga pendidikan/peneliti/akademisi, apabila penulis opini ini diketahui berprofesi sebagai dosen, penggiat pendidikan, atau peneliti yang berkecimpung dalam dunia

pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.

7) Penulis opini:

Lembaga umum sosial, apabila penulis opini yang berkedudukan didalam lembaga–lembaga umum yang bersifat sosial. Termasuk diantaranya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Non Government Organizations (NGO)* yang fokus menangani masalah – masalah sosial.

8) Penulis opini:

Lembaga umum negara, apabila penulis opini yang membawa nama lembaga–lembaga negara. Termasuk diantaranya perusahaan–perusahaan milik negara (BUMN), kantor–kantor pemerintah, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

9) Penulis opini:

Militer atau polisi, apabila penulis opini yang membawa nama lembaga kemiliteran (TNI AD, AL, atau AU), dan kepolisian (Polri).

10) Penulis opini:

Praktisi atau profesional, apabila penulis opini yang berprofesi sebagai praktisi dan profesional swasta, (perusahaan-perusahaan swasta profit).

11) Tema opini:

Pendidikan, apabila Tema opini yang mengangkat tentang masalah–masalah pendidikan. Mencakup diantaranya

pendidikan formal (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi), pendidikan karakter dan pendidikan usia dini (PAUD).

12) Tema opini:

Ekonomi, apabila tema opini yang mengangkat tentang problematika ekonomi. Termasuk diantaranya tentang harga kebutuhan pokok (sembako), daging, dan barang rumah tangga, harga di pasar global, dan kebijakan ekonomi pemerintah.

13) Tema opini:

Sosial, apabila tema opini yang mengangkat tentang masalah– masalah sosial. Termasuk diantaranya mengenai kriminalitas, kebijakan sosial pemerintah, dan perlindungan HAM, anak, dan perempuan.

14) Tema opini:

Budaya, apabila tema opini yang mengangkat masalah– masalah budaya. Termasuk pula masalah sejarah, peninggalan berharga sejarah, benda cagar budaya, dan kearifan lokal.

15) Tema opini:

Politik, apabila tema opini yang mengangkat masalah politik dan dunia perpolitikan Indonesia. Termasuk juga partai politik, kebijakan politik, dan pemilu.

16) Tema opini:

Agama, apabila tema opini yang mengangkat masalah agama sebagai pokok tulisannya. Termasuk diantaranya mengenai Al-Quran, *As-Sunnah*, *fikih*, *tasawuf*, dan *bid'ah*.

- 17) Teknik pemilihan kata (diksi):
Asertif, apabila teknik pemilihan kata (diksi) yang asertif. Asertif dalam artian menggunakan bahasa kritik yang halus dan tidak menyinggung perasaan pihak lain.
- 18) Teknik pemilihan kata (diksi):
Negatif, apabila teknik pemilihan kata (diksi) yang digunakan cenderung bermakna negatif, menyudutkan obyek yang dikritik.
- 19) Teknik pemilihan kata (diksi):
Netral, apabila teknik pemilihan kata (diksi) yang digunakan netral.
- 20) Gambaran isi opini:
Deskriptif, apabila opini dipaparkan dalam bentuk deskriptif, dengan pola pikir yang bertujuan untuk mendeskripsikan tema dengan sejelas-jelasnya.
- 21) Gambaran isi opini:
Informatif, apabila opini yang dipaparkan oleh penulis memuat lebih banyak informasi–informasi yang layak dipublikasikan. Termasuk pula informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dituliskan dalam bentuk opini.
- 22) Gambaran isi opini:
Solutif, apabila opini yang dipaparkan oleh penulis mempunyai solusi yang ditawarkan melalui bentuk tulisan. Solusi ini bisa dalam bentuk saran yang ditujukan kepada target opini.

23) Target opini:

Pemerintah, apabila target opini yang ditulis adalah untuk lembaga-lembaga pemerintah, mencakup kantor-kantor pemerintahan, kementerian, kepresidenan, dan partai politik.

24) Target opini:

Militer/Polri, apabila target opini yang ditulis adalah untuk lembaga kemiliteran (TNI) dan Kepolisian (POLRI).

25) Target opini:

Lembaga swasta, apabila target opini yang ditulis adalah untuk lembaga-lembaga swasta, mencakup diantaranya perusahaan swasta nasional / lokal, dan lembaga non profit swasta.

26) Target opini:

Masyarakat umum, apabila target opini yang ditulis adalah untuk masyarakat luas tanpa dideskripsikan jelas obyek opininya.

27) Pemilihan judul opini:

Persuasif positif, apabila pemilihan judul opini yang persuasif (mengajak) dan mengandung makna positif.

28) Pemilihan judul opini:

Persuasif negatif, apabila pemilihan judul opini yang persuasif (mengajak) dan mengandung makna negatif.

29) Pemilihan judul opini:

Netral, apabila pemilihan judul opini yang netral, tidak berpersuasif negatif maupun positif.

e. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Sebelum analisis dilakukan, data yang sudah terkumpul dalam bentuk lembar coding (*coding sheet*) harus direkap untuk memudahkan pembacaan data dan analisisnya. Rekapitulasi data tersebut diinput kedalam software SPSS (*Statistical Package for Social Science*) ataupun diinput dalam format *Microsoft Word dan Excell*.

Pertama, peneliti akan melakukan uji reliabilitas dengan rumus yang dipopulerkan oleh R. Holsti (1969). Reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan berapa besar presentase persamaan antar-coder ketika menilai suatu isi (Holsti dalam Eriyanto, 2011:290). Rumusnya adalah :

$$\text{Reliabilitas Antar - Coder} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Dimana M adalah jumlah *coding* yang sama (disetujui oleh masing-masing *coder*), N1 adalah jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 1, N2 adalah jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 2. Eriyanto (2011 : 290) menambahkan bahwa reliabilitas bergerak antara 0–1. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70 %. Jika hasil perhitungan menunjukkan angka

reliabilitas diatas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi, jika dibawah 0,7, berarti *coding sheet* (alat ukur) belum reliabel.

Tahap awal analisis data adalah mendeskripsikan temuan menggunakan statistik deskriptif. Disebut statistik deskriptif karena statistik ini bertujuan mendeskripsikan dan menjabarkan temuan dan data yang didapat dari analisis isi (Eriyanto, 2011:306). Kemudian, data yang ada dibuat menjadi bentuk tabel frekuensi. Peneliti menggunakan tabel frekuensi biasa untuk memaparkan hasil datanya. Masing-masing unit analisis mempunyai satu tabel frekuensi yang dibuat visualisasinya dalam bentuk grafik. Peneliti menggunakan jenis grafik batang dan diagram lingkaran.

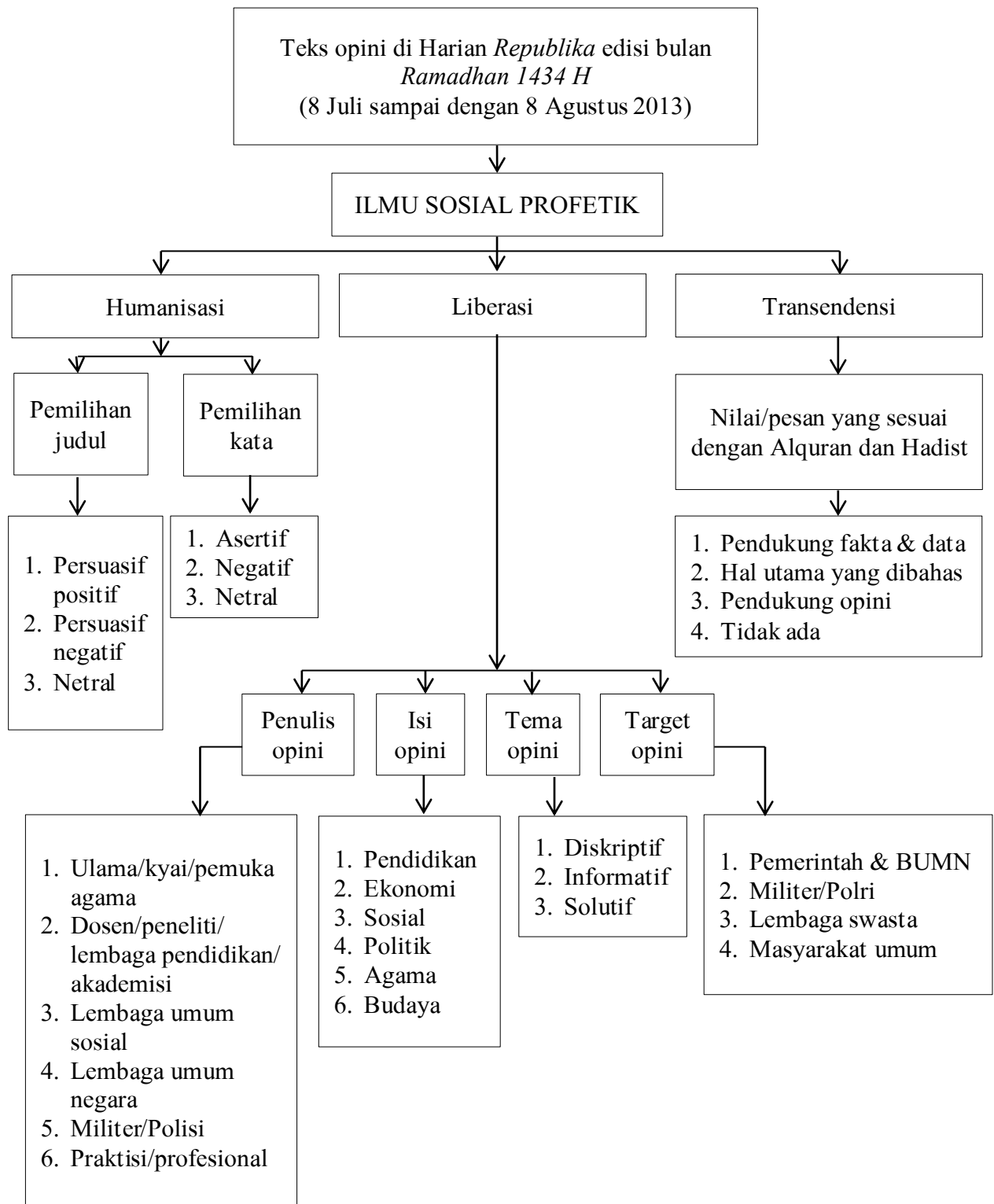
Selanjutnya, data yang sudah tersaji akan dihitung kembali untuk menguji hipotesis H_0 dan H_1 . Peneliti akan menggunakan teknik perhitungan *Chi Square* (Chi Kuadrat). Rumusnya adalah :

$$X^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Dimana X^2 adalah *chi square*, O adalah frekuensi observasi, dan E adalah frekuensi harapan. Perhitungan ini bisa dilakukan secara manual, namun jauh lebih mudah menggunakan program komputer SPSS yang banyak beredar di Indonesia. Jika hasil perhitungan $\bar{p} > 0,05$, maka H_0 ditolak, sementara jika $\bar{p} < 0,05$, maka H_1 yang ditolak.

I. KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

Bagan 1:
Kerangka pemikiran penelitian
(Sumber : Olahan Peneliti)



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui pendeskripsian dan penafsiran hasil penelitian serta perhitungan *chi kuadrat* diperoleh hasil bahwa terdapat nilai-nilai profetik dalam opini harian Republika selama bulan Ramadhan 1434 H (periode 8 Juli-7 Agustus 2013). Dengan demikian, hipotesis Ho (tidak ada nilai profetik dalam opini harian Republika selama bulan Ramadhan 1434 H) ditolak dan H_1 (ada nilai profetik yang terdapat dalam opini harian Republika periode bulan Ramadhan 1434 H) diterima. Nilai – nilai profetik tersebut terwujud dalam tujuh unit yang terdapat dalam opini, antara lain : ‘nilai atau pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist’, ‘penulis opini’, ‘tema opini’, ‘teknik pemilihan kata (diksi)’, ‘gambaran isi opini’, ‘target opini’, dan ‘pemilihan judul opini’. Keseluruhan unit analisis tersebut mempunyai angka reliabilitas yang memadai dengan nilai paling rendah berada pada angka 0,79167 dan nilai paling tinggi mencapai angka 0,97917.

Dari ketujuh unit analisis yang digunakan, terdapat 6 (enam) unit analisis yang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai obyektifikasi dari Ilmu Sosial Profetik, yakni, *pertama*, ‘Penulis Opini’ dengan perolehan angka paling tinggi ada pada kategorisasi 2 (dosen/ lembaga pendidikan/ peneliti/ akademisi) sebanyak 44 %, kemudian disusul penulis opini dari kalangan praktisi atau profesional sebanyak 31 %, diikuti oleh penulis yang berasal dari lembaga umum negara atau BUMN dan LBH sebanyak 14 %, kemudian

penulis dari lembaga umum sosial seperti NGO atau LSM sebesar 6 %, dan terakhir penulis dari kalangan ulama, kiai, atau pemuka agama sebesar 5 %.

Kedua, unit analisis ‘Tema Opini’ dengan perolehan point tema ‘sosial’ mendapat tempat tertinggi dengan persentase 33 %. Disusul kemudian opini yang bertema ‘ekonomi’ sebesar 24 %, lalu diikuti oleh opini – opini dengan tema ‘politik’ sebanyak 18 %, disusul oleh opini bertema ‘agama’ sebesar 15 %, lalu artikel bertema ‘pendidikan’ berada tepat dibawahnya dengan persentase 9 %, dan terakhir artikel bertema ‘budaya’ dengan hanya mendapat porsi 1 %.

Ketiga, unit analisis ‘Teknik Pemilihan Kata (Diksi)’ sebagian besar adalah netral dengan perolehan angka 58 %. Sedangkan teknik pemilihan kata yang asertif mendapat poin sebesar 29 %, disusul kemudian teknik pemilihan kata yang negatif disepakati ada 13 % dari keseluruhan opini yang berjumlah 48 buah.

Keempat, unit analisis ‘Gambaran Isi Opini’, dengan kategorisasi gambaran isi opini deskriptif memperoleh persentase sebesar 40 %, kemudian poin tertinggi diambil oleh gambaran isi informatif sebesar 46 % dan disusul oleh gambaran isi solutif sebesar 15 %.

Kelima, unit analisis ‘Target Opini’ dengan target pemerintah dan BUMN menjadi sasaran terbesar dengan porsi 57 %. Disusul kemudian masyarakat umum dengan persentase sebesar 40 %, lalu lembaga swasta hanya mendapat 2 %, dan sisanya militer / polri harus puas dengan posisi 1 %. Dan keenam, unit analisis ‘Pemilihan Judul Opini’ yang bersifat persuasif positif mendapat porsi 31 %. Kemudian judul yang mendapat penilaian negatif ada 14 %, dan judul yang terindikasi netral menempati porsi terbesar yakni 56 %.

Sedangkan unit analisis ‘Nilai atau Pesan yang Sesuai dengan Al-Quran dan Hadist’ sebagai pendukung fakta data memperoleh jumlah 47 poin (33 %), sebagai hal utama yang dibahas menduduki angka 20 poin (14 %), sebagai pendukung opini hanya mendapat 3 poin (2 %) dan kategorisasi keempat yakni tidak ada nilai / pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan atau Hadist mendapat porsi terbesar yakni 74 poin (54 %). Perhitungan ini memperoleh hasil bahwa terdapat satu buah unit analisis yang tidak memenuhi syarat minimal (0,7 atau 70 %) yakni dengan jumlah opini yang mempunyai nilai atau pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist hanya sebanyak 49 % (tidak mencapai 70 %). Sementara keenam unit analisis lain tetap mempunyai nilai profetik lebih dari 70 % sesuai yang diharapkan Ilmu Sosial Profetik.

B. SARAN

Setelah melalui pendeskripsian yang terperinci, peneliti menemukan hal – hal yang patut digaris bawahi, antara lain :

1. Meski selama bulan Ramadhan 1434 H, opini dalam harian Republika memang mempunyai nilai–nilai profetik di dalamnya, tetapi unit analisis ‘nilai atau pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist’ memperoleh hasil bahwa sebanyak 51 % justru tidak mempunyai nilai atau pesan yang sesuai dengan kitab suci dan hadist nabi. Temuan ini mengindikasikan bahwa harian Republika harus memperluas jangkauannya dalam mencari, memilah dan memilih opini yang sekiranya mempunyai nilai – nilai yang

sesuai dengan *sunnatullah*. Dalam hal ini, redaktur dan pemimpin redaksi merupakan sosok yang mempunyai wewenang untuk memilih dari sekian banyak opini yang masuk ke redaksi.

2. Sebaiknya hindari penggunaan istilah dengan Bahasa Arab jika istilah tersebut bisa *ditranslate* kedalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang lebih umum. Harapannya bahwa pembaca yang bukan muslim, bisa mencerna dengan baik segala nilai atau pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist yang terdapat dalam artikel dengan nyaman karena penggunaan kosakata yang lebih universal.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab :

Al-Quran dan Terjemahannya. 2000. Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsiran. Bandung : CV. Diponegoro.

Buku :

Abdullah, Aceng. 2011. *Komunikasi Kontekstual, Fenomena Baru Dunia Jurnalistik* (Deddy Mulyana, Ed). Bandung : Remaja Rosdakarya.

Baran, Stanley J. 2012. *Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 Edisi 5*. Jakarta : Erlangga.

Effendy, Onong Uchjanah. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung : Mandar Maju

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi : Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Hamka, 1986. *Tafsir Al-Azhar Juz Vh.120*. Jakarta : Panjimas.

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Kuntowijoyo. 2006. *Islam Sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta : Tiara Wacana

Mc. Quail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa Buku 1 Edisi 6*. Jakarta : Salemba Humanika.

Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta : Rajawali Press.

Pawito. 2008. *Pemelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS

Rahardi, Kunjana. 2010. *Dasar – Dasar Penyuntingan Bahasa Media*. Depok : Gramata Publishing.

Sudibyoy, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKis.

Susanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan, UNS.

Syahputra, Iswandi, dkk. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta : Pokja Akademik

Syahputra, Iswandi. 2007. *Komunikasi Profetik : Konsep dan Pendekatan*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Tebba, Sudirman. 2008. *Etika Media Massa Indonesia*. Tangerang : Pustaka Irvan.

Skripsi :

Jazilah, Ummu. 2004. *Klasifikasi Wacana Penyiaran Islam Rubrik Serambi Tabloid Nurani Periode 2003/2004 (Analisis Isi)*". Yogyakarta : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

Purnomo, Agus. 2004. *Analisis Isi Pada Kolom Khotbah Jum'at di Majalah Suara Muhammadiyah (Edisi Juli 2002-Juni 2003)*. Yogyakarta : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

Sabaria, Sri. 2005. *'Tipologi Artikel Agama Islam Dalam Kolom Opini Harian Umum Republika Edisi Mei 2002 – April 2003 (Analisis Isi)*. Yogyakarta : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

Safarudin. 2013. *Antitesis Nilai – Nilai Profetik dalam Iklan (Analisis Semiotika Iklan Kecantikan dalam Majalah Sekar Edisi 90/12 22 Agustus – 05 September)*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.

Tesis :

Fanani, Fajriannoor. 2011. *Analisis Kebijakan Redaksional Republika pada Pemberitaan Religio Politik Masa Kampanye Presiden Tahun 2009*. Semarang : Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro.

Website :

(<http://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm>, diakses tanggal 18 Mei 2014, pukul 15.58)

<http://www.republika.co.id/page/about> (diakses pada 14 Maret 2014, pukul 12.33 WIB).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

No Coding :

LEMBAR CODING
NILAI PROFETIK DALAM MEDIA MASSA
(Analisis Isi Opini Harian Republika Periode Ramadhan 1434)

Edisi / Hari / Tanggal

Judul Opini

Penulis Opini

1. Kutipan Wahyu Tuhan

1 = sebagai pendukung fakta dan data

2 = Sebagai hal utama yang dibahas

3 = Sebagai pendukung opini

2. Penulis Opini

1 = Ulama / Kiai / Pemuka Agama

2 = Dosen / Lembaga Pendidikan / Peneliti

3 = Lembaga Umum Sosial (NGO, LSM)

4 = Lembaga Umum Negara (BUMN, LBH)

5 = Militer / Polisi

6 = Praktisi / Profesional

3. Tema Opini

1 = Pendidikan

2 = Ekonomi

3 = Sosial

4 = Politik

5 = Budaya

6 = Agama

4. Teknik Pemilihan Kata (Diksi)

1 = Asertif

2 = Negatif

3 = Tidak Jelas

5. Gambaran Isi Opini

1 = Deskriptif

2 = Informatif

3 = Solutif

6. Target Opini

1 = Pemerintah dan BUMN

2 = Militer / Polri

3 = Lembaga Swasta

4 = Masyarakat Umum

7. Pemilihan Judul Opini

1 = Persuasif Positif

2 = Persuasif Negatif

3 = Netral

HASIL CODING

Unit Analisis 1. Nilai / Pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist

No.	No. Berita	Peneliti	N1	N2
1.	1 (Ramadhan untuk Muhasabah)	2	2	2
2.	2 (Kemiskinan dan Perempuan)	1	4	1
3.	3 (Problem Revolusi Mesir)	4	4	1
4.	4 (Langkah Untuk Masa Depan)	1	4	1
5.	5 (Tamarrud Vs. Tajarrud)	1	4	1
6.	6 (Komunikasi Minim Makna)	1	4	1
7.	7 (Miras Pasca Putusan MA)	1	1	1
8.	8 (Menyambut Kurikulum 2013)	1	4	1
9.	9 (Kurikulum Baru)	1	4	1
10.	10 (Refleksi Hari Kependudukan)	1	1	1
11.	11 (Puasa, Utang, Kemiskinan)	1	1	1
12.	12 (Tambang Timah Untuk Rakyat)	4	4	4
13.	13 (Kronisme Pengelolaan Lapas)	4	4	4
14.	14 (Petani dan Politik Pangan)	1	1	1
15.	15 (Anarkisme Mengancam Mesir)	4	4	1
16.	16 (Keteladanan Profetik Natsir)	3	2	2
17.	17 (Zakat dalam Dinar dan Dirham)	2	1	2
18.	18 (Fikih Penjara)	3	1	2
19.	19 (Investasi NOC, Sanggupkah?)	4	4	4
20.	20 (Mengabaikan Proses)	4	4	1
21.	21 (Menstabilkan Harga Pangan Pokok)	4	4	4
22.	22 (Stok Penyangga Pangan)	4	4	4
23.	23 (Presiden Parpol)	4	4	4
24.	24 (Produksi Citra Politik)	4	4	4
25.	25 (Anak dalam Kemiskinan)	4	4	1
26.	26 (Cinta Al-Quran Selamatkan Hidup)	2	2	2

27.	27 (Prahara Harga Pangan)	4	4	4
28.	28 (Hukum dan Sarana Telekomunikasi)	4	4	4
29.	29 (Firman Pertama)	2	2	2
30.	30 (Anomali Pemicu Cikunguya)	4	4	4
31.	31 (Deradikalisasi Napi Teroris)	4	4	4
32.	32 (THR Buruh Kontrak Outsourcing)	4	4	4
33.	33 (Kemitraan Kebijakan Pangan)	4	4	4
34.	34 (Konflik Mesir dan Indonesia)	1	4	4
35.	35 (Esensi Mudik)	1	4	1
36.	36 (Konteks Lailatul Qadar)	2	2	2
37.	37 (Mesir dan Keruntuhan Demokrasi)	4	4	4
38.	38 (Membangun Kapet)	4	4	4
39.	39 (Fenomena Sidang Istbat)	1	4	1
40.	40 (Quo Vadis Swasembada Daging Sapi)	4	4	4
41.	41 (Bom Waktu "Panic Policy" Sapi)	4	4	4
42.	42 (Manajemen Mudik)	4	4	4
43.	43 (Komunikasi Lebaran)	1	1	1
44.	44 (Mesir, Turki, dan Indonesia)	3	4	4
45.	45 (Puasa dan Umat Terbaik)	2	2	2
46.	46 (Kesadaran Spiritual Mudik)	1	1	1
47.	47 (Berubah pada Hari Fitri)	1	1	1
48.	48 (Idul Fitri dan Politik Humanis)	1	1	1

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.42}{48 + 48}$$

$$= \frac{84}{96} = 0,875$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.40}{48 + 48}$$

$$= \frac{80}{96} = 0,8333$$

Unit Analisis 2. Penulis Opini

No.	No. Berita	Peneliti	N1	N2
1.	1 (Ramadhan untuk Muhasabah)	4	2	1
2.	2 (Kemiskinan dan Perempuan)	4	4	4
3.	3 (Problem Revolusi Mesir)	2	6	2
4.	4 (Langkah Untuk Masa Depan)	6	6	6
5.	5 (Tamarrud Vs. Tajarrud)	6	2	6
6.	6 (Komunikasi Minim Makna)	2	2	2
7.	7 (Miras Pasca Putusan MA)	2	2	2
8.	8 (Menyambut Kurikulum 2013)	2	2	2
9.	9 (Kurikulum Baru)	4	4	4
10.	10 (Refleksi Hari Kependudukan)	2	6	6
11.	11 (Puasa, Utang, Kemiskinan)	3	3	3
12.	12 (Tambang Timah Untuk Rakyat)	6	6	6
13.	13 (Kronisme Pengelolaan Lapas)	6	4	6
14.	14 (Petani dan Politik Pangan)	3	3	3
15.	15 (Anarkisme Mengancam Mesir)	6	6	6
16.	16 (Keteladanan Profetik Natsir)	4	6	6
17.	17 (Zakat dalam Dinar dan Dirham)	6	6	6
18.	18 (Fikih Penjara)	2	2	2
19.	19 (Investasi NOC, Sanggupkah?)	2	2	2
20.	20 (Mengabaikan Proses)	2	2	2
21.	21 (Menstabilkan Harga Pangan Pokok)	2	2	2
22.	22 (Stok Penyangga Pangan)	6	4	6
23.	23 (Presiden Parpol)	2	2	2
24.	24 (Produksi Citra Politik)	2	2	2
25.	25 (Anak dalam Kemiskinan)	4	4	4
26.	26 (Cinta Al-Quran Selamatkan Hidup)	2	2	2
27.	27 (Prahara Harga Pangan)	6	6	6
28.	28 (Hukum dan Sarana Telekomunikasi)	6	6	6

29.	29 (Firman Pertama)	2	4	2
30.	30 (Anomali Pemicu Cikunguya)	2	2	2
31.	31 (Deradikalisasi Napi Teroris)	4	4	4
32.	32 (THR Buruh Kontrak Outsourcing)	3	3	3
33.	33 (Kemitraan Kebijakan Pangan)	4	4	4
34.	34 (Konflik Mesir dan Indonesia)	2	2	2
35.	35 (Esensi Mudik)	2	2	2
36.	36 (Konteks Lailatul Qadar)	2	2	2
37.	37 (Mesir dan Keruntuhan Demokrasi)	2	2	2
38.	38 (Membangun Kapet)	2	2	2
39.	39 (Fenomena Sidang Istbat)	6	6	6
40.	40 (Quo Vadis Swasembada Daging Sapi)	2	6	2
41.	41 (Bom Waktu "Panic Policy" Sapi)	6	6	6
42.	42 (Manajemen Mudik)	6	6	6
43.	43 (Komunikasi Lebaran)	6	6	6
44.	44 (Mesir, Turki, dan Indonesia)	2	2	2
45.	45 (Puasa dan Umat Terbaik)	6	6	6
46.	46 (Kesadaran Spiritual Mudik)	1	1	1
47.	47 (Berubah pada Hari Fitri)	1	1	1
48.	48 (Idul Fitri dan Politik Humanis)	2	2	2

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.39}{48 + 48}$$

$$= \frac{78}{96} = 0,8125$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.44}{48 + 48}$$

$$= \frac{90}{96} = 0,9375$$

Unit Analisis 3. Tema Opini

No.	No. Berita	Peneliti	N1	N2
1.	1 (Ramadhan untuk Muhasabah)	6	6	6
2.	2 (Kemiskinan dan Perempuan)	2	2	2
3.	3 (Problem Revolusi Mesir)	4	4	2
4.	4 (Langkah Untuk Masa Depan)	2	2	2
5.	5 (Tamarrud Vs. Tajarrud)	4	4	4
6.	6 (Komunikasi Minim Makna)	1	1	1
7.	7 (Miras Pasca Putusan MA)	3	3	3
8.	8 (Menyambut Kurikulum 2013)	1	1	1
9.	9 (Kurikulum Baru)	1	1	1
10.	10 (Refleksi Hari Kependudukan)	3	3	3
11.	11 (Puasa, Utang, Kemiskinan)	3	2	2
12.	12 (Tambang Timah Untuk Rakyat)	2	2	2
13.	13 (Kronisme Pengelolaan Lapas)	4	4	4
14.	14 (Petani dan Politik Pangan)	2	2	2
15.	15 (Anarkisme Mengancam Mesir)	4	4	4
16.	16 (Keteladanan Profetik Natsir)	6	6	6
17.	17 (Zakat dalam Dinar dan Dirham)	6	6	6
18.	18 (Fikih Penjara)	3	3	3
19.	19 (Investasi NOC, Sanggupkah?)	2	2	2
20.	20 (Mengabaikan Proses)	1	1	1
21.	21 (Menstabilkan Harga Pangan Pokok)	2	2	2
22.	22 (Stok Penyangga Pangan)	2	2	2
23.	23 (Presiden Parpol)	4	4	4
24.	24 (Produksi Citra Politik)	4	4	4
25.	25 (Anak dalam Kemiskinan)	3	3	3
26.	26 (Cinta Al-Quran Selamatkan Hidup)	6	6	6
27.	27 (Prahara Harga Pangan)	2	2	2
28.	28 (Hukum dan Sarana Telekomunikasi)	3	3	3

29.	29 (Firman Pertama)	6	6	6
30.	30 (Anomali Pemicu Cikunguya)	3	3	3
31.	31 (Deradikalisasi Napi Teroris)	3	1	3
32.	32 (THR Buruh Kontrak Outsourcing)	3	3	3
33.	33 (Kemitraan Kebijakan Pangan)	2	3	3
34.	34 (Konflik Mesir dan Indonesia)	4	4	4
35.	35 (Esensi Mudik)	3	3	3
36.	36 (Konteks Lailatul Qadar)	6	6	6
37.	37 (Mesir dan Keruntuhan Demokrasi)	4	4	4
38.	38 (Membangun Kapet)	2	2	2
39.	39 (Fenomena Sidang Istbat)	3	3	3
40.	40 (Quo Vadis Swasembada Daging Sapi)	2	2	2
41.	41 (Bom Waktu "Panic Policy" Sapi)	2	3	3
42.	42 (Manajemen Mudik)	3	3	3
43.	43 (Komunikasi Lebaran)	5	3	3
44.	44 (Mesir, Turki, dan Indonesia)	4	4	4
45.	45 (Puasa dan Umat Terbaik)	6	6	6
46.	46 (Kesadaran Spiritual Mudik)	3	5	3
47.	47 (Berubah pada Hari Fitri)	6	3	3
48.	48 (Idul Fitri dan Politik Humanis)	3	3	3

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.41}{48 + 48}$$

$$= \frac{82}{96} = 0,85417$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.43}{48 + 48}$$

$$= \frac{86}{96} = 0,89583$$

Unit Analisis 4. Teknik Pemilihan Kata (Diksi)

No.	No. Berita	Peneliti	N1	N2
1.	1 (Ramadhan untuk Muhasabah)	1	1	1
2.	2 (Kemiskinan dan Perempuan)	3	3	3
3.	3 (Problem Revolusi Mesir)	3	3	3
4.	4 (Langkah Untuk Masa Depan)	1	1	1
5.	5 (Tamarrud Vs. Tajarrud)	3	3	3
6.	6 (Komunikasi Minim Makna)	1	1	3
7.	7 (Miras Pasca Putusan MA)	1	3	3
8.	8 (Menyambut Kurikulum 2013)	2	2	2
9.	9 (Kurikulum Baru)	1	3	1
10.	10 (Refleksi Hari Kependudukan)	1	1	3
11.	11 (Puasa, Utang, Kemiskinan)	3	2	2
12.	12 (Tambang Timah Untuk Rakyat)	3	3	3
13.	13 (Kronisme Pengelolaan Lapas)	2	2	2
14.	14 (Petani dan Politik Pangan)	3	3	3
15.	15 (Anarkisme Mengancam Mesir)	3	2	3
16.	16 (Keteladanan Profetik Natsir)	1	1	1
17.	17 (Zakat dalam Dinar dan Dirham)	3	3	3
18.	18 (Fikih Penjara)	1	1	3
19.	19 (Investasi NOC, Sanggupkah?)	3	3	3
20.	20 (Mengabaikan Proses)	1	2	3
21.	21 (Menstabilkan Harga Pangan Pokok)	3	3	3
22.	22 (Stok Penyangga Pangan)	3	3	3
23.	23 (Presiden Parpol)	3	1	3
24.	24 (Produksi Citra Politik)	3	3	3
25.	25 (Anak dalam Kemiskinan)	1	3	3
26.	26 (Cinta Al-Quran Selamatkan Hidup)	1	1	1
27.	27 (Prahara Harga Pangan)	3	3	3
28.	28 (Hukum dan Sarana Telekomunikasi)	3	3	3

29.	29 (Firman Pertama)	3	3	3
30.	30 (Anomali Pemicu Cikunguya)	1	1	3
31.	31 (Deradikalisasi Napi Teroris)	2	2	3
32.	32 (THR Buruh Kontrak Outsourcing)	1	2	2
33.	33 (Kemitraan Kebijakan Pangan)	3	3	3
34.	34 (Konflik Mesir dan Indonesia)	2	2	2
35.	35 (Esensi Mudik)	1	3	1
36.	36 (Konteks Lailatul Qadar)	1	1	1
37.	37 (Mesir dan Keruntuhan Demokrasi)	3	2	3
38.	38 (Membangun Kapet)	3	3	3
39.	39 (Fenomena Sidang Istbat)	3	3	3
40.	40 (Quo Vadis Swasembada Daging Sapi)	3	3	3
41.	41 (Bom Waktu "Panic Policy" Sapi)	3	3	3
42.	42 (Manajemen Mudik)	3	2	3
43.	43 (Komunikasi Lebaran)	1	1	1
44.	44 (Mesir, Turki, dan Indonesia)	3	3	3
45.	45 (Puasa dan Umat Terbaik)	1	1	1
46.	46 (Kesadaran Spiritual Mudik)	3	3	3
47.	47 (Berubah pada Hari Fitri)	1	1	1
48.	48 (Idul Fitri dan Politik Humanis)	3	3	1

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.39}{48 + 48}$$

$$= \frac{78}{96} = 0,8125$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.40}{48 + 48}$$

$$= \frac{80}{96} = 0,8333$$

Unit Analisis 5. Gambaran isi Opini

No.	No. Berita	Peneliti	N1	N2
1.	1 (Ramadhan untuk Muhasabah)	1	1	3
2.	2 (Kemiskinan dan Perempuan)	2	2	3
3.	3 (Problem Revolusi Mesir)	2	2	2
4.	4 (Langkah Untuk Masa Depan)	2	1	2
5.	5 (Tamarrud Vs. Tajarrud)	2	2	1
6.	6 (Komunikasi Minim Makna)	2	2	2
7.	7 (Miras Pasca Putusan MA)	1	1	1
8.	8 (Menyambut Kurikulum 2013)	2	2	2
9.	9 (Kurikulum Baru)	1	2	1
10.	10 (Refleksi Hari Kependudukan)	2	2	2
11.	11 (Puasa, Utang, Kemiskinan)	2	2	2
12.	12 (Tambang Timah Untuk Rakyat)	2	2	2
13.	13 (Kronisme Pengelolaan Lapas)	2	2	2
14.	14 (Petani dan Politik Pangan)	3	1	2
15.	15 (Anarkisme Mengancam Mesir)	2	2	2
16.	16 (Keteladanan Profetik Natsir)	1	1	1
17.	17 (Zakat dalam Dinar dan Dirham)	2	2	2
18.	18 (Fikih Penjara)	1	1	1
19.	19 (Investasi NOC, Sanggupkah?)	2	2	2
20.	20 (Mengabaikan Proses)	1	1	1
21.	21 (Menstabilkan Harga Pangan Pokok)	2	1	3
22.	22 (Stok Penyangga Pangan)	1	1	1
23.	23 (Presiden Parpol)	2	2	2
24.	24 (Produksi Citra Politik)	2	2	1
25.	25 (Anak dalam Kemiskinan)	3	2	3
26.	26 (Cinta Al-Quran Selamatkan Hidup)	1	1	1
27.	27 (Prahara Harga Pangan)	3	2	3
28.	28 (Hukum dan Sarana Telekomunikasi)	3	3	3

29.	29 (Firman Pertama)	1	1	1
30.	30 (Anomali Pemicu Cikunguya)	2	1	2
31.	31 (Deradikalisasi Napi Teroris)	1	1	1
32.	32 (THR Buruh Kontrak Outsourcing)	2	2	2
33.	33 (Kemitraan Kebijakan Pangan)	3	1	3
34.	34 (Konflik Mesir dan Indonesia)	2	2	2
35.	35 (Esensi Mudik)	1	1	1
36.	36 (Konteks Lailatul Qadar)	1	1	1
37.	37 (Mesir dan Keruntuhan Demokrasi)	3	2	2
38.	38 (Membangun Kapet)	3	2	3
39.	39 (Fenomena Sidang Istbat)	2	2	2
40.	40 (Quo Vadis Swasembada Daging Sapi)	2	2	2
41.	41 (Bom Waktu "Panic Policy" Sapi)	2	2	1
42.	42 (Manajemen Mudik)	3	3	3
43.	43 (Komunikasi Lebaran)	1	1	1
44.	44 (Mesir, Turki, dan Indonesia)	3	3	3
45.	45 (Puasa dan Umat Terbaik)	1	1	1
46.	46 (Kesadaran Spiritual Mudik)	1	1	1
47.	47 (Berubah pada Hari Fitri)	1	1	1
48.	48 (Idul Fitri dan Politik Humanis)	1	1	1

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.39}{48 + 48}$$

$$= \frac{78}{96} = 0,8125$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.43}{48 + 48}$$

$$= \frac{86}{96} = 0,89593$$

Unit Analisis 6. Target Opini

No.	No. Berita	Peneliti	N1	N2
1.	1 (Ramadhan untuk Muhasabah)	4	4	4
2.	2 (Kemiskinan dan Perempuan)	4	4	4
3.	3 (Problem Revolusi Mesir)	4	2	4
4.	4 (Langkah Untuk Masa Depan)	1	1	1
5.	5 (Tamarrud Vs. Tajarrud)	1	1	1
6.	6 (Komunikasi Minim Makna)	4	4	4
7.	7 (Miras Pasca Putusan MA)	1	1	1
8.	8 (Menyambut Kurikulum 2013)	1	1	1
9.	9 (Kurikulum Baru)	4	4	4
10.	10 (Refleksi Hari Kependudukan)	1	1	1
11.	11 (Puasa, Utang, Kemiskinan)	1	1	1
12.	12 (Tambang Timah Untuk Rakyat)	1	1	1
13.	13 (Kronisme Pengelolaan Lapas)	1	2	1
14.	14 (Petani dan Politik Pangan)	1	1	1
15.	15 (Anarkisme Mengancam Mesir)	1	1	1
16.	16 (Keteladanan Profetik Natsir)	1	1	1
17.	17 (Zakat dalam Dinar dan Dirham)	4	4	4
18.	18 (Fikih Penjara)	1	1	1
19.	19 (Investasi NOC, Sanggupkah?)	1	1	1
20.	20 (Mengabaikan Proses)	1	1	1
21.	21 (Menstabilkan Harga Pangan Pokok)	1	1	1
22.	22 (Stok Penyangga Pangan)	4	4	1
23.	23 (Presiden Parpol)	4	4	4
24.	24 (Produksi Citra Politik)	3	3	3
25.	25 (Anak dalam Kemiskinan)	1	1	1
26.	26 (Cinta Al-Quran Selamatkan Hidup)	4	4	4
27.	27 (Prahara Harga Pangan)	1	1	1
28.	28 (Hukum dan Sarana Telekomunikasi)	1	1	1

29.	29 (Firman Pertama)	4	1	4
30.	30 (Anomali Pemicu Cikunguya)	4	4	4
31.	31 (Deradikalisasi Napi Teroris)	1	1	1
32.	32 (THR Buruh Kontrak Outsourcing)	1	1	1
33.	33 (Kemitraan Kebijakan Pangan)	1	1	1
34.	34 (Konflik Mesir dan Indonesia)	1	1	1
35.	35 (Esensi Mudik)	4	4	4
36.	36 (Konteks Lailatul Qadar)	4	4	4
37.	37 (Mesir dan Keruntuhan Demokrasi)	1	1	1
38.	38 (Membangun Kapet)	1	1	1
39.	39 (Fenomena Sidang Istbat)	4	4	4
40.	40 (Quo Vadis Swasembada Daging Sapi)	1	1	1
41.	41 (Bom Waktu "Panic Policy" Sapi)	1	1	1
42.	42 (Manajemen Mudik)	1	1	1
43.	43 (Komunikasi Lebaran)	4	4	4
44.	44 (Mesir, Turki, dan Indonesia)	4	4	4
45.	45 (Puasa dan Umat Terbaik)	4	4	4
46.	46 (Kesadaran Spiritual Mudik)	4	4	4
47.	47 (Berubah pada Hari Fitri)	4	4	4
48.	48 (Idul Fitri dan Politik Humanis)	4	4	4

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.45}{48 + 48}$$

$$= \frac{90}{96} = 0,9375$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.47}{48 + 48}$$

$$= \frac{94}{96} = 0,97917$$

Unit Analisis 7. Pemilihan Judul Opini

No.	No. Berita	Peneliti	N1	N2
1.	1 (Ramadhan untuk Muhasabah)	1	1	1
2.	2 (Kemiskinan dan Perempuan)	3	2	3
3.	3 (Problem Revolusi Mesir)	3	2	3
4.	4 (Langkah Untuk Masa Depan)	1	1	1
5.	5 (Tamarrud Vs. Tajarrud)	3	3	3
6.	6 (Komunikasi Minim Makna)	1	1	3
7.	7 (Miras Pasca Putusan MA)	3	3	3
8.	8 (Menyambut Kurikulum 2013)	1	2	3
9.	9 (Kurikulum Baru)	3	3	3
10.	10 (Refleksi Hari Kependudukan)	1	1	1
11.	11 (Puasa, Utang, Kemiskinan)	2	2	2
12.	12 (Tambang Timah Untuk Rakyat)	1	1	3
13.	13 (Kronisme Pengelolaan Lapas)	2	2	2
14.	14 (Petani dan Politik Pangan)	3	3	3
15.	15 (Anarkisme Mengancam Mesir)	2	2	2
16.	16 (Keteladanan Profetik Natsir)	1	1	1
17.	17 (Zakat dalam Dinar dan Dirham)	3	3	3
18.	18 (Fikih Penjara)	3	1	3
19.	19 (Investasi NOC, Sanggupkah?)	3	3	3
20.	20 (Mengabaikan Proses)	3	3	3
21.	21 (Menstabilkan Harga Pangan Pokok)	3	3	3
22.	22 (Stok Penyangga Pangan)	3	3	3
23.	23 (Presiden Parpol)	3	1	3
24.	24 (Produksi Citra Politik)	3	3	3
25.	25 (Anak dalam Kemiskinan)	2	2	3
26.	26 (Cinta Al-Quran Selamatkan Hidup)	1	1	1
27.	27 (Prahara Harga Pangan)	3	3	3
28.	28 (Hukum dan Sarana Telekomunikasi)	3	3	3

29.	29 (Firman Pertama)	1	1	3
30.	30 (Anomali Pemicu Cikunguya)	3	2	3
31.	31 (Deradikalisasi Napi Teroris)	2	2	3
32.	32 (THR Buruh Kontrak Outsourcing)	3	2	3
33.	33 (Kemitraan Kebijakan Pangan)	1	1	1
34.	34 (Konflik Mesir dan Indonesia)	3	2	3
35.	35 (Esensi Mudik)	3	3	3
36.	36 (Konteks Lailatul Qadar)	1	1	1
37.	37 (Mesir dan Keruntuhan Demokrasi)	3	2	3
38.	38 (Membangun Kapet)	1	1	3
39.	39 (Fenomena Sidang Istbat)	3	3	3
40.	40 (Quo Vadis Swasembada Daging Sapi)	3	3	3
41.	41 (Bom Waktu "Panic Policy" Sapi)	3	3	3
42.	42 (Manajemen Mudik)	1	1	3
43.	43 (Komunikasi Lebaran)	3	1	3
44.	44 (Mesir, Turki, dan Indonesia)	3	3	3
45.	45 (Puasa dan Umat Terbaik)	1	1	1
46.	46 (Kesadaran Spiritual Mudik)	1	1	1
47.	47 (Berubah pada Hari Fitri)	1	1	1
48.	48 (Idul Fitri dan Politik Humanis)	3	3	3

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.38}{48 + 48}$$

$$= \frac{76}{96} = 0,79167$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.42}{48 + 48}$$

$$= \frac{84}{96} = 0,875$$

Ramadhan untuk Muhasabah

■ AHMAD IZZUDDIN

Kasubdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Kemenag RI, Pengasuh Pesantren Mahasiswa Daarun Najaah Semarang

Ada sebuah sabda yang menarik dari Nabi Isa Alaihissalam (AS), yang diriwayatkan Ali bin Musa al-Ridla (salah seorang imam kaum Syiah). Dikatakan bersabda Nabi Isa AS: "Sungguh aku telah mengobati orang-orang yang sakit, dan aku sembuhkan mereka dengan perkenan Allah. Juga, aku sembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit lepra dengan perkenan Allah, juga aku obati orang-orang mati dan aku hidupkan kembali mereka dengan perkenan Allah, kemudian aku obati orang dungu, tapi aku tidak mampu menyembuhkannya."

Pada suatu hari beliau pun ditanya: "Wahai ruh Allah, siapakah orang dungu itu?" Beliau menjawab: "Yaitu orang yang kagum pada pendapatnya sendiri, yang memandang semua keunggulannya ada padanya dan tidak melihat cacat ada padanya; yang memastikan semua kebenaran untuk dirinya sendiri. Itulah orang-orang dungu yang tidak ada jalan untuk mengobatinya."

Nabi Isa AS menyebut orang dungu itu sebagai al-ahmaq. Kedunguan yang bukan sembarang kedunguan, melainkan kedunguan kuadrat atau dalam istilah sufi disebut jahil murakkab (bodoh kuadrat).

Dalam tasawuf dipaparkan ada empat macam jenis umat manusia. Pertama, orang yang tidak tahu dan tahu bahwa ia tidak tahu. Inilah orang bodoh yang sederhana. Orang seperti ini mudah disembuhkan, terutama lewat pendidikan.

Kedua, orang yang tahu, tetapi ia tidak tahu bahwa ia tahu. Orang seperti ini layaknya orang yang tertidur. Dia harus dibangunkan dari tidurnya supaya sadar akan kemampuannya sehingga dapat memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain.

Ketiga, adalah orang yang tahu dan ia tahu bahwa ia tahu. Inilah golongan orang-orang arif. Mereka inilah orang yang perlu diikuti ajaran maupun cara hidupnya dan menjadi teladan umat manusia.

Sementara, yang keempat adalah orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Inilah golongan yang benar-benar orang-orang dungu. Menurut Nabi Isa AS tersebut di atas, seseorang sulit disembuhkan kebodohan-

nya selama ia belum menyadari ketidaktahuannya.

Orang ini menderita jahil yang disebut dengan jahil murakkab. Pangkal kebodohannya adalah ketidaktahuan pada dirinya sendiri ditambah dengan sifat ujub, yakni sifat merasa dirinya selalu benar, tidak pernah salah.

Kebodohan semacam ini bukanlah ciri orang yang beriman karena orang yang beriman adalah orang yang selalu berusaha untuk menyingkap tabir ketidaktahuan dirinya. Karena, iman yang benar menghasilkan sikap tahu diri yang benar. Dan, tahu diri adalah pangkal kearifan.

Oleh karena itu, untuk menyongsong bulan Ramadhan tahun ini, kita tekankan pengenalan diri kita dengan cara muhasabah-dengan cara introspeksi, yakni seperti yang dikatakan dalam ungkapan sufi: *man 'arafa nafsahu faqad 'arafa Allah* (siapa mengenal dirinya sendiri, maka ia mengenal Tuhannya). Nabi Muhammad SAW sendiri juga pernah bersabda: "Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min darbihi" (barang siapa menjalankan puasa-penuh dengan keimanan dan melaksanakan perhitungan diri-melaksanakan muhasabah, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu).

Ihtisaban-perhitungan terhadap diri sendiri-adalah hal yang sangat dianjurkan dalam ibadah puasa. Inilah momentum yang sangat baik bagi kita untuk introspeksi terhadap hidup kita selama ini. Terhadap apa saja yang sudah kita lakukan, terhadap apa saja yang belum kita lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang telah kita perbuat, sehingga introspeksi ini juga menyangkut pertaubatan atas kesalahan atau dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dengan demikian, ihtisaban-perhitungan diri memang tidak lepas dari pertaubatan.

Manusia melakukan dosa karena ia tidak tahan untuk menderita sementara. Padahal, ada kebahagiaan besar di kemudian hari jika ia sanggup menunda kepuasan sementara. Dosa memang menjadi bagian kehidupan manusia karena manusia memang lemah, seperti dikatakan hikmah dalam bahasa latin, *Erare Humanum est* (manusia adalah pembuat kesalahan).

Karena itu, definisi dosa adalah sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tetapi dalam jangka

panjang membawa kesengsaraan. Dosa disebut juga mungkar, yang artinya sesuatu yang diingkari atau ditolak oleh hati nurani. Kita tahu hati nurani adalah *locus* kesadaran manusia, kesucian, fitrahnya. Karena itu, ia disimbolkan dengan cahaya.

Hati yang bersih menjadi sumber cahaya kehidupan kita yang membawa kebaikan dan kebenaran. Namun, karena kelemahan manusia itu, manusia dapat terjatuh ke dalam kegelapan dosa. Di sini hati nurani melakukan *vis-a-vis* dengan hati yang gelap.

Hati nurani menjadi sumber kebajikan manusia, sedangkan hati yang gelap menjadi sumber dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Kebajikan adalah budi pekerti luhur, dan dosa adalah sesuatu yang terbetik dalam dadamu dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya".

Oleh karena itu, jika tahu diri adalah pangkal kearifan, ini berarti dari waktu ke waktu manusia memang selalu perlu melakukan penyucian dirinya, menyucikan hatinya, supaya hati itu menjadi nurani-bersifat cahaya kembali. Di saat bulan inilah, di samping bertaujuan mencapai ketakwaan, puasa Ramadhan juga dapat mempertajam kepekaan hati nurani yang mengajak pada kebenaran dan kebaikan.

Oleh karena itu, pada bulan Ramadhan tahun ini, marilah kita benar-benar melakukan penghitungan diri, melakukan ihtisaban, sehingga kita dapat mendapatkan rahmah, maghfirah, dan berkah yang ada dalam bulan Ramadhan tahun ini. Dengan begitu, ritualitas kita selama bulan Ramadhan ini tidak sekadar sebagaimana "pemeranan" dalam sebuah permainan teater-yang sudah tidak memainkan peran, baik ketika tidak manggung lagi.

Namun, nilai-nilai hasil penghitungan diri selama Ramadhan ini dapat mencambuk untuk berbuat lebih baik, lebih bermanfaat kepada yang lain, sehingga jauh dari perilaku zalim, baik pada diri sendiri, sesama, maupun zalim pada lingkungan sosial kita.

Dengan demikian, kiranya hasanah fiddunya wal akhirah akan mudah diraih, yang mana dalam konteks kenegeraan konsep *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur* akan mudah tergapai. Mari kita songsong bulan Ramadhan 1434 H tahun ini dengan muhasabah. ■

2

Kemiskinan dan Perempuan

■ RAZALI RITONGA

Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI

Pemerintah berharap bahwa dikucurkannya dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta rumah tangga miskin dapat meredam kenaikan angka kemiskinan akibat dinaikkannya harga BBM. Sebab, tanpa kompensasi, angka kemiskinan diperkirakan akan menjadi 11-12 persen yang berarti melampaui perkiraan penurunan angka kemiskinan dalam APBN 2013, yaitu menjadi sebesar 10,5 persen.

Namun, pemberian BLSM tergolong singkat, selama empat bulan, sehingga diperkirakan belum cukup waktu bagi penduduk miskin untuk melakukan persiapan guna meningkatkan kemampuan ekonominya, terutama ketika BLSM dihentikan. Hal ini sangat krusial karena tanpa adanya upaya meningkatkan pendapatan itu maka ketika BLSM dihentikan, dikhawatirkan akan kembali berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

Pemberdayaan perempuan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin adalah dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini perlu dilakukan mengingat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan TPak laki-laki. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2012, misalnya, mencatat TPak perempuan sebesar 51,4 persen sedangkan TPak laki-laki sebesar 84,4 persen.

Selain tingkat partisipasi yang lebih rendah, perempuan juga rentan miskin. Dalam skala global, dari 1,3 miliar penduduk miskin, 70 persen di antaranya merupakan perempuan. Tragisnya, meski mereka bekerja, pendapatan yang

diterima tidak mencapai 10 persen dari pendapatan global. Ini terjadi karena perempuan umumnya bekerja sebagai pekerja domestik yang tidak mendapat upah atau bekerja tapi mendapat upah lebih rendah dibandingkan laki-laki (*The Guardian*, 2013).

Namun, disadari tidak mudah memberdayakan perempuan untuk bekerja dan berusaha dalam kegiatan ekonomi. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kekuatan (*power*) perempuan. Dalam konteks ini, Batliwala (1993) menjelaskan bahwa kurangnya *power* perempuan itu, antara lain, diakibatkan dua aspek, yakni terbatasnya kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi dan minimnya kontrol terhadap ideologi.

Adapun terbatasnya kontrol perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi, antara lain, karena faktor rendahnya kapabilitas dan kemandirian perempuan. Sementara, minimnya kontrol perempuan terhadap ideologi terutama diakibatkan oleh kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku yang kerap memosisikan perempuan sebagai insan yang lemah (Batliwala, 1993).

Maka, atas dasar itu, perlu komitmen semua pihak untuk menghapus segala rintangan yang dihadapi perempuan agar mereka memiliki *power* yang memadai untuk bekerja dan berusaha dalam kegiatan ekonomi. Diyakini, hal itu bisa dilakukan jika ada upaya sedikitnya dalam dua hal. Pertama, adanya kesadaran semua pihak bahwa perempuan juga mampu melakukan hampir semua kegiatan ekonomi sehingga mereka dapat memiliki peran dan posisi yang setara dengan laki-laki.

Kedua, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung perempuan bekerja dan berusaha secara

kolektif sehingga mereka memiliki hak suara yang lebih besar.

Patut diketahui, di sejumlah negara, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dilakukan dengan upaya khusus. Di Ethiopia, misalnya, dilakukan pelatihan bagi para calon anggota parlemen guna meningkatkan peluang mereka terpilih dalam pemilihan umum (pemilu). Ternyata, upaya itu cukup berhasil.

Pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan kapabilitas mereka barang kali juga perlu dilakukan di Tanah Air. Hal ini mengingat tingkat pendidikan perempuan di Tanah Air masih cukup rendah dibandingkan, misalnya, dengan sejumlah negara ASEAN.

Berdasarkan besarnya persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal sembilan tahun terlihat bahwa untuk Indonesia capaiannya hanya sebesar 24,2 persen. Sedangkan, untuk Filipina sebesar 65,9 persen, Malaysia 66 persen, Singapura 57,3 persen, dan Thailand 25,6 persen (UNDP, 2011).

Namun, meningkatnya kapabilitas perempuan belum sepenuhnya menjamin bahwa *power* perempuan dalam kegiatan ekonomi akan serta-merta meningkat. Untuk meningkatkan *power*, mereka maká pada saat bersamaan perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki iklim berusaha, seperti mekanisme penyaluran kredit dan izin usaha.

Khusus aspek penghargaan terhadap pekerja perempuan tampaknya perlu segera diwujudkan. Hal ini mengingat rendahnya upah pekerja perempuan dibandingkan upah pekerja laki-laki. Hasil Sakernas Agustus 2010, misalnya, menunjukkan bahwa upah pekerja laki-laki rata-rata sebesar Rp 952.341 per bulan. Sedangkan, rata-rata upah pekerja perempuan hanya sebesar Rp 695.550 per bulan (ILO Indonesia, 2012). ■

Problem Revolusi Mesir

NURFARID

Direktur Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Asy Syathibi Center, Kairo, Mesir

Kudeta militer Mesir (2/7) terhadap presiden terpilih, Muhammad Mursi, berlangsung begitu dramatis. Ia tidak terjadi karena kekecewaan rakyat Mesir terhadap kinerja Mursi, tidak juga karena Ikhwanul Muslimin dan koalisinya dari kelompok Islamis terlalu bernafsu mewujudkan obsesinya dan cenderung memaksakan kehendak dalam waktu singkat—sebagaimana yang dipaparkan oleh Hery Sucipto pada rubrik Opini *Republika* (5/7).

Ini karena Mursi dan pendukungnya tidak punya masalah dalam kinerja ataupun hubungan politiknya dengan pihak oposan. Hatta, dalam masalah amendemen undang-undang yang sempat ricuh, Amru Musa dan Hamdi Sobahi yang mewakili kelompok sekuler menyatakan setuju hingga palu sidang diketuk.

Hanya, Musa mencabut kembali pernyataannya setelah ia pulang dari Rammallah. Maka, kudeta itu murni terjadi akibat ketidakpuasan pihak oposan dan kekhawatiran negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan.

Pascakudeta militer (2/7), roda revolusi Mesir yang telah melaju selama dua tahun ini diprediksikan akan mundur kembali, bahkan ia terseret ke jurang yang telah menyeret revolusi dunia Islam pada revolusi kemerdekaan di tahun 40-an. Roda revolusi itu akan berubah menjadi kincir air yang berbalik arah dan menyedot kembali air keruh yang telah dimuntahkannya. Maka, realitas pascarevolusi tidak akan jauh berbeda dengan realitas prarevolusi.

Sistematika revolusi

Keberhasilan dan kegagalan suatu revolusi sangat ditentukan oleh kemampuan kaum revolusionis menjaga setiap cita-cita dan capaian-capaian revolusi, dan hal itu tunduk pada hukum tertentu yg disebut dengan hukum revolusi. J Revel, seorang filosof ternama asal Prancis, meletakkan kaidah bahwa suatu revolusi tidak boleh berjalan dengan cepat atau tergesa-gesa, namun ia harus berjalan di atas landasan atau konsep dan rancangan/strategi yang jelas dan matang.

Malik ben Nabi dalam kitabnya, *Between Guidance and Going Astray*, juga menulis bahwa revolusi itu tidak dilakukan secara terburu-buru, karena ia adalah sistematika/keteraturan yang sangat panjang, mencakup fase prarevolusi, fase revolusi, dan fase pascarevolusi. Ketiga fase tersebut tidak berlalu hanya sebatas bagian dari waktu, namun setiap fase menampilkan dinamika historis yang berkembang secara terus menerus. Dan, apabila dalam perkembangannya itu terjadi ketimpangan, maka cita-cita revolusi tidak akan pernah tercapai.

Sejarah telah menjadi saksi nyata bagaimana nasib Revolusi Prancis ketika

melewati tiga fase itu. Gerakan dan pemikiran Jean-Jacques Rousseau pada fase prarevolusi merupakan embrio dari Revolusi Prancis di tahun 1789 M. Akan tetapi, masa transisi dari fase revolusi ke pascarevolusi yang dikuasai oleh Danton dan Mirabeau mengalami banyak ketimpangan, hingga berakhirilah revolusi dengan kegagalan setelah tampak kekuasaan dipegang oleh Napoleon dengan imperiumnya.

Namun, revolusi Bolshevik 1917 memberikan pelajaran lain: Ia berjalan dengan membawa konsep dan rancangan yang jelas, kita akan melihat bagaimana filsafat marxis mampu mewarnai tiga fase revolusi itu.

Dan jauh sebelumnya, revolusi Islam dalam menumbangkan Jahiliyah juga memberi banyak pelajaran. Revolusi yang dipimpin oleh Rasulullah SAW memberikan pengalaman yang sama,

“Apabila dalam perkembangannya terjadi ketimpangan, cita-cita revolusi tak akan tercapai.”

betapa idiologi Islam mampu mewarnai tiga fase itu, bahkan pengaruhnya mengakar dalam setiap sisi kehidupan, hingga mengubah nama-nama pemeluknya walaupun bukan bangsa Arab.

Problematika revolusi Mesir sudah terlihat sejak fase prarevolusi. Revolusi ini lahir tidak berlandaskan pada ideologi yang jelas, namun—sebagaimana ditulis oleh kolumnis Mesir Fahmi Huwaidi (Syuruk 4/7)—lebih karena kemarahan dan ketidakpuasan kaum revolusionis terhadap rezim otoriter Mubarak. Maka, ketika revolusi meletus, kaum revolusionis terpecah kepada prarevolusi, yang terdiri dari sayap Islamis, dan kotrarevolusi, yang terdiri dari sayap liberalis. Dan kita menyaksikan bagaimana sengitnya konfrontasi antara kedua sayap ini sepanjang masa transisi dari revolusi ke pascarevolusi.

Pada awalnya, Mursi mampu melewati masa transisi ini sesuai dengan rambu-rambu revolusi. Bahkan, manuver politiknya didukung kuat oleh sayap Islamis dan mayoritas masyarakat Mesir. Namun, yang luput dari Mursi dan sayap Islamis di belakangnya adalah mereka berjalan melewati masa transisi itu tanpa membawa radar (baca: lembaga) yang mampu menangkap setiap kesalahan langkah dan merekam jejak konspirasi yang dijalankan oleh pihak oposan.

Oleh karena itu, tidak heran apabila pihak oposan yang minoritas—namun berselingkuh dengan militer secara *underground*—mampu menggalang kekuatan pada Ahad (30/6) untuk melakukan kontra revolusi. Mereka bahkan

mengaborsi revolusi yang sudah berumur dua tahun ini.

Menyikapi kudeta militer

Gerakan kontrarevolusi yang telah berhasil menggulingkan kaum pro revolusionis itu lahir dari konfrontasi dunia ide yang ditanggung oleh pemilik kepentingan di kawasan, terutama Amerika dan Israel. Kalau gerakan mereka dibiarkan, akan menjadi—meminjam istilah Bin Nabi—*ereus induites*, rahim yang akan melahirkan kesalahan demi kesalahan (*alakhtho almuwalladah*). Sebab, hukum alam mengajarkan kita bahwa mengobati kesalahan dengan kesalahan hanya akan menimbulkan kesalahan-kesalahan.

Lebih dari itu, bagi kelompok Islamis, seandainya kelompok sekuler dan sisa-sisa rezim Mubarak berhasil menunggangi roda revolusi, maka mereka (kelompok Islamis) akan tergilas dan tertindas sebagaimana hidup dalam realitas prarevolusi. Indikasinya sudah tercium beberapa menit setelah kudeta diumumkan, di mana Katatni (Ketua Umum Partai Kebebasan dan Keadilan), Muh Athif (pemilik *Chenel Al Hafidz*), dan beberapa petinggi IM ditangkap. *Chenel Misri 25, Al Hafidz*, dan *Al Zazera Live Misr* seketika itu diputus, begitu juga media cetak yang mendukung Mursi, khususnya harian *Hurriyah wal Adalah*, dibredel.

Oleh karena itu, pascakudeta militer, kaum Islamis terpecah dan melangkah menuju dua arah. Pertama, arah kudeta terhadap kudeta militer, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok al Kaidah dan Salafi Jihadi di Provinsi Matruh dan Sinai. Bahkan, pada 5 Juli lalu, kedua provinsi yang dikuasai sayap Islam garis keras itu akan mendeklarasikan kemerdekaannya jika ultimatum mereka kepada militer agar mencabut kembali kudetanya tidak digubris.

Kedua, arah demonstrasi yang dituju oleh Ikhwanul Muslimin dan Salafi Moderat. Sambil membawa kain kafan, mereka tetap bertahan di Rabi'atul Adawiyah menariakan tuntutan mereka menentang kudeta militer.

Kalau kita mempelajari sejarah revolusi dan kudeta militer, maka kita harus meyakinkan kaum Islamis yang terzalimi bahwa kudeta militer bukanlah akhir dari pentas mereka di panggung politik. Kudeta militer terhadap Erbakan di Turki, 1997, dan Chavez di Venezuela, 2002, memberikan pelajaran penting kepada kaum revolusionis Mesir bagaimana harus bersikap.

Erbakan mampu meyakinkan Erdogan dan kelompok Islamis menempuh jalur konstitusional dengan mengikuti Pemilu 2002 yang berakhir dengan kemenangan. Chavez juga mampu kembali ke kursi kekuasaan dengan dukungan yang kuat dari masyarakat. Dengan cara seperti ini, maka perang antarsaudara pun bisa dihindari. Semoga Allah menjaga Mesir dan penduduknya! ■

Langkah untuk Masa Depan

■ MR WU HONGBO

Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa

Setahun yang lalu, para pemimpin dunia bertemu di Rio de Janeiro bersama-sama dengan 50 ribu individu yang peduli dari kelompok utama masyarakat, termasuk para pebisnis dan akademisi. Para pemimpin, melalui hasil yang dinamakan "Masa Depan yang Kita Inginkan", menyetujui untuk meneruskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan masa depan dunia yang berkesinambungan.

Konferensi Rio+20 adalah sebuah tonggak jalan panjang untuk pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini mempererat dukungan untuk kesepakatan yang dicapai pada KTT Bumi 1992 dan memperbarui komitmen para pemimpin untuk menempatkan negara mereka di jalan menuju peningkatan kehidupan masyarakat sambil menjaga planet ini.

Hal ini adalah saat yang bijaksana dari kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan nasional dan tantangan global. Pemimpin-pemimpin dunia waktu itu bersepakat untuk membangun sebuah target baru tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, membangun atas prestasi Millenium Development Goals (MDGs) yang PBB luncurkan 13 tahun yang lalu, dan telah begitu berperan dalam memerangi kemiskinan.

MDGs telah menjadi sebuah kekuatan besar untuk membangkitkan upaya-upaya mulai dari tingkat global sampai ke tingkat lokal dalam mengurangi kemiskinan, menyediakan kesehatan dasar dan pendidikan, dan meningkatkan kesetaraan gender. Namun, ada potensi besar untuk berbuat lebih banyak pada sisa waktu sebelum kita mencapai batas waktu 2015. Dan, bahkan jika mencapai semua target MDGs, kita tahu masih ada jauh lebih banyak yang harus dilakukan dalam rangka memberantas kemiskinan ekstrem dan menghadapi perub-

bahan iklim serta ancaman lingkungan lainnya yang tumbuh.

Di Rio tahun yang lalu, pemerintah mengakui bahwa tujuan masa depan di era pasca-2015 harus sama dengan tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini dan dalam dekade mendatang. Mereka mengakui bahwa jika kita ingin memberantas kemiskinan terus-menerus dan menjamin kemajuan sosial.

Kita harus membangun ekonomi baru yang meyakinkan, yang dapat membawa orang keluar dari kemiskinan, menahan guncangan, dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang muncul. Tanpa tindakan sekarang, perubahan iklim dan ancaman lingkungan lainnya berpotensi menurunkan kemajuan sosial juga ekonomi bagi generasi mendatang.

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang ini sedang berunding terkait dengan tujuan-tujuan yang dapat mendorong agenda baru pembangunan berkelanjutan dan akan mengajukan sebuah usulan kepada Majelis Umum pada 2014. Gejolak ide sedang terjadi di kalangan akademisi, kelompok besar masyarakat, dan pemerintah, dengan usulan terbaru dari laporan tingkat tinggi, termasuk dari panel sekretaris jenderal tentang orang-orang terkemuka dan jaringan solusi pembangunan berkelanjutan serta saran dari ribuan orang. Diharapkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan yang transformatif, universal, dan adil, dengan pembangunan berkelanjutan akan ditetapkan.

Tujuan baru akan memandu semua negara di jalur pembangunan yang lebih berkelanjutan. Itulah mengapa pada Rio+20 disepakati bahwa tujuan-tujuan tersebut harus bersifat universal dan berlaku untuk semua negara. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial selagi melindungi lingkungan, melainkan juga tentang kerja sama untuk bertanggung

jawab mengelola sistem pendukung kehidupan bumi dan ekosistem.

Ini adalah usaha kolektif yang mengharuskan semua negara untuk bekerja sama mengamankan masa depan kita bersama. Hal ini juga memerlukan keterlibatan semua aktor, khususnya yang berada dalam bidang bisnis dan industri serta kelompok besar masyarakat lainnya guna mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi yang akan dibutuhkan.

Komitmen dan kemitraan sukarela sebanyak 1.382 sudah terdaftar saat dan setelah Rio+20, yang bernilai lebih dari 600 miliar dolar AS, akan menjadi kunci untuk mewujudkan dunia yang lebih berkelanjutan. Memang, banyak negara memiliki keterampilan teknik. Dan, sudah banyak yang mulai merintis cara baru untuk mengatur ekonomi dengan energi yang lebih berkelanjutan.

Sejumlah negara juga menginvestasikan besar-besaran dalam teknologi energi terbarukan dan transportasi umum rendah karbon. Namun, mengingat skala transformasi ekonomi yang diperlukan, kita harus mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi yang lebih baik, bersih, dan terjangkau dalam skala yang jauh lebih besar. Mari kita wujudkan.

Diperlukan ide-ide terbaik di manapun mereka berada. Apabila warisan yang positif dari Rio+20 diwujudkan, komunitas internasional perlu mengumpulkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan pada 2015 yang ambisius dan menyetujui secara konkret tentang bagaimana kita bekerja bersama untuk mewujudkannya.

Masa depan yang sedang kita tuju adalah di mana kemiskinan merupakan sejarah dan di mana semua manusia dapat memperoleh pengembangan potensi mereka dan hidup bermartabat selagi memakai dan memproduksi dalam lingkup planet ini. Dunia seperti itu ada dalam jangkauan kita. Inilah masa depan yang kita inginkan. ■

5

6 OPINI

Tamarrud Vs Tajarrud

■ SAPTO WALUYO
Direktur Eksekutif CIR, Alumnus RSIS Singapura

Krisis politik di Mesir akhirnya memakan korban jiwa rakyat tak berdosa. Pengunjuk rasa damai pro-Presiden Muhammad Mursi ditembak saat shalat Subuh (8/7). Tragedi yang layak disebut pembantaian itu menewaskan 51 orang dan 432 luka-luka. Pada Jumat sebelumnya (5/7), demonstran prokonstitusi juga ditembak, 47 orang dikabarkan tewas di berbagai lokasi.

Krisis Mesir dipicu oleh gerakan Tamarrud (pembangkangan) yang dipelopori lima aktivis kiri beraliran sosialis-Nasseris. Pada 28 April 2013, mereka canangkan pembangkangan sipil karena menurut salah satu pendirinya sekaligus jubi, Mahmoud Badr, pemerintahan Mursi telah gagal memenuhi tuntutan Revolusi 25 Januari 2011.

Pendukung awal Tamarrud adalah anggota Egyptians Movement for Change yang lebih dikenal dengan slogan "Ke-faya" (cukup sudah). Mereka menentang rezim Husni Mubarak pada 2004-2005 dan kini bereinkarnasi menjadi gerakan populis berkolaborasi dengan elite loyalis Mubarak.

Aktivis Tamarrud menyebarkan pamflet dan petisi antipemerintahan Mursi. Pada akhir Juni 2013, mereka mengklaim mengumpulkan 15 juta dukungan rakyat. Tapi, mendadak pada awal Juli, persis menjelang kudeta militer, klaim meroket 22 juta tanda tangan. Tak ada bukti konkret.

Uniknya, Tamarrud memberi ultimatum pada 2 Juli 2013 sebagai batas akhir Mursi untuk mundur jika tak memenuhi tuntutan. *Deadline* serupa diajukan militer sehingga ada yang menyebut Tamarrud hanya alat militer untuk membuat prakondisi *chaos*.

Ahmed al-Masri, salah seorang pendiri Tamarrud, menegaskan, "Rakyat sudah jenuh dengan Mursi." Jika benar demikian, mengapa mereka tidak bersiap menyambut pemilihan umum legislatif yang dijadwalkan pada 2014 atau pemilihan presiden 2016? Mursi, berdasarkan mandat pemilu 2012 dan konstitusi baru, telah membangun asas presidensialisme yang kuat dan supremasi sipil atas militer. Tamarrud memunculkan *setback* dengan sengaja mengundang militer untuk intervensi politik.

Sikap Tamarrud sungguh menyedihkan dan mencederai elan gerakan kiri/sosialis. Apabila aktivis Tamarrud membayangkan militer dapat diajak bergabung dalam gerakan revolusioner, seperti kisah Fidel Castro dan Che Guevara pada era 1950-an, mereka tersesat dalam romantisme buta.

Militer di Mesir dikenal salah satu korps paling mewah di Timur Tengah, mirip dengan militer Iran pada era Reza Syah. Kekayaan petinggi militer sangat kontras dibandingkan kesejahteraan prajurit, apalagi rakyat Mesir yang 40 persen terbelenggu kemiskinan. Program 100 hari Mursi mengubah alokasi APBN untuk pegawai rendah, prajurit polisi/tenara, dan petani di desa.

Pengaruh asing juga terdeteksi dalam aksi Tamarrud. Tragisnya, sebagian elite dari Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memberikan dukungan, seperti terlihat dalam logistik dan perlengkapan aksi lebih siap. Ada dugaan preman bayaran direkrut untuk melakukan provokasi dan perusakan sarana publik.

Mulanya, Tamarrud disokong terbatas kelompok kiri yang dalam pilpres, calon mereka, Hamdan Sabbahi, *keok* pada putaran pertama. Kemudian, dukungan melebar kaum liberal tergabung Front Penyelamat Nasional (NSF), pimpinan Mohammed el-Baradei. Aksi Tamarrud makin gencar setelah di-*endorse* Ahmad Syafiq (mantan PM) dan pentolan NDP antek Mubarak.

Partai An Nur yang didukung gerakan Salafi terbelah, ada yang pro-Mursi, ada yang mengamini tuntutan Tamarrud, namun tak mau ikut aksi. Sejatinya, ideologi Salafi memang tidak mengenal pemberontakan (*bughat*) terhadap pemerintah sah. Mereka hanya setuju rekonsiliasi nasional.

Kelompok minoritas Kristen Koptik dan elemen Syiah ikut terlibat karena alasan praktis menuntut keadilan atas korban kerusuhan sektarian di beberapa daerah. Mereka menuntut keadilan terhadap korban yang sebenarnya bukan tanggung jawab Mursi karena pihak kepolisian dan militer tak menjalankan perintah presiden untuk melindungi seluruh rakyat. Aparat keamanan tak mencegah kekerasan secara serius dan membongkar kaum perusuh bertopeng.

Untuk melawan manipulasi Tamar-

rud, tampil Tajarrud (totalitas/impar-sialitas), gerakan spontan menolak klaim gerakan kiri. Tak hanya melibatkan kubu Islamis, tetapi kalangan independen pun bergabung, sampai 20 Juni sudah mengumpulkan 11 juta dukungan konkret. Fakta di lapangan membuktikan demonstrasi Tajarrud selalu lebih besar dibandingkan Tamarrud.

Menurut BBC, unjuk rasa pro-Mursi di seluruh pelosok Mesir, kota, dan desa mencapai 30 juta orang. Sedangkan, anti-Mursi kebanyakan di kota besar. Misi utama Tajarrud sederhana, yakni kembalikan legalitas Presiden Mursi berdasarkan konstitusi yang sudah disetujui mayoritas rakyat (71 persen) dalam referendum.

Tuntutan lainnya: 1) Membatalkan kudeta inkonstitusional dan keputusan yang menyertainya (termasuk pengangkatan presiden sementara) karena hal itu merampas kedaulatan rakyat. 2) Menetapkan kembali konstitusi yang sudah disetujui mayoritas rakyat dalam referendum dan memulai dialog nasional untuk mencapai konsensus bagi amandemen konstitusi. 3) Meminta pertanggungjawaban aparat atas segala tindakan represif, termasuk pembantaian terhadap pengunjuk rasa, penangkapan tokoh politik, dan penutupan stasiun televisi publik.

Pihak militer menuding kelompok Tajarrud dipersenjatai. Itu omong kosong karena saat markas besar Ikhwanul Muslimin diserbu dan dirusak Tamarrud, tak ada yang bisa mengamankan. Malah aksi Tamarrud acap kali menimbulkan korban. Penampilan tim inti Tajarrud memang mengesankan banyak wartawan karena penuh disiplin mengatur massa aksi.

Tak terdengar ada pelecehan seksual dalam aksi Tajarrud, berbeda dengan demonstrasi Tamarrud yang mencatat 100 lebih perempuan dilecehkan. Aktivis Tajarrud terlihat gagah dengan celana komando, topi proyek, dan masker pelindung. Tapi, tak ada bom molotov, apalagi amunisi berbahaya. Bentrokan bersenjata terjadi di El Arish, perbatasan Sinai, yang selama ini rawan dan tak sepenuhnya dikontrol militer.

Masyarakat dunia kini menyaksikan kelompok mana yang benar-benar antikekerasan. Tapi, mereka tak takut bertaruh nyawa untuk mempertahankan keyakinan dan kedaulatan warga. ■

6

Komunikasi Minim Makna

■ NASRULLAH

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang

Imbauan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada stasiun televisi agar tidak menayangkan program humor yang berlebihan selama Ramadhan kembali dise-rukan. Bukan kali ini saja MUI dan kadang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyerukan hal serupa. Hampir tiap menjelang Ramadhan kekhawatiran terhadap tayangan televisi menyeruak.

Di era sistem media yang liberal seperti sekarang memang tidak mudah membuat imbauan-imbauan moral seperti ini. Media akan dengan sangat mudah membuat dalih bahwa kebebasan berkarya tidak bisa begitu saja dibatasi. Demikian pula menunggu pengaduan masyarakat terkait acara televisi yang tidak sehat juga tidak gampang.

Di sisi lain, jumlah kelompok masyarakat yang menjadi kekuatan *civil society* dan sanggup menjembatani kepentingan khalayak media juga tidak berkembang. Kelompok pemantau media ataupun simpul-simpul *media literacy* biasanya hanya di kota-kota besar, itupun hanya sedikit yang aktivitasnya terhitung produktif.

Pada posisi ini, berharap kebaikan hati pengelola dan pemilik media maupun tangan besi pemerintah hanya akan sia-sia belaka. Mereka tak bisa diharapkan, sebab mekanisme media liberal memang lebih banyak diserahkan kepada pasar. Media lebih banyak berorientasi bisnis walau tak dimungkiri masih ada misi-sosialnya.

Pemerintah sudah tidak boleh lagi terlalu ikut campur urusan media sebagaimana masa rezim Orde Baru dulu. Dus, meski reformasi media massa sudah berjalan lebih dari satu dekade, tampaknya kita masih berada di kondisi anomali. Akibatnya, setiap tahun kita harus berteriak keras-keras soal yang sama.

Barangkali inilah yang disebut sebagai alam *postmodernisme*. Masyarakat dibangun oleh perkembangan komunikasi

tanpa batas, melampaui alam komunikasi itu sendiri. Dalil *media is the message*-nya Marshal McLuhan pada era 60-an menemui relevansinya saat ini karena media sekarang menjadi pusat perhatian yang lebih penting ketimbang isinya.

Budaya masyarakat direproduksi oleh media massa melalui komunikasi berkecepatan tinggi dan masif. Mereka hanyut oleh media komunikasi, dalam hal ini program acara televisi, daripada isi komunikasi acara tersebut.

Lihatlah betapa banyaknya banalitas atau keremehtemahan program siaran televisi di Ramadhan ini. Kemudian ada kuis titipan sponsor. Untuk memudahkan hadiah sampai kepada si penanya, maka pertanyaannya pun tak perlu terlampau sulit, meski sebenarnya pertanyaan yang mudah namun berbobot juga banyak.

Dalam sinetron religi juga setali dua uang dengan tayangan komedi. Barangkali inilah yang disindir oleh MUI sebagai penggunaan simbol-simbol agama di mana para pemainnya menggunakan atribut jilbab, sarung, kopiah, peci haji, maupun sebutan ustaz atau kyai. Namun, dalam perilaku yang digambarkan justru tak masuk akal.

Tanpa disadari, sebenarnya banyak bahayanya membiarkan riuh rendahnya acara televisi seperti ini terjadi terus-menerus di negeri ini. Pertama, masyarakat akan sulit membedakan mana realitas sesungguhnya dan mana realitas semu. Sebab, repetisi dengan frekuensi yang tinggi dan kehadirannya ada di mana-mana menjadikan referensi perilaku kita semakin terbatas. Meski banyak stasiun televisi, tetapi sesungguhnya pilihannya amat terbatas.

Kedua, pengabaian terhadap nilai pada tayangan televisi menyebabkan persoalan nilai semakin terkikis sehingga masyarakat semakin permisif dan kurang peka. Media mendorong perilaku

instan, gampang, dan bersifat semata-mata untuk menyenangkan. Fungsi edukasi dan informasi media dikalahkan oleh fungsi hiburan. Bahkan, penderitaan orang lain pun bisa dikomodifikasi menjadi sebuah hiburan.

Ketiga, terjadi *excescence* atau gembungnya masyarakat akan informasi. Ini disebut sebagai masyarakat yang kegemakan (*excesmental society*), yakni masyarakat yang terlalu banyak tontonan, informasi, data, referensi, tetapi tak banyak yang bermakna. Komunikasi terjadi secara maksimum, tetapi miskin makna.

Bentuk dan nama program yang tersedia memang banyak dan bervariasi, tetapi sebenarnya lebih merupakan redundansi atau pengulangan saja. Isinya pun yang seolah-olah logis tetapi sebenarnya manipulatif bahkan merendahkan akal sehat. Hal ini bisa dilihat dari berbagai program sinetron kejar tayang. Sebagian sudah kehilangan logika tujuan, fungsi, dan makna membangun kehidupan.

Namun demikian, upaya MUI maupun KPI untuk selalu berteriak harus tetap memperoleh apresiasi. Terutama di setiap akhir Ramadhan, MUI dan KPI selain memberi peringatan acara yang layak ditegur juga memberi *reward* bagi tayangan yang positif, sehat, dan membangun kehidupan.

Teriakkan itu harus disertai upaya mendidik masyarakat secara terus-menerus agar masyarakat kita lebih melek media. Kita bisa mendorongnya melalui aksi-aksi nyata, seperti mengatur pola menonton di kalangan keluarga hingga melakukan aksi boikot untuk tidak mengonsumsi produk yang diiklankan pada acara yang tidak sehat.

Hidup-matinya program televisi ada di tangan kita, jadi kitalah yang harus mengendalikannya. Mari berpuasa media dengan cara selektif mengonsumsi isi media, meminimalkan komunikasi yang tak bermakna. ■

6 OPINI

Miras Pascaputusan MA

■ NORMA SARI

Ketum PP Nasiyatul Aisyiyah, Dosen FH Universitas Ahmad Dahlan

Menjelang Ramadhan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) mengeluarkan Putusan No 42 P/HUM/2013 yang membatalkan Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Putusan tersebut dinilai positif agar lahir ketentuan yang lebih komprehensif setingkat undang-undang, sekaligus menjawab disharmonisasi keppres dengan perda tentang miras.

Pihak kepolisian selama ini telah melakukan razia terhadap tempat-tempat usaha yang memperdagangkan secara ilegal agar masyarakat sejauh mungkin terhindar dari efek negatif. Beberapa ormas keagamaan, di luar otoritasnya, juga melakukan razia peredaran miras, sebuah aksi sosial yang sering kontraproduktif dengan penegakan hukum secara umum. Selama ini pengaturan miras dituangkan dalam Keppres No 3 Tahun 1997, beberapa peraturan menteri kesehatan, menteri perdagangan dan perindustrian, serta peraturan daerah, misalnya di Luwu Timur, Bantul, dan Kota Bekasi. Keppres No 3/1997 mengelompokkan minuman beralkohol dalam 3 golongan sesuai kadar alkoholnya.

Beberapa peraturan mengenai miras yang tersebar menimbulkan problem dalam implementasi, terutama harmonisasi dan penegakan hukum. MA selama ini telah membatalkan beberapa pasal dalam peraturan daerah yang bertentangan dengan Keppres 3/1997, misalnya terhadap Perda Kabupaten Kuningan, Kota Jambi, dan Kabupaten Subang.

Problem harmonisasi pada intinya seputar pemerintah daerah yang memperketat aturan, misalnya, jika dalam keppres, larangan untuk mengedarkan dan menjual kepada mereka yang belum berusia 25 tahun, dalam perda diatur 21 tahun. Ada juga perda yang mengatur bahwa kelompok yang produksi, peredaran, dan penjualannya dikategorikan dalam pengawasan adalah semua golongan, yakni A, C, dan D, tidak berdasarkan persentase kadar alkohol.

Problem penegakan hukum lebih banyak kepada penerapan sanksi yang kurang memadai sehingga banyak penyalahgunaan, produksi, peredaran, dan konsumsi. Kekuatan aparat, kemampuan jangkauan wilayah operasi

sering membuat masyarakat gerah dengan kondisi tersebut. Efek dari penyalahgunaan miras semakin dirasakan sementara hukum tidak berwujud mampu menjadi senjata ampuh untuk mencegah maupun memperbaiki keadaan.

Pembatalan Keppres No 3 Tahun 1997 berakibat pada level nasional. Peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai miras saat ini mengalami kekosongan. Adapun peraturan yang terkait dengan minuman beralkohol di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang pada pasal 537, pasal 538, dan pasal 539.

Penjelasan pasal 300 menyebutkan tanda-tandanya orang yang telah mabuk adalah dari mulutnya keluar napas yang berbau alkohol (minuman keras). Gangguan yang diakibatkan oleh orang yang mabuk diatur dalam Pasal 492 KUHP. Akibat di level lokal adalah, bagi daerah yang memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai miras, maka mereka dapat memberlakukan perda tersebut sebagai sumber hukum.

Sedang terhadap daerah yang perdanya dibatalkan oleh putusan MA dengan mendasarkan pada Keppres 3/1997, maka, sejak pembatalan keppres, perda yang dibatalkan dapat berlaku kembali. Kondisi kekosongan ini sebenarnya yang paling tepat diisi dengan undang-undang, tetapi prosesnya tidak sederhana.

Alternatif pilihannya adalah, pertama, untuk sementara membuat peraturan presiden. Alasannya adalah (1) keppres tidak lagi diatur dalam hierarki sesuai Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (2) sifatnya mengatur; (3) proses pembuatannya lebih sederhana dan mudah; (4) sifatnya nasional sehingga secara simultan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam skala lebih besar; dan (5) daerah-daerah yang belum memiliki perda miras akan dapat berpayung hukum perpres.

Kedua, bagi daerah yang belum memiliki perda miras, segera menyusun perda. Kelebihan adalah akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakter daerah masing-masing dalam mengendalikan miras. Karena, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tidak terlepas dari tugas untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerahnya.

Saat ini banyak daerah yang belum memiliki peraturan tentang miras. Antisipasi lainnya dalam ketiadaan kaidah hukum maka adalah gerakan moral masyarakat menjadi pengendali tata kehidupan bermasyarakat. Gerakan moral ini dalam kerangka yang benar, menghindari jangan sampai menggunakan aksi-aksi kekerasan.

Kebutuhan miras diatur secara lebih komprehensif dalam produk undang-undang saat ini semakin mendesak. Perlukah miras dilarang atau dikendalikan? Pelarangan lebih diterima bagi mereka yang berpendapat miras merupakan ancaman kehidupan. Larangan secara hukum bermakna mengikat untuk dipatuhi dan jika dilanggar dikenakan sanksi.

Namun, melarang sama sekali akan menimbulkan persoalan tersendiri yakni semakin sukar mengawasi dan mengendalikan peredaran gelap miras. Pengendalian juga tidaklah cukup, mempertimbangkan berdasar kebutuhan saat ini harus ditingkatkan menjadi pengendalian ketat. Artinya, melakukan pembatasan ketat terhadap produksi, peredaran, penjualan, dan konsumsi.

Kalaupun ada tempat yang menjual miras, dipastikan sangat terbatas dengan izin. Selain itu, sanksi yang tegas dan dapat diimplementasikan menjadi konsekuensi logis dari kebutuhan pengendalian. Tugas pemerintah sebagai aparat penegak hukum menjadi berat, namun sebanding dengan besarnya ancaman kerusakan akibat miras yang menyangkut keselamatan, terutama generasi muda bangsa dan negara.

Menganalisis permohonan PK ke MA atas Keppres 3/1997, para pemohon mendalilkan dirugikan kepentingan ekonomis. Bagaimana jika dikaitkan dengan kepentingan menyelamatkan generasi muda? Karena dalam kenyataannya, miras disalahgunakan oleh orang yang belum berusia 25 tahun, belum 21, bahkan oleh anak-anak (berusia di bawah 18 tahun).

Sebenarnya saat ini, menjelang tahun 2014 yang dikapitalisasikan secara politik sebagai tahun perebutan kekuasaan, adalah momentum yang sangat tepat bagi para wakil rakyat secara politis menunjukkan kepedulian untuk menyegerakan Undang-Undang Miras, sekaligus secara substantif menjawab persoalan. Kita tunggu sambil terus menyuarakan dan mengupayakan dapat diwujudkan. ■



Menyambut Kurikulum 2013

■ RAKHMAT HIDAYAT

Dosen Jurusan Sosiologi UNJ, Kandidat PhD Bidang Sosiologi Pendidikan Universite Lumiere Lyon 2, Prancis

Kurikulum 2013 akan resmi dilaksanakan mulai 15 Juli 2013 bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran 2013/2014. Momen ini adalah fase penting dalam perjalanan pendidikan Indonesia. Dengan dimulainya pelaksanaan kurikulum baru ini, perdebatan panjang dan panas itu berakhir.

Sejak akhir 2012, ketika Kemendikbud merilis wacana perubahan kurikulum, publik banyak mempertanyakan dan mengkritik rencana tersebut. Setiap harinya resistensi, demonstrasi, dan polemik terjadi di media massa, ruang seminar, hingga media sosial. Namun, itu semua selesai setelah Komisi X DPR RI mengesahkan anggaran untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 sebesar Rp 829 miliar.

Pengesahan tersebut dilakukan pada 27 Mei 2013. Pascapengesahan ini, artinya Kemendikbud lolos dari serangan publik yang menolak perubahan kurikulum tersebut. Makna kedua, pendidikan Indonesia akan memiliki kurikulum baru dengan harapan baru yang dihasilkan dari dialektika publik. Meski tidak menjanjikan sesuatu yang signifikan dalam pendidikan Indonesia, faktanya di lapangan, jutaan murid Indonesia yang akan mulai sekolah pada tahun ajaran baru ini akan menikmati kurikulum baru hasil godakan Kemendikbud.

DPR RI sudah mengetok palu, tetapi kegamangan selalu muncul pada guru. Kegamangan guru dalam penerapan kurikulum baru dapat dilihat pada penerapan Kurikulum 2004 atau yang dikenal Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini hanya berlaku dua tahun seiring dengan pengesahan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

KBK digantikan dengan Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bisa dibayangkan

bagaimana kesulitan dan kegagapan para guru di lapangan dalam perubahan kurikulum tersebut. Pada awal pemberlakuan KTSP, guru mengalami kebingungan dalam penerapannya. Padahal, mereka sendiri baru bisa mempraktikkan Kurikulum 2004 dengan baik satu tahun pasca-Kurikulum 2004 diterapkan.

Kebingungan ini menunjukkan guru pada posisi yang lemah, tidak berdaya di hadapan kepentingan pemerintah. Posisi guru dalam relasi produksi kurikulum baru tersebut jika meminjam istilah Iwan Fals adalah "orang-orang kalah". Penyusunan kurikulum sejatinya dilakukan secara partisipatoris dengan menggendeng guru sejak awal.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum produk kepemimpinan Mendikbud M Nuh di era Presiden SBY. Kritik yang muncul sejak awal penyusunan kurikulum ini tidak melibatkan secara intensif suara dan kepentingan guru sebagai aktor utama di lapangan. Guru hanya menerima produk akhir yang sudah jadi dalam bentuk Kurikulum 2013.

Dalam proses ini, guru tidak memiliki suara dalam memberikan aspirasi dan masukan. Dalam pembelajaran di kelas, guru memiliki peran sangat penting. Guru tidak semestinya hanya menjadi robot kurikulum yang hanya menerima mentah-mentah produk akhir kurikulum tersebut.

Dalam konteks politik, kepemimpinan Mendikbud akan berakhir sejalan dengan periode Presiden SBY, 2014. Di bawah presiden baru, pasca-2014, mendikbud baru bisa saja kembali melakukan perubahan terhadap Kurikulum 2013 karena berbagai hal yang tidak sesuai dengan visi Mendikbud. Kita tidak tahu bagaimana masa depan Kurikulum 2013.

Masa depan

Pertanyaan mendasar yang harus dia-

jukan, mengapa dalam waktu singkat menjelang 2014, kurikulum harus diubah? Secanggih apa pun kurikulum tanpa disertai kemampuan guru dalam praktik di lapangan tidak menjamin kurikulum tersebut berjalan baik. Masalah utama yang harus diselesaikan adalah membangun profesionalisme guru sebagai prasyarat utama pelaksanaan kurikulum.

Guru yang berkualitas dengan model pengajaran yang kreatif dan inovatif lebih penting daripada sekadar utak-atik kurikulum yang instan. Selama ini harus diakui terjadi disparitas kualitas dan profesionalisme guru di Pulau Jawa dan luar Jawa. Jika konsisten, sejatinya Kemendikbud terus mendongkrak kualitas guru di luar Pulau Jawa.

Agenda ini lebih penting dalam melahirkan guru-guru berkualitas di luar Jawa. Inisiatif masyarakat dalam menyiapkan guru-guru muda untuk mengajar di pelosok daerah, seperti yang dilakukan Gerakan Indonesia Mengajar, merupakan terobosan penting dalam mengembangkan kualitas guru di daerah pelosok.

Pihak Kemendikbud belakangan melakukan program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). Program-program ini harusnya diperbanyak kuantitasnya dan menjadi program andalan Kemendikbud. Kita tidak tahu bagaimana masa depan Kurikulum 2013. Berapa lama Kurikulum 2013 akan bertahan dalam dunia pendidikan Indonesia.

Perubahan kurikulum maupun kekuasaan politik Indonesia tidak berpengaruh jika dilandasi kualitas dan profesionalisme guru yang mumpuni. Guru yang profesional akan lebih adaptif menyesuaikan perubahan kurikulum apa pun. Paradigma ini menjadi lebih signifikan dibandingkan sekadar perubahan kurikulum yang lebih mengedepankan selera pemerintah. ■



6 OPINI

Kurikulum Baru

■ SUKEMI

Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media

Suasana baru pada tahun pelajaran baru 2013 yang serentak dimulai Senin, 15 Juli ini, menjadi momentum menarik dan perlu dicatat dalam lembar sejarah pendidikan. Betapa tidak, para peserta didik di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, sedikitnya di 6.325 sekolah pada 295 kabupaten/kota di 33 provinsi, ditambah sekitar 1.488 sekolah mandiri, akan memulai pengimplementasian Kurikulum 2013.

Saya sedang membayangkan di sekolah-sekolah itu-terutama di kelas satu, empat, tujuh, dan 10-bukan hanya ditemukan baju seragam dan sepatu baru, tapi juga suasana berbeda, yakni gairah baru akan diterapkannya Kurikulum 2013. Memang muncul keraguan, apakah kurikulum baru itu benar-benar bisa diterapkan, sementara proses pelatihan guru di sekolah-sekolah sasaran baru berakhir dua hari lalu?

Kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya karena itu wajar jika muncul keraguan. Tulisan berikut ingin mengukuhkan kembali bahwa Kurikulum 2013-dengan segala kekurangan dan kelebihan-adalah momentum yang layak untuk dicatat dalam lembar sejarah pendidikan di negeri ini.

Guru jadi taruhan

Semua paham kurikulum dapat dimaknai sebagai kumpulan teks yang berisi keinginan, cita-cita, dan harapan terhadap materi dari proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan (kompetensi). Di dalam kurikulum itu terdapat sedikitnya empat komponen utama, yaitu standar kompetensi lulusan yang diharapkan, standar isi materi yang akan diajarkan, standar proses pembelajaran (metodologi), dan standar proses penilaian.

Dari empat komponen itu, guru menjadi taruhan terhadap keberhasilan implementasi kurikulum. Di sinilah pentingnya pembekalan dan pelatihan bagi guru. Melihat perjalanan pada kegiatan pelatihan instruktur nasional, guru inti, dan guru sasaran, kita boleh berharap banyak guru mampu mengimplementasikannya dengan baik.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan instruktur nasional, misalnya, menunjukkan bahwa nilai rerata yang

dicapai dari *pre test* ke *post test* mengalami kenaikan cukup signifikan, 20,60 persen. Kenaikan tertinggi ada pada materi rasionalitas kurikulum (44,64 persen), analisis materi ajar (11,05 persen), serta rancangan pembelajaran dan praktik (9,53 persen).

Optimisme ini perlu ditanamkan dan dijadikan virus sehingga stigma negatif yang berkembang selama ini terhadap guru bisa diperbaiki. Memang, pada dasarnya, guru kita bisa, mau, dan mampu untuk diajak berubah ke arah lebih baik.

Sejatinya, dalam lubuk hati terdalam, tidak ada guru yang tidak ingin peserta didiknya menjadi generasi lebih unggul dan lebih baik. Adigium lama mengatakan, guru yang sukses adalah guru yang bisa dikalahkan oleh muridnya.

Dari hasil tiga pelatihan berjenjang itu pulalah, ke depan, posisi guru yang jadi taruhan kesuksesan terhadap implementasi Kurikulum 2013 harus disiapkan sistem pelatihan yang lebih baik dan komprehensif. Termasuk, di dalamnya melakukan reorientasi terhadap lembaga penyiapan pengadaan guru, yaitu Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Ini penting karena Kurikulum 2013 telah disiapkan sedemikian rupa untuk mengantisipasi perubahan-perubahan terhadap kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.

Jenlink (1995) mengungkapkan bahwa masa depan akan berbeda secara dramatis dari masa sekarang dan itu sudah menuntut kita mempersiapkan untuk perubahan penting yang sedang terjadi pada kehidupan kita dengan kekuatan perubahan yang akan memerlukan kita mengalihkan pola pikir kita sekarang tentang dunia yang kita ketahui.

Pendidikan dan dalam hal ini kurikulum sebagai *the heart of education* (Klein, 1992) harus mempersiapkan generasi bangsa yang mampu hidup dan berperan aktif dalam kehidupan lokal, nasional, dan lokal yang mengalami perubahan dengan cepat tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Oliva (1982), kurikulum perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan politik. Di sinilah sesungguhnya desain Kuri-

kulum 2013.

Momentum perubahan

Merujuk Kurikulum 2013, sedikitnya ada tiga hal yang dapat dijadikan momentum perubahan sebagai efek domino dari implementasi Kurikulum 2013. Pertama, berkaitan dengan upaya pengendalian terhadap buku pelajaran.

Buku pegangan guru dan siswa pada Kurikulum 2013 disiapkan oleh pemerintah. Ini artinya, kualitas isi bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal harga, jika memang peserta didik harus membeli karena sekolah memilih untuk mengimplementasikannya secara mandiri, harga buku sudah bisa ditekan lebih wajar.

Dalam hal buku, ada yang menyatakan, Kurikulum 2013 telah memantapkan peran penerbit dan percetakan. Tentu pernyataan itu tidak 100 persen benar karena yang disiapkan pemerintah hanyalah buku wajib siswa dan guru. Buku pengayaan masih bisa diterbitkan oleh penerbit. Sedangkan, pengadaan percetakan buku yang disiapkan pemerintah diserahkan sepenuhnya kepada percetakan melalui sistem lelang terbuka.

Momentum kedua, Kurikulum 2013 dapat memperkuat budaya sekolah melalui pengintegrasian kurikulum, kokurikuler, ekstrakurikuler, serta penguatan peran guru bimbingan dan konseling (BK). Selama ini, kurikulum, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berjalan terpisah, padahal semestinya utuh dalam satu kesatuan.

Ketiga, masih terkait dengan hal kedua, memperkuat integrasi pengetahuan, bahasa, dan budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pilihan ekstrakurikuler Pramuka dan pengarusutamaan pelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013, termasuk di dalamnya pendidikan agama dan budi pekerti, adalah bagian tidak terpisahkan dalam kerangka pemahaman utuh terhadap NKRI sebagai sebuah keniscayaan.

Inilah hal-hal yang perlu dicatat dalam menandai datangnya tahun pelajaran baru dan implementasi kurikulum baru. Harapannya, memasuki tahun pelajaran dengan kurikulum baru bersamaan dengan pelaksanaan puasa Ramadhan 1434 H dapat menjadi semangat bagi guru dan peserta didik menjadi generasi yang lebih baik. ■

Refleksi Hari Kependudukan

■ SONNY HARRY B HARMADI

Kepala Lembaga Demografi FEUI, Ketua Umum Koalisi Kependudukan

Ditetapkan oleh PBB sejak 1989, Hari Kependudukan Sedunia (World Population Day) diperingati setiap 11 Juli. Sebuah momentum penting untuk menggugah kesadaran kita tentang dinamika kependudukan dan konsekuensinya terhadap pembangunan.

Dunia masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun, tapi relatif masih tinggi. Jumlah penduduk dunia pada 2013 diperkirakan mencapai 7,3 miliar, bertambah sekitar lima miliar dibanding 100 tahun lalu. Laju pertumbuhan penduduk dunia pada 2010 secara rata-rata mencapai 1,2 persen. Sedangkan, rata-rata laju pertumbuhan penduduk negara berkembang diperkirakan mencapai 1,4 persen. Di saat bersamaan, laju pertumbuhan Indonesia justru lebih tinggi (1,49 persen).

Salah satu penyebab pertambahan yang masih besar adalah penduduk dunia yang didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif. Terjadi suatu kondisi yang disebut *population momentum*. Besarnya jumlah penduduk muda di dunia menyebabkan angka kelahiran juga cenderung besar.

Setiap tahun, Badan Kependudukan Dunia UNFPA menetapkan tema yang secara spesifik didasarkan pada isu yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebagai contoh, pada 2011 UNFPA menetapkan tema "7 Billion Actions" karena pada tahun tersebut penduduk dunia diperkirakan tepat berjumlah tujuh miliar. Sedangkan, pada 2010 UNFPA mengambil tema "Be Counted: Say What You Need", mengingat sebagian besar negara di dunia pada 2010 sedang melaksanakan sensus penduduk.

Khusus 2013, UNFPA memilih tema "Adolescent Pregnancy" (kehamilan remaja). Sebuah tema yang cukup spesifik, mengingat isu kependudukan sering

kali lebih banyak membahas jumlah, pertumbuhan, struktur, persebaran, maupun migrasi penduduk. UNFPA menekankan pentingnya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan di dunia untuk mengatasi masalah perkawinan dan kehamilan di bawah usia 20 tahun (perkawinan dini).

Isu perkawinan dan kehamilan dini tidak mendapat banyak perhatian di Indonesia. Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan masih digunakan hingga saat ini. Padahal, dalam Pasal 7 Ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Tentunya, jika ditinjau dalam perspektif demografi dan kesehatan, usia 16 tahun bagi seorang perempuan bukanlah usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan.

Seorang perempuan yang berusia di bawah 20 tahun, organ reproduksinya masih berkembang dan belum sempurna, serta berisiko tinggi saat mengalami kehamilan. Ketika hamil dan organ reproduksinya masih berkembang, maka saat bersamaan di dalam rahimnya juga terjadi pertumbuhan janin. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan perempuan usia di bawah 20 tahun cenderung memiliki berat badan rendah.

Dalam UU No 3/2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Membicarakan perkawinan seorang anak dan hamil tentunya tidak sejalan

dengan definisi perlindungan anak itu sendiri. Artinya, kita belum mampu melindungi hak-haknya untuk dapat tumbuh berkembang secara optimal. Apalagi, kenyataan yang ada di Indonesia, berdasarkan data BPS 2010, sekitar 45 persen perempuan justru sudah/pernah kawin saat usia di bawah 19 tahun.

Perkawinan dini bisa juga didefinisikan jika dilakukan oleh anak yang belum *baligh* (pubertas). Tapi, definisi ini tentu perlu kita renungkan bersama untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat. Sesungguhnya, banyak faktor yang memengaruhi cepat lambatnya pubertas seorang anak. Misalnya, makanan yang banyak mengandung hormon akan mempercepat pubertas, sehingga tidak mengherankan saat ini banyak anak yang usianya baru 10 tahun, tapi sudah mengalami tanda-tanda pubertas. Pertanyaannya, apakah seorang anak yang sudah pubertas di usia 10 tahun secara fisik dan mental memang siap untuk menikah?

Dalam perdebatan tentang usia perkawinan, setiap pakar tentu memiliki argumennya sendiri. Tapi, kita harus memperhatikan berbagai argumen ilmiah berdasarkan kajian yang valid dan dapat dipercaya. Sudah saatnya pemerintah merevisi UU No 1/1974 dengan melibatkan para tokoh agama dan akademisi, khususnya terkait batasan usia perkawinan.

Banyak implikasi negatif yang dihasilkan dari perkawinan dini. Membicarakan UU No 1/1974 tidak direvisi sama artinya dengan menganggap bahwa perkawinan dini adalah hal yang wajar. Perlu ada sinkronisasi antara UU Perkawinan dan UU lainnya yang mengatur masalah anak. Tema Hari Kependudukan Sedunia 2013 hendaknya memberikan refleksi bagi kita untuk mereformulasi kebijakan guna mendukung pembangunan kualitas penduduk. ■

11

6 OPINI

Puasa, Utang, Kemiskinan

■ ROKHMINDAHURI

Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GANTI)

Memasuki Ramadhan tahun ini, kehidupan mayoritas rakyat Indonesia makin susah. Bulan Ramadhan yang penuh berkah dan ditunggu-tunggu kedatangannya, ternyata muncul bersamaan melambungnya harga kebutuhan pokok, barang-barang lain, dan biaya transportasi. Hal ini terjadi karena wacana kenaikan harga BBM sampai eksekusinya berlangsung berbulan-bulan sehingga pasar telah meresponsnya jauh sebelum kenaikan harga BBM itu sendiri.

Kenaikan harga kebutuhan hidup yang lebih dari 30 persen itu diantisipasi pemerintah dengan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang jumlahnya Rp 150.000 per orang selama empat bulan. Kita bisa membayangkan: cukupkah nilai BLSM untuk menutupi kenaikan harga kebutuhan pokok itu?

Persoalannya, sebandingkah BLSM dengan utang pemerintah sendiri untuk memenuhi kebutuhan gaji pegawai negeri (PNS), pembangunan infrastruktur (yang minim), dan belanja negara yang lain? Jawabannya: simak gambaran berikut.

Jumlah utang luar negeri Indonesia (pemerintah dan swasta) kini mencapai 243,18 miliar dolar AS atau Rp 2.371 triliun. Dari jumlah itu, Rp 2.023,72 triliun (85 persen) merupakan utang pemerintah. Jika mengacu pada APBN 2013, utang pemerintah menjadi Rp 2.160 triliun atau bertambah Rp 137 triliun. Komposisi utang pemerintah itu terdiri atas utang luar negeri, utang dalam negeri, dan surat berharga negara.

Kalau kita hitung berapa utang pemerintah itu dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia (247 juta jiwa), tiap kepala orang Indonesia sesungguhnya sudah punya utang sekitar Rp 8,7 miliar. Lalu, apa artinya BLSM yang hanya Rp 150 ribu selama empat bulan itu?

Dengan utang per kapita rakyat Indonesia Rp 8,7 miliar, kapan utang itu terselesaikan? Boro-boro akan selesai, bahkan bisa jadi tiap tahun akan bertambah. Indonesia sudah masuk negara yang terseret 'lumpur utang'. Makin berusaha melepaskan diri dari jebakan lumpur, maka makin dalam lumpur itu menenggelamkannya.

Patricia Adams mengistilahkan utang semacam ini sebagai odious debt atau utang najis. Mengapa utang itu menjadi najis? Ini terjadi, tulis Adams, karena utang luar negeri itu digunakan bukan untuk kepentingan negara, melainkan untuk memperkuat rezim berkuasa.

Dalam konteks Indonesia, bisa juga untuk 'menggelembungkan' birokrasi dan memberikan fasilitas berlebihan kepada para pejabat negara, elite politik, dan pengusaha kroni. Utang najis semacam ini seharusnya bukan menjadi beban negara dan rakyat, melainkan beban rezim bersangkutan.

Di samping utang najis, menurut Adams, besarnya utang negara juga bisa terjadi karena utang kriminal. Utang najis berbeda dengan utang kriminal, walaupun semua utang kriminal dapat dikategorikan sebagai utang najis. Namun sebaliknya, tidak semua utang najis adalah utang kriminal. Perbedaan utamanya adalah utang najis hanya berhubungan dengan utang luar negeri suatu negara, sedangkan utang kriminal dapat juga termasuk utang dalam negeri.

Dalam kaitan ini, Indonesia terjebak pada kedua jenis utang ini. Utang luar negeri kini telah menjadi utang najis karena dihambur-hamburkan untuk berbagai pembiayaan program-program pemerintah yang boros dan penuh penyelewengan. Sedangkan, utang kriminal bisa terlihat dari kasus dana rekapitulasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 1.400 triliun.

BLBI merupakan skema pinjaman yang diberikan Bank Indonesia pada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas ketika Indonesia diterpa krisis moneter tahun 1998. Skema tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dan IMF untuk mengatasi krisis. Indonesia saat itu menurut saja kepada IMF karena terkotori utang najis.

Selanjutnya, utang najis itu berubah menjadi utang kriminal yang jumlahnya amat sangat besar, yaitu Rp 1.400 triliun. Celakanya bank-bank yang mendapat bantuan likuiditas itu sebagian besar mengemplang atau merekayasa utang-utangnya sedemikian rupa sehingga seolah-olah lunas. Tragisnya, pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa

dalam menghadapi utang kriminal ini.

Akibat utang kriminal BLBI, setiap tahun pajak rakyat dipakai untuk mencilil utang BLBI sebesar Rp 60-Rp 80 triliun. Beban utang yang menyandera APBN itu menyebabkan negara kehilangan kemampuan untuk mendanai dan membiayai sektor publik untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Jika kini pemerintah mengklaim kemiskinan dan pengangguran makin berkurang, klaim tersebut jelas harus dipertanyakan. Sebab, klaim itu hanya berdasarkan statistik yang mudah direkayasa.

BLSM salah satu tujuan 'utang di balik batu'-nya adalah merekayasa statistik tersebut dalam rangka menampilkan postur palsu untuk memperlihatkan berkurangnya pengangguran dan kemiskinan. Padahal, apa arti uang Rp 150 ribu selama empat bulan untuk memperbaiki ekonomi rakyat dibandingkan beban utang tiap penduduk yang jumlahnya Rp 8,7 miliar itu?

Pertanyaannya: mengapa pemerintah mau berutang sedemikian besar untuk hal-hal yang tidak urgen? Jawabnya: keserakahan. Keserakahan telah menyebabkan manusia tidak mampu melihat dirinya sendiri. Akibatnya, manusia akan terjerat dan jatuh akibat keserakahannya. Keserakahan akan membunuh diri kita sendiri.

Untuk itulah, pemerintah harus mencoba bangun dan berdiri pada kaki sendiri. Indonesia mempunyai sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga menurut Bung Karno, Indonesia pantas untuk menjadi pemimpin dunia. Syaratnya, jangan terjebak pada utang, hindari pemborosan, dan keserakahan.

Dalam perspektif inilah, kita menghayati urgensi puasa. Puasa adalah sebuah pembelajaran manusia untuk menghindari keserakahan. Selama bulan Ramadhan, umat Islam dididik untuk belajar hidup sederhana, menahan nafsu, menahan lapar, dan menahan amarah untuk mencegah munculnya keserakahan dan perbuatan maksiat. Jika makna puasa Ramadhan ini bisa diinternalisasi kita semua, terutama para penguasa negeri, niscaya problem-problem yang bisa menghancurkan negara bisa teratasi. ■

12

Tambang Timah untuk Rakyat

MARWAN BATUBARA
Direktur Eksekutif IRESS

Kegiatan tambang timah di Bangka Belitung sudah berlangsung ratusan tahun. Saat ini Indonesia merupakan negara eksportir timah terbesar dunia dengan pangsa pasar sekitar 60 persen. Namun, perusahaan negara, PT Timah, tidak berperan dominan untuk memperoleh manfaat terbesar. Karena itu, kegiatan industri ini belum memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Sejak terbitnya SK Menperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999, timah dikategorikan sebagai barang bebas yang tidak diawasi, bukan lagi tergolong komoditas strategis. Kebijakan yang liberal ini membuat timah bisa ditambang dan diekspor secara bebas oleh siapa pun. Karena kebijakan liberal ini, ditambah maraknya tambang ilegal dan penyeludupan, negara rugi triliunan rupiah setiap tahun. Malaysia, Singapura, dan Thailand telah menikmati manfaat terbesar.

Sesuai informasi dari International Technology Research Institute (ITRI, 2011), selama periode 2008-2010, Malaysia telah menghasilkan logam timah dalam negerinya hanya sebesar 7.490 ton. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya penambangan ilegal dan penyeludupan, serta beroperasinya perusahaan yang didukung investor Malaysia. Jika diasumsikan harga timah Rp 20 ribu per ton akibat penyelewengan ini negara kehilangan pendapatan sekitar Rp 2,63 triliun.

Berdasarkan data Mundi (www.indexmundi.com), ekspor Singapura untuk produk terkait timah pada 2010 adalah 683,86 juta dolar AS dan meningkat menjadi 1,19 miliar dolar AS pada 2011. Demikian pula, dengan Thailand yang menghasilkan produk timah 2010 bernilai 436,75 juta dolar AS dan meningkat menjadi 569,53 juta dolar AS pada 2011. Padahal, Singapura tidak memiliki tambang dan Thailand pun hanya menghasilkan produk tambang sangat kecil.

Statista (www.statista.com) memublikasikan bahwa empat perusahaan produsen terbesar timah dunia, yaitu Yunnan Tin (Cina), Malaysia Smelting Co (Malaysia), PT Timah, dan Thaisarco (Thailand) masing-masing dengan produksi pada 2012 sebesar 69,760 metric ton (MT), 37,790 (MT), 29.00 MT, dan 22.850 MT. Yunnan menjadi produsen terbesar karena Cina memiliki cadangan timah terbesar di dunia. Namun, ternyata produksi MSC lebih besar dari Timah dan Thaisarco mampu menghasilkan produksi yang sangat signifikan, melebihi 20 ribu MT.

Angka-angka statistik di atas membuktikan sebagian besar bijih timah yang diproses oleh *smelter* milik MSC Malaysia, Thaisarco Thailand, maupun oleh Singapura berasal dari Indonesia/Babel. Hal ini menunjukkan bahwa tambang-tambang ilegal dan penyeludupan bijih timah terus berlangsung dari Indonesia ke Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Indonesia memang memiliki cadangan timah cukup besar. Namun, manfaat eksploitasi dan nilai tambahnya justru dinikmati oleh negara tetangga. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa negara telah kehilangan kendali dan kedaulatan atas barang tambang yang dimiliki.

Disadari bahwa kebijakan otonomi daerah telah membuat kegiatan *illegal mining* di Babel semakin parah. Oknum aparat pemda maupun pertahanan keamanan yang seharusnya melakukan pencegahan, justru terlibat dalam praktik busuk ini. Apalagi penambangan di lepas pantai semakin intensif dilakukan dan sulit diawasi, serta rawan tindak penyeludupan.

Dengan adanya pelarangan ekspor bijih mineral sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2012, terbuka kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Permen ESDM ini mestinya otomatis digunakan untuk mengoreksi SK Menperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999. Kita menunggu komitmen pemerintah/ESDM untuk konsisten menjalankan peraturan yang berlaku,

sekaligus berani menghadapi konspirasi para pengusaha, oknum-oknum aparat, dan pihak asing.

Salah satu perusahaan asing yang terlibat penyelewengan adalah MSC. Kegiatan busuk MSC dapat berjalan lancar karena memiliki "tangan" resmi berupa pemilikan saham di Koba Tin. Koba Tin terlibat menampung produk ilegal, menyeludupkan bijih, menggelapkan pajak, dan melakukan transfer pricing.

Faktanya, sejak tahun 2009, 2010, 2011, hingga 2012, melalui manipulasi keuangan, Koba Tin telah "menyatakan rugi" masing-masing 6,1 juta dolar AS, 4,1 juta dolar AS, 6,3 juta dolar AS, dan 37 juta dolar AS. Akibatnya, PT Timah yang memiliki 25 persen saham di Koba Tin pun telah kehilangan nilai saham sekitar Rp 65 miliar. Koba Tin telah berperan cukup lama sebagai benalu di industri timah nasional.

Saat ini, terbuka kesempatan bagi pemerintah untuk mengeliminasi MSC. Kontrak Karya (KK) Koba Tin yang telah berlangsung selama 40 tahun berakhir pada 31 Maret 2013. Namun, sangat disayangkan, ternyata Menteri ESDM masih memberi kesempatan kepada Koba Tin untuk melakukan "kegiatan operasi tambang" hingga 30 Juni 2013 dengan berbagai alasan yang dicari-cari.

Koba Tin telah melakukan kejahatan korporasi secara vulgar dan harus dituntut di pengadilan. Harga diri bangsa kita telah diusik dan dipecundangi. Oleh sebab itu, jangankan membiarkan Koba Tin mengakhiri KK dengan bebas, lolos dari peradilan saja sudah merupakan aib bagi bangsa ini.

Ke depan pemerintah harus menjamin dominasi BUMN Timah dalam industri timah nasional. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penguasaan lahan tambang, pembentukan konsorsium BUMN dengan BUMD, perlindungan keamanan operasi, pemberantasan penyeludupan dan tambang liar, integrasi pekerja tambang dan tambang rakyat dengan Timah, penerapan ekspor "satu pintu", serta eliminasi peran asing dalam rantai bisnis timah. ■

13

6 OPINI

Kronisme Pengelolaan Lapas

■ SAHARUDDIN DAMING
Mantan Komisioner Komnas HAM

Belum hilang trauma kerusuhan massal dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Denpasar, Bali, 21 Februari 2012, disusul aksi penyerangan anggota Kopasus ke Lapas Cebongan Sleman, Yogyakarta, 23 Maret 2013, kejadian serupa kembali terulang di Lapas Tanjung Gusta Medan, Kamis, 11 Juli 2013. Sejumlah infrastruktur dan peralatan strategis lapas, hangus dilapisi jago merah hingga menelan lima korban jiwa dan ratusan luka-luka akibat amukan ribuan warga binaan yang marah karena terhentinya aliran listrik dan air.

Hal ini dapat dimengerti karena lapas dalam konteks pembangunan bangsa pasca-Reformasi adalah institusi yang mengemban misi pemanusiaan anak-anak negeri yang terperosok pelanggaran hukum. Untuk maksud tersebut, manajemen lapas semakin dituntut kemampuannya dalam menata seluruh sistem pembinaan secara optimal, profesional, dan berdedikasi tinggi demi mengantarkan *recovery* warga binaan.

Konsep tentang lapas pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada 1962 di mana tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan penghukuman, tetapi juga membina orang-orang yang dijatuhi pidana. Sejak itu, dimulailah berbagai upaya penataan secara sistematis dan menyeluruh tentang kepenjaraan yang berpuncak dengan lahirnya UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Namun, amat disesalkan karena laju pergerakan reformasi lapas tersebut terganjal sejumlah masalah dari hulu hingga hilir. Pertama, langkah penataan sistem pengelolaan lapas tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas untuk menampung calon penghuni yang jauh lebih besar. Akibatnya, hampir semua lapas di Tanah Air mengalami *over capacity*.

Kedua, tren pengelolaan lapas hingga dewasa ini rupanya masih lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman daripada pembinaan. Hal ini tergambarkan dari statistik tentang personalia pengelolaan lapas yang masih didominasi petu-

gas berlatar belakang pendidikan hukum daripada ahli edukasi, konseling, atau terapi mental. Ketika lapas masih menggunakan sistem penjara, tenaga yang dibutuhkan memang mengandalkan tipikal orang yang berotot gempal, berwatak berbingas, berkepribadian keras, dan tegas.

Ketiga, kualitas SDM pengelola lapas, terutama di tingkat lapangan, masih rendah. Petugas lapas umumnya kurang mampu membangun komunikasi yang efektif dengan penghuni lapas. Karena merasa berkuasa dan memandang penghuni lapas sebagai orang yang salah, petugas lapas cenderung melakukan penghukuman dengan tindakan kekerasan meski hanya kesalahan kecil. Petugas lebih sering 'memerintah' daripada 'mengajak'.

Pemasyarakatan sebagai pengemban amanah penegak hukum diharapkan mampu berfungsi lebih dari sekadar *police of power* (pengawas/mandor) para terpidana. Bagaimanapun, pemasyarakatan lahir dari rahim Ibu Pertiwi untuk merehabilitasi mental para pelaku tindak pidana, bukan untuk menindak dengan wajah murka, melainkan memperbaiki dengan wajah yang memesonakan.

Keempat, rendahnya intensif pengelola melahirkan sikap mental yang kurang terpuji. Meski pemerintah menaikkan tunjangan pengelola lapas sesuai Perpres 21/2006, namun hal tersebut belum mampu mengalahkan aneka tawaran dari penghuni dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Akibatnya, oknum pengelola lapas cenderung melalaikan tugas utamanya karena lebih terpesona berbagai praktik pungli dengan konsesi kepada penghuni yang memberi upeti.

Berbagai layanan standar terabaikan hingga lapas tak lebih hanyalah sebagai sarang pemerasan. Tidak heran jika pada 2006, hampir 10 persen penghuni meninggal dalam lapas. Sebagian besar disebabkan telah menderita sakit sebelum masuk lapas. Ketika berada dalam lapa, kondisi kesehatannya semakin parah.

Karena penghuni lapas memperoleh konsesi sedemikian rupa melalui pemberian kepada oknum pengelola, lapas kehilangan daya tangkal dan tidak steril lagi

dari anasir kepentingan penghuni dengan berbagai intrik. Semua larangan, seperti penggunaan dan pemilikan HP, laptop, dan sejenisnya, nyaris tinggal cerita.

Tidak heran jika pada awal 2010, terkuak kasus Arthalita Suryani sebagai penghuni Lapas Pondok Bambu Jakarta. Dia memiliki ruang karaoke pribadi dalam selnya berikut fasilitas pendingin udara (AC), dilengkapi kulkas beserta satu set komputer jaringan untuk memudahkan aktivitasnya mengontrol kegiatannya di luar sel melalui internet.

Begitu rusaknya sikap mental dan moral oknum pengelola lapas yang ditilap sejumlah uang hingga berani membiarkan penghuni bebas keluar lapas sehari-hari menginap di rumahnya, bahkan ada yang pelesiran ke luar kota hingga ke luar negeri. Hal inilah yang menjadi *maintrigger* peredaran narkoba secara bebas dalam lapas.

Meski Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mencoba mereduksi perilaku buruk anak buahnya tersebut dengan sidak, upaya itu justru menjadi bumerang. Tindakan luhur Wamen menimbulkan kebencian dan pembangkangan massal dari sejumlah oknum pengelola lapas.

Kelima, langkah reformasi lapas rupanya lebih fokus pada aspek struktural daripada kultural. Berbagai persoalan lapas yang memicu pembangkangan penghuni selalu direspons dengan kebijakan dalam bentuk reorganisasi dan restrukturisasi. Parahnya lagi karena banyak kebijakan yang terkait dengan pelayanan kepada penghuni lapas dibuat dengan sangat represif dan cenderung memberatkan penghuni lapas sendiri.

Tengoklah PP No 99/2012 sebagai penyempurnaan dari PP 32/1999 jo PP 28/2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kebijakan inilah yang menjadi tuntutan utama penghuni Lapas Tanjung Gusta agar direvisi. Namun, terlepas dari semua itu, pengelola lapas maupun pemegang otoritas perlu terus berbenah demi menampilkan corak pemasyarakatan kita yang lebih berkualitas dan bermartabat. ■

Petani dan Politik Pangan

RIYONO
Sekjen DPP Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia

SBY marah karena harga pangan naik menjelang Ramadhan dan Lebaran tahun ini. Kemarahan SBY dipicu karena lambannya para Menteri merespons instruksi untuk pengendalian kenaikan harga pangan pascakenaikan BBM. Menurut penulis, kemarahan SBY tidak tepat. Masyarakat sudah tahu bahwa pasti ada kenaikan harga pangan menjelang Lebaran, apalagi SBY menaikkan harga BBM. Harusnya SBY jujur dan minta maaf kepada rakyat karena tidak mampu menjaga harga pangan.

Sejarah membuktikan bahwa pangan menjadi alat politik. Praktik seperti ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Kekalahan pasukan Sultan Agung Mataram dalam melawan VOC diakibatkan oleh gudang/lumbung pangan prajurit Mataram dibumihanguskan oleh VOC.

Kisah Nabi Muhammad yang di-boikot oleh suku Qurais dan diasingkan di sebuah lembah dan dilarang melakukan transaksi jual beli bahan pangan mengakibatkan 'penderitaan' pengikut Islam waktu itu terasa berat. Saat ini hampir 1 miliar penduduk dunia mengalami kelaparan akibat adanya krisis pangan.

Petani dan peternak saat ini merasakan kondisi pangan yang naik sedikit lega karena adanya kenaikan harga rata-rata lima sampai sepuluh persen dari harga normal. Keributan soal mahalnya harga daging dan cabai rawit yang dirisaukan oleh SBY sebenarnya tidak beralasan sehingga harus melakukan impor.

Sebenarnya, yang butuh daging dalam jumlah banyak siapa? Pengusaha atau rakyat? Jangankan impor ini juga karena desakan importir yang tidak mau berbagi keuntungan dengan peternak dan petani. Ya, selama puluhan tahun importir sudah merasakan keuntungan berlipat-lipat dari impor daging dan sapi yang mengakibatkan peternak sengsara.

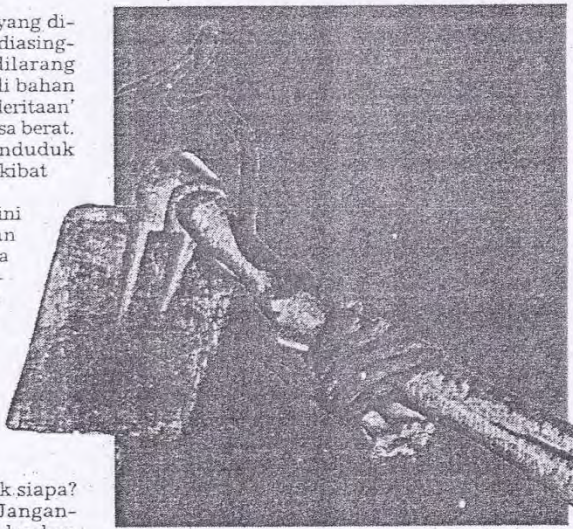
Kondisi gejala pangan di atas disebabkan oleh politik. Politik sebagai alat melahirkan kebijakan dan pengaruh yang kuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Indonesia yang 80 persen penduduknya tinggal di wilayah pedesaan dan pesisir membutuhkan politik pangan yang jelas dari SBY dan wakil rakyat.

Politik pangan menempatkan urusan pangan sebagai urusan pokok rakyat harus diprioritaskan. Bukan seperti saat ini di mana urusan pertanian yang menangani masalah produksi pangan hanya menjadi 'lipstik' dengan istilah urusan pilihan, bukan urusan wajib, yang artinya kalau dipilih ya akan diberikan dukungan anggaran, namun jika tidak dipilih cukup ada saja dan tidak bisa memberikan kontribusi bagi

pemenuhan pangan masyarakat.

Politik pangan harus didukung langsung oleh SBY dan para wakil rakyat di DPR. Karena, pangan menjadi salah satu pilar ketahanan nasional di samping energi, keamanan, dan moral. Politik pangan telah menjadikan negara-negara besar seperti Amerika, Cina, menguasai hampir 60 persen produk pangan dunia.

Mereka leluasa menjajah negara di kawasan Asia dan dunia umumnya karena kebijakan politik pangan mereka jelas. Politik pangan yang diterapkan adalah berorientasi kepada proses mengangkat harkat dan kesejahteraan petani dan peternak. Jadilah petani dan usaha pertanian di negara-negara tersebut anak emas yang mendapatkan perhatian besar dalam sisi kebijakan politik, anggaran, dan perlindungan dari berbagai gangguan.



Da'an Yahya/Republika

Kebijakan politik pangan

Petani sebagai objek akan politik pangan harus ditempatkan sebagai 'mitra' dalam penentuan kebijakan pangan. Selama ini petani hanya menerima kebijakan tanpa adanya keterlibatan dalam menentukan arah kebijakan pangan nasional. Adanya Bulog, Kementan, Kementerian Perdagangan sering membuat arus kebijakan tidak sinkron, kadang malah berbenturan satu dengan yang lain.

Sebagai contoh, kebijakan penanganan kenaikan harga daging sapi yang telah ditetapkan bahwa 2014 akan swasembada daging, walaupun data BPS 2012 menyatakan bahwa jumlah sapi cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tidak digubris dan bahkan SBY melalui Bulog mengimpor daging sapi 3.000 ton bulan Juli ini. Ini memang ironisnya koordinasi dan konsistensi birokrasi negeri ini.

Operasi pasar sebagai obat penenang menjadi senjata utama untuk intervensi

harga di pasar, jelas bahwa operasi pasar sangat tidak efektif dalam upaya membangun perekonomian ke depan. Melihat kondisi masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antardepartemen, munculnya ego sektoral serta rendahnya implementasi kebijakan politik pangan nasional rasanya sulit bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan secara nasional.

Melihat masalah di atas, pemerintah harus kembali kepada kebijakan politik pangan yang berorientasi kepada kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional. Untuk mencapai itu, politik pangan dikembalikan sebagai soko guru politik nasional melalui pendekatan dalam berbagai perspektif yang utuh.

Pertama, politik pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional. Artinya, bahwa politik harus mengembalikan urusan pangan sebagai masalah pokok yang harus segera diselesaikan. Urusan pangan yang meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti beras, jagung, lauk pauk harus mendapatkan dukungan yang penuh. Sebagai contoh lahirnya UU Perlindungan Petani untuk melindungi petani dan usaha pertanian agar tidak hancur oleh kebijakan luar.

Perspektif politik pangan sebagai penyelamatan dan optimalisasi potensi pertanian. Potensi pertanian Indonesia ibarat laut yang tidak pernah habis airnya, artinya bahwa kekayaan alam pertanian Indonesia selalu mampu memberikan pangan kepada rakyat selama potensi ini dipelihara secara berkelanjutan.

Kalau politik pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional menghadirkan regulasi yang berpihak kepada petani, maka perspektif penyelamatan dan

optimalisasi adalah upaya memanfaatkan kekayaan alam pertanian untuk petani. Hasilnya bukan hanya dinikmati oleh kaum pemodal.

Keberadaan dunia pertanian nasional merupakan aset anak negeri yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Pertanyaannya adalah, apakah dunia pertanian 100 tahun ke depan akan bisa menjawab tantangan kebutuhan pangan dunia? Tergantung saat ini apa yang kita lakukan.

Jika kita menghancurkan pertanian sendiri, maka generasi ke depan akan selalu mengingat bahwa penyebab kelaparan dan kemiskinan adalah kita saat ini yang mengeksploitasi pertanian secara tersistem dan terencana. Terutama oleh pemilik modal yang selalu haus dengan keuntungan tanpa melihat petani dan peternak lokal yang telah susah payah membangun negeri ini dari desa. SBY tidak perlu marah soal kenaikan harga, biarkan petani dan peternak ikut menikmati jerih payah mereka. ■

15

Anarkisme Mengancam Mesir

■ SMITH ALHADAR

Penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies

Krisis politik Mesir kian rumit dan perpecahan masyarakat semakin mendalam menyusul kudeta militer yang membubarkan pemerintahan yang sah di bawah presiden terpilih Muhammad Mursi pada 3 Juli lalu. Militer pimpinan Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Fattah al-Sisi segera menunjuk menteri keuangan pascarezim otoriter Husni Mubarak, Adly Mahmud Mansur, sebagai presiden sementara.

Pada gilirannya Mansur mengangkat Ketua Front Penyelamatan Nasional, organisasi payung partai-partai politik anti-Mursi, Muhammad El-Baradei, sebagai wakil presiden dan Hazem el-Beblawi sebagai perdana menteri. Langkah ini disertai peta jalan proses transisi, bukannya menyelesaikan krisis Mesir, tapi justru membuat semakin runyam walaupun Mansur menawarkan kursi menteri untuk Partai Kebebasan dan Keadilan-sayap militer Ikhwanul Muslimin-dan Partai Jamaah al-Islamiyah.

Dua kelompok ini terus melakukan unjuk rasa menuntut Mursi dikembalikan ke kursi presiden karena Dia merupakan pemimpin yang terpilih dalam pemilihan presiden yang bebas dan demokratis pada Juni tahun lalu. Kalau sebelumnya unjuk rasa mereka terpusat pada tiga tempat, yaitu area Masjid Rabaah Adawiyah, lapangan en-Nahda, dan kompleks Garda Republik, kini mereka mulai keluar ke sejumlah jalan utama di Kairo.

Mereka juga berdemonstrasi di sejumlah kota penting di Mesir. Mereka menjauhi Alun-alun Tahrir karena di sana terkonsentrasi kelompok-kelompok anti-Mursi. Tapi, belakangan jumlah kelompok anti-Ikhwanul Muslimin (IM) semakin sedikit karena kecewa pada kebijakan Mansur yang didukung militer. Unjuk rasa kelompok Islamis semakin berani karena mereka didukung oleh tokoh-tokoh berpengaruh.

"Jalan keluar terbaik adalah mengem-

balikan keabsahan Presiden Mursi, baru kemudian dialog untuk pemilihan dini," kata Prof Dr Sabar Khamis, pakar komunikasi dari University of Maryland, Amerika Serikat (AS). Wanita berkerudung asal Mesir yang tidak berafiliasi dengan partai politik itu merujuk pada kudeta militer 3 Juli yang melengserkan Mursi.

Prof Dr Syekh Yusuf Qaradhaw, ulama karismatik yang sangat berpengaruh di Mesir dan dunia Islam, juga mengutuk sikap militer yang melengserkan Mursi. Keabsahan Presiden Mursi wajib dikembalikan dan tentara wajib menghormati putusan rakyat yang memberi kepercayaan.

Pemerintahan AS dan Jerman, kendati berpihak pada militer, juga mendesak militer Mesir membebaskan Mursi yang ditahan di suatu tempat rahasia. Massa IM dan jamaah Islamiyah bertahan di kompleks Garda Republik karena yakin Mursi ditahan di sana.

Untuk menjustifikasi kudeta militer dan merespons seruan AS dan Jerman bagi pembebasan Mursi, Jenderal al-Sisi mengatakan, presiden terguling telah melanggar mandat rakyat dan memusuhi lembaga-lembaga negara. Mursi masuk ke konflik dengan pengadilan, media, polisi, dan opini publik. Kemudian, (dia) juga mengadakan konflik dengan angkatan bersenjata.

Al-Sisi mengatakan, sebelum kudeta, dia telah mengirim dua utusan, termasuk Perdana Menteri Hesham Kandil dan ahli hukum tepercaya, untuk mendesak presiden mengadakan referendum mengenai apakah memilih masih mendukung kepresidenannya. Namun, saran itu ditolak mentah-mentah.

Kelihatan, pernyataan itu hanyalah apologi untuk menolak tuduhan bahwa apa yang dilakukan militer terhadap pemerintahan Mursi adalah kudeta.

Karena itu, Juru Bicara Ikhwanul Muslimin Gehad el-Haddad menanggapi pernyataan al-Sisi bahwa militer tidak mempunyai hak untuk bertindak

atas nama rakyat Mesir, kecuali melalui perintah panglima mereka yang terpilih, yaitu Mursi sendiri. Katanya, militer juga tidak memiliki hak untuk memutuskan mana protes yang cukup layak untuk mewakili rakyat.

Pernyataan el-Haddad bukan hanya menolak apologi militer, melainkan juga menghantam AS yang sampai kini belum menentukan apakah tindakan militer memakzulkan Mursi adalah kudeta atau bukan. Jelas aksi militer itu adalah kudeta yang per definisi adalah tindakan membubarkan pemerintahan yang sah secara paksa. AS membiarkan isu ini mengambang.

Militer kini tidak saja menghadapi protes IM dan jamaah Islamiyah, tapi juga dengan kelompok-kelompok anti-Mursi. Hampir semua kekuatan politik menolak dekrit konstitusi presiden sementara, Adly Mahmud Mansur, yang berisi peta jalan proses transisi.

Partai Al-Ghad Revolusi pimpinan Ayman Nur dan Gerakan Poros Rakyat pimpinan Hamdan Sabahi serta Partai Islamis Wasat menyatakan menolak dekrit itu. Sebelumnya, Front Penyelamatan Nasional dan Gerakan Tamarud menyampaikan keberatan atas dekrit tersebut.

Salah seorang anggota dewan pusat gerakan Tamarud, Ayat Husni, meminta Presiden Mansur segera mengeluarkan dekrit baru yang menjelaskan batasan wewenang presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Partai Nur, sayap politik kelompok Salafi, yang mendulang hampir seperempat pemilih yang mencoblos dalam pemilu parlemen pada Januari tahun lalu, sudah lebih dulu mundur dari koalisi anti-Mursi. Dengan demikian, Mesir memasuki hari-hari yang suram walaupun Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait yang tidak menyukai Ikhwanul Muslimin berkuasa di Mesir karena akan memberi dampak keamanan kepada mereka-menyajikan hibah dan pinjaman sebanyak 12 miliar dolar AS. ■

16

6 OPINI

Keteladanan Profetik Natsir

■ NAUFAL MAHFUDZ

Pemerhati Masalah Kebangsaan, Direktur Perum LKBN Antara

Tanggal 17 Juli 1908, tepat 105 tahun lalu, di daerah sejuk Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, lahir seorang yang kemudian dikenal sebagai negarawan terkemuka yang tidak hanya diakui tingkat nasional namun juga internasional bernama Mohammad Natsir, bergelar Datuk Sinaro Panjang. Dan pada 10 November 2008, dalam peringatan 100 tahun kelahirannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional atas jasa-jasa yang diabdikan kepada negeri ini.

Begitu banyak pemikiran dan perjuangannya untuk kemajuan bangsa yang dirasakan manfaatnya oleh generasi saat ini. Natsir yang tidak pernah mengenyam bangku kuliah namun menguasai enam bahasa asing di usia yang belia, dipercaya tiga kali menjadi menteri penerangan dan sekali sebagai perdana menteri Republik Indonesia. Kiprahnya di dunia politik dan keagamaan memberikan warna keteladanan profetik tersendiri bagi bangsa ini.

Keteladanan profetik merupakan teladan perilaku dan sikap yang bersumber dari cara para nabi memimpin umatnya. Para nabi memiliki beberapa sifat yang sangat mulia. Beberapa sifat atau karakter profetik yang semakin langka ditemui di kalangan para pemimpin dan masyarakat dewasa ini antara lain adalah sifat *amanah* (dapat dipercaya), *istiqamah* (konsisten), dan juga *mahabbah* (cinta kasih).

Pemimpin yang memiliki karakter *amanah* adalah mereka yang mengaplikasikan dengan segala keyakinan perilaku sebagai orang yang dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain, kompeten, penuh tanggung jawab, serta mampu memisahkan kepentingan pribadi dan keluarga dengan kepentingan masyarakat dan bangsa. Karakter *amanah* ini melahirkan integritas dan kesederhanaan dalam bersikap dan bertindak serta tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Ketika Natsir menjabat sebagai menteri penerangan dan sering berkantor di

Yogyakarta, George McTurnan Kahin, guru besar Universitas Cornell, pertama kali bertemu Natsir. Kahin terkejut saat melihat sang menteri memakai jas yang bertambal. Pakaiannya ini benar-benar tidak menunjukkan Natsir sebagai seorang menteri.

Kemudian, Kahin mengetahui juga bahwa Natsir hanya memiliki kemeja kerja dua stel yang tidak terlalu bagus lagi, hingga akhirnya para pegawai departemen penerangan yang dipimpinnya itu "berpatungan" membeli beberapa pakaian yang pantas untuk Natsir agar terlihat sebagai "menteri sungguhan". Kisah tentang pakaian, di kemudian hari ketika Natsir mendirikan dan memimpin organisasi Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII), banyak yang mengamati beliau mengenakan baju yang "itu-itu saja", bahkan ada baju yang tetap dikenakannya walau ada bekas noda tinta.

Integritasnya terlihat nyata saat mengundurkan diri dari jabatan sebagai perdana menteri. Ketika itu, stafnya melaporkan catatan saldo dana taktis perdana menteri yang masih cukup banyak. Staf tersebut mengatakan dana ini adalah hak perdana menteri. Namun, Natsir menolak karena menurutnya itu bukan hak dia dan memerintahkan agar dana tersebut diserahkan ke koperasi karyawan.

Sama halnya ketika Natsir mengembalikan mandat sebagai perdana menteri. Beliau mengemudi sendiri mobil dinasnya menuju Istana Presiden untuk menemui Sukarno dan meminta sopir pribadinya naik sepeda mengikutinya. Setelah bertemu dan berbicara dengan Sukarno beberapa saat, Natsir pamit pulang berboncengan sepeda dengan sopir pribadinya, lalu singgah sebentar ke rumah jabatan perdana menteri untuk menjemput seluruh anggota keluarganya pindah hari itu juga ke rumah pribadinya yang tentu saja lebih kecil dan lebih sempit.

Ada satu nasihat Natsir yang selalu diingat oleh para pengikutnya tentang *istiqamah*, yaitu diibaratkan seperti kehidupan ikan di laut, walaupun sepanjang hidup dikelilingi air laut yang rasanya asin, namun sampai akhir hayatnya rasa daging ikan tersebut tetap tawar. Natsir menjalani kehidupan politik dan bermasyarakatnya dengan *istiqamah*,

baik di zaman Orde Lama maupun Orde Baru, walaupun harus menerima risiko diasingkan, dipenjara, dan dikubiri hak-hak sipilnya.

Perilaku *mahabbah* yaitu kasih sayang, peduli, empati, suka membantu dan menghargai sesama, santun, rendah hati, dan sikap altruistik diterapkan Natsir tidak hanya kepada orang yang lebih tua darinya, namun juga kepada generasi yang jauh lebih muda. Tidak hanya kepada saudara yang se-iman, namun juga kepada orang yang berbeda keyakinan.

Beberapa tokoh seperti Jimly Ashididie dan Yusril Ihza Mahendra pernah merasakan bantuan, rasa empati, dan kepedulian yang tinggi seorang Natsir terhadap mereka. Ketika mahasiswa dan sebagai ketua Youth Islamic Student Club (YISC), hampir setiap bulan Jimly diberi uang untuk mendanai organisasinya itu karena kekhawatiran Natsir kepadanya yang tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai hidup dan menjalankan aktivitas organisasinya.

Yusril yang sering konsultasi ke kantor DDII di Jalan Kramat Raya No 45, Jakarta, atau ke rumah Natsir, pernah diberi "ongkos becak" yang dimasukkan langsung ke saku Yusril oleh Natsir saat hendak pulang dari kunjungan Yusril ke rumah beliau di Jalan HOS Cokroaminoto No 46, Jakarta.

Anwar Ibrahim, saat menjabat sebagai menteri kebudayaan, beliau dan sukan Malaysia, juga pernah merasakan kerendahan hati seorang Natsir. Ketika itu, Anwar sedang berkunjung ke Indonesia dan ingin menemui Natsir di kediamannya, namun Natsir mendahului dengan menemui Anwar Ibrahim di hotel, yang kemudian politisi Malaysia itu mengajak sarapan pagi sambil berdiskusi di hotel.

Tidak mengherankan dengan perilaku demikian jika Natsir banyak memiliki kawan sehati dan sangat dicintai oleh para sahabat dan hampir semua lapisan masyarakat. Masyarakat sangat mendambakan pemimpin pengabdian yang bekerja tanpa pamrih. Pemimpin yang berani memilih untuk memberi apa yang dimiliki kepada negeri daripada menuntut apa yang bisa diberikan negara kepadanya. Pemimpin yang senantiasa bersikap hanya memberi dan tak harap kembali. ■



Zakat dalam Dinar dan Dirham

■ ZAIM SAIDI

Pimpinan Wakala Induk Nusantara (WIN), Pengguna Dinar dan Dirham

Saat Ramadhan datang, kaum Muslim menggunakan-nya sebagai momen untuk menghitung dan membayarkan zakat. Ini, antara lain, dimotivasi agar mendapat pahala berlipat. Tentu saja ini tidak tepat meskipun benar Allah SWT melipat-kan pahala setiap perbuatan baik pada Ramadhan. Tapi, sudah pasti itu tidak berlaku bagi zakat. Sebab, zakat, seperti puasa, adalah ibadah wajib tersendiri.

Jadi, membayarkan zakat yang merupakan kewajiban tersendiri itu pada Ramadhan atau bukan sama saja. Penyandingannya dengan shalat justru menunjukkan bahwa penunaian zakat itu harusnya setiap saat. Pemahaman yang keliru tentang waktu pembayaran zakat yang dikonsentrasikan pada Ramadhan sesungguhnya malah menimbulkan persoalan.

Zakat mal jadi menumpuk dalam masa yang sangat singkat hingga kurang terjadi pemerataan kekayaan dari segi waktu. Karena itu, sangatlah penting bagi setiap muzaki untuk menetapkan haul zakatnya secara lebih tepat dan tidak semata-mata mematok bulan Ramadhan supaya zakat bisa ditarik dan dibagikan setiap hari sepanjang tahun. Hingga ada pemerataan persebaran zakat tersebut.

Selain soal haul, rukun pokok lain dari zakat mal yang harus dipenuhi adalah batas minimal kewajiban atau nisab yang ditetapkan dalam dinar emas dan dirham perak. Dalam hal ini, Imam Malik (dalam *Muwatta*) berkata, "Sunah yang tidak ada perbedaan pendapat tentangnya adalah bahwa zakat diwajibkan pada emas senilai 20 dinar sebagaimana pada perak senilai 200 dirham." Saat ini hampir semua pihak, termasuk para ulama, menyatakan bahwa nisab zakat mal adalah 85 gr emas. Ini kurang tepat dan me-

nimbulkan persoalan serius.

Pertama, nisab itu ditetapkan memang dalam berat, tetapi satuannya adalah *mithqal* atau dinar emas bukan gram yang kalau dikonversi ke dalam berat umumnya memang menemukan angka 85 gr emas. Sebab, satu *mithqal* atau satu dinar emas adalah 4,25 gr, 20 dinar atau 20 *mithqal* menjadi 85 gr emas.

Penggunaan nisab dalam gr (emas) menghilangkan pengetahuan dasar umat Islam tentang satuan berat dalam syariat Islam (*mithqal* dan *qirat*) tentang dinar emas dan dirham perak dengan segala implikasinya. Antara lain, pengetahuan tentang ketetapan yang berkaitan dengan nilai, seperti pada *hudud*, *diyat*, *mahar*, dan sejenisnya, juga hilang.

Kedua, nisab 20 dinar dan 200 dirham ini mengacu secara umum untuk harta moneter (uang) dan harta perniagaan dan bukan *an sich* kepada (logam) emas dan perak. Dengan demikian, sebagaimana bisa dirujuk kepada pendapat para ulama salaf, zakat harta uang dan perniagaan hanya bisa dibayarkan dengan dinar emas atau dirham perak, masing-masing sebesar 2,5 persennya, yaitu 0,5 dinar emas dan lima dirham perak.

Dinar emas dan dirham perak adalah *'ayn* (aset nyata) sebagaimana produk pertanian dan peternakan yang bila jatuh nisab zakatnya hanya bisa dibayarkan dengan *'ayn* yang bersesuaian dengannya. Zakat tidak bisa dibayarkan dengan *dayn* (bukti utang) yang dalam konteks harta moneter dan barang perniagaan saat ini adalah berupa uang kertas atau turunannya.

Ketiga, penggunaan nisab zakat mal dan perniagaan yang hanya merujuk pada (dinar) emas dan mengabaikan (dirham) perak menciutkan jumlah muzaki. Nilai dinar emas pada awal Ramadhan 1434 H ini, misalnya, bila dirupiahkan adalah Rp 2 juta sedangkan dirham perak

adalah Rp 70 ribu. Artinya, nisab zakat dalam dinar emas setara dengan Rp 40 juta sedangkan nisab zakat dalam dirham perak adalah Rp 14 juta.

Jadi, selama ini, karena nisab yang dipakai hanyalah (85 gr) emas maka mereka yang memiliki tabungan mulai Rp 14 juta hingga Rp 40 juta tidak dinyatakan berkewajiban zakat. Padahal, jumlahnya secara logika akan jauh lebih banyak ketimbang yang memiliki tabungan bernisab dinar emas.

Keempat, ini yang sangat penting sebagaimana kita lihat dalam lebih dari satu dekade terakhir ini, penerapan sistem uang kertas dalam kehidupan sehari-hari terbukti semakin genting. Sistem ini yang tidak lain berbasiskan pada riba telah mendekati keruntuhan-nya yang ditandai dengan 'krisis moneter' yang tiada berhenti dan semakin hari semakin berat.

Uang kertas adalah liabilitas, bukan aset. Nilainya terus-menerus merosot. Secara riil, uang kertaslah sumber pemiskinan berupa inflasi yang merampas harta setiap orang.

Membayarkan zakat mal dalam dinar emas dan dirham perak akan dengan sangat efektif menghentikan pemiskinan akibat inflasi ini. Dalam 10 tahun terakhir ini, sejak kedua koin nabawi ini beredar di Indonesia, telah banyak yang mendapatkan manfaat ini.

Kelima, pembayaran zakat dalam dinar dan dirham yang diserahkan kepada mustahik memberikan dua manfaat lainnya. Satu, menjadi ajang edukasi umat Islam tentang rukun zakat, dinar, dan dirham, serta praktik muamalat sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dua, adanya bazar-bazar dengan dirham dan dinar membuat perdagangan kembali bergerak, perekonomian masyarakat, khususnya usaha kecil ikut berkembang. ■



6 OPINI

Fikih Penjara

■ OKRISAL EKA PUTRA

Dosen UIN Yogyakarta, Alumni Al-Azhar Kairo

Ketika berbicara tentang hukuman, ada perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum konvensional yang dianut di Indonesia. Dalam hukum Islam, tidak semua kesalahan berakhir di penjara. Terhadap berbagai tindakan kriminal, agama Islam memberikan hukuman yang berbeda.

Ada tiga kategori dalam hukum Islam, hukuman fisik, hukuman denda, dan hukuman *ta'zir* (ini bisa berupa penjara). Kalau hukum yang dikenal di Indonesia hampir semua berakhir di penjara tanpa membedakan tindakan kriminalitas yang dilakukan narapidana. Tentu semuanya ingin memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Tapi tentu saja, perbedaan perlakuan akan memberikan perbedaan hasil.

Baru-baru ini, dunia hukum kita dikejutkan lagi oleh sebuah peristiwa kerusuhan berupa kebakaran lembaga pemasyarakatan (lapas) dan pelarian napi dari penjara Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Tentu kita masih ingat beberapa skandal yang merendahkan wajah keadilan, ketika terdakwa berbagai kasus besar (kasus korupsi dan suap) yang ditahan di beberapa rutan dan lapas memperoleh fasilitas mewah, bahkan bisa dengan bebas berkeliaran tanpa ada perasaan takut. Tentu saja efek jera yang kita harapkan jauh panggang dari api.

Pada hakikatnya, penjara direalisasikan bertujuan memberikan kesempatan untuk kembali merenungkan kekeliruan dengan harapan tidak mengulangnya. Tapi, pada perkembangan selanjutnya, nilai ini semakin memudar. Fenomena ini tentu saja tak lepas dari pihak pemerintah ketika memandang arti sebuah penjara.

Pada abad pertengahan, penjara dijadikan sebagai alat melegitimasi kekuasaan dan sebagai senjata ampuh untuk menyingkirkan lawan politik sang raja. Bahkan, para filsuf di Eropa pada masa itu ikut melestarikan budaya ini, barulah pada abad ke-18 pihak gereja mulai mengembalikan fungsi penjara sebagai sarana untuk penyucian jiwa orang yang bersalah dan memberikan kesempatan untuk bertobat, serta menghilangkan

praktik-praktik kekerasan dan penyiksaan selama di tahanan.

Praktik penjara sudah dikenal sebelum agama Islam hadir di jazirah Arab. Kisah nabi Yusuf AS yang difitnah melakukan selingkuh dengan permaisuri raja yang mengakibatkan beliau mendekam di penjara merupakan gambaran praktik hukum pada masa lalu. Pada masa Rasulullah pun dinamika penjara masih dipertahankan bahkan masih berlanjut sampai Khulafaur Rasyidin yang kemudian bertahan sampai saat ini.

Tapi, pada masa-masa awal Islam, bukanlah sebagaimana praktik masa sekarang, secara hukum *syar'i* orang yang divonis bersalah bukan dimasukkan ruang khusus tahanan, tapi hanya dihalangi melakukan interaksi sosial. Inilah yang dikenal dalam wacana hukum Islam dengan istilah (*al atsir*) tawanan.

Dalam perjalanan waktu selanjutnya, Islam memberikan tuntunan etika da'im mempraktikkan konsep penjara. Mungkin ini disebabkan karena penjara mempunyai peluang yang sangat besar untuk disalahartikan oleh pemerintah yang berkuasa, bahkan dalam lembaran sejarah klasik dan modern tak jarang penjara dijadikan alat pamer unjuk kewibawaan dan otoritas.

Tentu pada tahap ini, nilai moral dan etika yang diinginkan untuk terpidana akan tumpul bahkan mati. Keinginan agar orang yang merasa bersalah bisa tobat dan kembali ke masyarakat dengan baik hanya isapan jempol bahkan membuka peluang media permusuhan dan mematikan demokrasi.

Kalau diperhatikan dalam hukum konvensional, penjara adalah hukuman pokok untuk semua jenis kejahatan walaupun memakai istilah yang berbeda seperti: kerja paksa sementara atau seumur hidup, sehingga penjara dihuni oleh semua jenis kejahatan. Di mana mereka bisa saling berkenalan dan mungkin membuat sebuah konspirasi kriminal walaupun tujuan awal mereka di penjara agar bertobat dan tidak mengulangi hal yang sama.

Tuntunan dalam konsep penjara tak lepas dari aspek edukatif, sosiologis, bahkan biologis. Di sini agama Islam ingin menunjukkan bahwa ketika seorang masuk penjara, tujuan dasar hanya un-

tuk membatasi gerak sosial dan interaksi dengan dunia luar, tapi hak narapidana sebagai manusia merdeka tidak boleh dihalangi.

Di samping hak alamiah di atas, ada beberapa kewajiban bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, untuk memenuhi kebutuhan pokok di samping persoalan sandang pangan, tapi juga beberapa hak-hak lain. Hak edukatif merupakan hak asasi manusia memperoleh ilmu di mana saja, sekalipun mereka ada di ruang tahanan.

Penghuni lapas juga mendapatkan hak sosiologis. Faktor ketidakseimbangan kejiwaan mereka merupakan kesempatan untuk mengetahui hal yang baik menjadi sangat kurang disebabkan pengaruh lingkungan sosial yang kurang memadai, justru setelah mereka di penjara kesempatan itu ada. Pada tahap inilah pemerintah harus menciptakan hubungan sosial yang baik antara penghukum dan si terpidana untuk menyegarkan kembali ingatan mereka tentang nilai-nilai kebaikan.

Penghuni lapas juga memiliki hak biologis. Kebutuhan penyaluran hasrat biologis juga merupakan hak asasi dasar yang harus mendapat perhatian pemerintah. Pembatasan gerak jasmani dengan lingkup sosialnya sudah cukup membuat mereka tertekan dan pengekan terhadap libido seksualnya termasuk perbuatan zhalim, sebagaimana sebuah penjara di negara bagian Amerika memberikan ruang khusus untuk melakukan kontak biologis dengan istri atau pasangannya.

Pengekangan seksual pada gilirannya melahirkan praktik asusila selama mereka di tahanan dan untuk fenomena ini tidak sedikit kasus praktik seksual yang menyimpang selama di penjara yang terangkat ke permukaan. Di sinilah fungsi penjara sebagai wadah pembinaan mental tak ubahnya dengan sekolah dan rumah sakit.

Tugas penyelenggara penjaralah yang sudah menerima mereka sebagai anak didik harus terus ditingkatkan, tanpa mengabaikan hak asasi mereka sebagai manusia normal. Dengan itu, semua mudah-mudahan harapan dan cita-cita narapidana serta pihak berwenang kembali menjadi manusia terpuji bisa tercapai dengan baik. ■

19

Investasi NOC, Sanggupkah?

■ PRIMA MULYASARI AGUSTINI
Akademisi, Pemerhati Energi dan BUMN

Polemik Blok Mahakam belumlah usai. Saat ini, berbagai pihak tengah menanti keputusan pemerintah atas siapa yang akan menjadi operator blok yang diperkirakan masih menyimpan cadangan gas sekitar 14 tfc yang memiliki potensi pendapatan melebihi Rp 1.500 triliun ini. Total E&P Indonesia dan Inpex sebagai pemegang saham terbesar, juga Pertamina, tengah menanti keputusan pemerintah menjelang berakhirnya kontrak kerja sama pada 2017.

Blok Mahakam merupakan blok migas di delta Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang volume produksinya mencapai 1.800 juta standar km kubik per hari atau hampir sepertiga dari produksi total gas nasional. Saat ini, 32 persen dari seluruh pendapat Blok Mahakam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sejak 1967, Blok Mahakam dikelola oleh Total E&P Indonesia dan Inpex. Total telah berinvestasi sebesar 2,5 miliar dolar AS per tahun, mengebor 100 sumur, dan mengintervensi 10 ribu sumur per tahun dengan mempekerjakan sekitar 20 ribu pekerja. Lebih dari 40 tahun, Blok Mahakam telah memberikan pendapatan bagi Indonesia sebesar 87 miliar dolar AS.

Hampir 50 tahun beroperasinya operator Total dan Inpex tengah mengusik nasionalisme bangsa ini. Banyak pihak menginginkan operator Blok Mahakam sepenuhnya diserahkan pada Pertamina sebagai BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas.

Pertamina sebagai perusahaan nasional milik negara merupakan satu-satunya operator migas yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola Blok Mahakam. Belanja modal Pertamina setiap tahun mencapai 6,5 miliar dolar AS. Bila setiap tahun disisihkan dua miliar

dolar AS untuk investasi di Mahakam, dalam empat tahun saja, investasinya di Blok Mahakam bisa mencapai delapan miliar dolar AS.

Menilik pada kemampuan Pertamina, dengan hampir berakhirnya kontrak kerja sama, Blok Mahakam merupakan peluang bagi pemerintah untuk menata kelola energi nasional. Ini momen yang harus dijadikan peluang untuk menunjukkan nasionalisme, prorakyat, bangsa, serta konstitusional. Pemerintah harus memberikan peluang membesarkan Pertamina sebagai *national oil company* (NOC) agar dapat berkibrah di kancah nasional dan internasional.

Pertamina telah menyatakan kesiapannya mengelola Blok Mahakam dan menunjukkan kemampuannya dalam mengelola berbagai blok migas. Sebagai indikasi kemampuan Pertamina, di Offshore North West Java (ONWJ), pengambilalihan dari British Petroleum mampu meningkatkan produksi dari 20 ribu menjadi 36 ribu barel per hari. Begitu pula di West Madura Offshore (WMO).

Blok Cepu yang dikelola oleh operator Exxon Mobil merupakan pil pahit yang sengaja ditelan negeri ini. Indonesia kehilangan peluang menjadi operator langsung pada ladang yang diperkirakan menghasilkan *crude oil* sebanyak 170 ribu barel per hari. Walaupun Pertamina memiliki saham, nyatanya tidak dapat mengetahui konsep detail operasional Exxon.

Penyerahan Blok Cepu pada Exxon Mobil diwarnai dengan isu penerimaan APBN, gugatan arbitrase, *lifting*, iklim, dan nilai investasi. Dengan alasan, jika dikelola Exxon, Blok Cepu akan berproduksi 165 ribu barel per hari pada 2010 dan berkontribusi pada APBN maka hak operator itu diberikan pada Exxon. Namun, pada kenyataannya, produksi Blok Cepu masih berkisar 25 ribu barel per hari dan APBN tidak terganggu.

Dominasi perusahaan migas asing menyebabkan produksi migas tidak bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bahkan cenderung meningkatkan impor. Produksi minyak nasional yang mencapai 830 ribu barel per hari, hanya sekitar 500 barel per hari yang menjadi bagian negeri ini. Sisanya milik asing dalam bentuk *recovery cost* 25 persen dan bagi hasil 15 persen yang umumnya dibawa ke negara asal kontraktor.

Tentu bisa dibayangkan besarnya kekayaan migas yang dibawa ke luar negeri dalam setiap kali kontrak kerja sama dilakukan, bisa 30 atau 50 tahun. Apalagi, jika kasus seperti Total yang meminta perpanjangan hingga 20 tahun ke depan. Ini berarti, selama 70 tahun, Blok Mahakam secara superior dikuasai asing yang memegang saham lebih dari 60 persen.

Bangsa Indonesia harus lepas dari ketergantungan pada operator asing. Blok-blok migas yang akan habis masa kontraknya seharusnya dikembalikan kepada negara dan kemudian diserahkan kepada perusahaan nasional. Tujuannya agar produksi migas dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Sebagai catatan penting, untuk lepas dari ketergantungan pada operator asing, perlu penguasaan teknologi tinggi agar mencapai hasil produksi yang maksimal. Pihak asing tentu tak sepenuh hati untuk mau berbagi dan mengajarkan teknologi tinggi.

Karena itu, bangsa ini yang harus memiliki semangat belajar dan rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menguasai teknologi eksplorasi migas. Semoga nasionalisasi migas bisa dicapai. Dengan demikian, kekayaan migas di negeri ini dapat sepenuhnya untuk kemajuan bangsa ini. ■

20

6 OPINI

Mengabaiakan Proses

■ S SAHALA TUA SARAGIH

Dosen Prodi Jurnalistik Fikom Unpad Jatinangor

Bila tak ada aral melintang, setahun lagi kita memiliki presiden baru. Kurang lebih tiga bulan kemudian, kita juga mempunyai menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) yang baru. Seperti kita ketahui bersama, sejak pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, hingga kini pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi) selalu dijadikan komoditas politik oleh pemerintah dan DPR.

Tidak aneh bila di tengah-tengah masyarakat kita selama ini terkenal ungkapan sinis, ganti presiden ganti mendikbud, ganti mendikbud ganti pula kurikulum. Setiap kali terjadi pergantian kurikulum, para guru, siswa, dan orang tua siswa menjadi korbannya. Guru dipaksa menjadi objek pendidikan. Para siswa yang juga diposisikan sebagai objek pendidikan wajib pula mengikuti setiap kurikulum baru.

Mulai Senin (15/7), bertepatan dengan hari pertama tahun ajaran baru (2013/2014), sebanyak 6.325 SD, SMP, SMA, dan SMK di 295 kabupaten dan kota yang tersebar di 33 provinsi mulai menerapkan kurikulum terbaru. Kurikulum tanpa nama ini menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang baru diberlakukan sejak 2006. Ini berarti mulai tahun ajaran baru ini di sebagian besar mutlak sekolah tetap menerapkan kurikulum 'tradisional' sedangkan di sebagian kecil sekolah menerapkan kurikulum 'modern'.

Muncul pertanyaan, bagaimana kelak guru-guru menyusun materi evaluasi (ujian sekolah) dan ujian nasional (UN)-nya? Apakah materi evaluasi semesteran dan UN buat siswa yang menganut kurikulum lama berbeda dengan materi evaluasi dan UN buat siswa yang menganut kurikulum terbaru?

Apakah kualitas lulusan sekolah penerap kurikulum 2013 dianggap lebih baik daripada lulusan sekolah pengguna kurikulum lama? Entahlah. Satu hal yang pasti, Kemendikbud lagi-lagi menciptakan diskriminasi sekolah-sekolah di negeri ini.

Bayangkan lagi, buku-buku pelajaran yang sudah selesai dicetak (tapi belum

semua diterima pihak sekolah-sekolah yang ditunjuk Kemendikbud melaksanakan Kurikulum 2013) dibuat dalam tempo sesingkat-singkatnya (tak sampai lima bulan). Padahal, normalnya proses penyusunan satu buku, dari penulisan hingga penataan desain, membutuhkan waktu setidaknya setahun.

Wakil mendikbud mengatakan, sebagian guru sasaran (yang menerapkannya langsung di kelas/sekolah) juga baru dilatih (baca: diceramahi) minggu lalu (8-12 Juli). Bayangkan, hanya lima hari. Sebagian guru lainnya baru dilatih di sekolah masing-masing mulai Selasa (16/7). Pelatihan sangat singkat para guru tersebut berbiaya Rp 521 miliar. Dahulu (2006), sebelum KTSP diterapkan, para guru dilatih (bukan diceramahi) selama dua minggu hingga dua bulan.

Dalam pembuatan kurikulum terbaru ini, para guru sama sekali tak dilibatkan. Guru menjadi pelaksanaanya belaka. Dalam era desentralisme (otonomi daerah), ternyata pemerintah pusat (Kemendikbud) masih dikuasai nafsu sentralisme. Kurikulum terbaru ini menuntut para siswa berpartisipasi aktif dalam proses belajar-mengajar. Bagaimana mungkin para guru mau dan bisa memartisipasikan para siswa secara aktif, sementara mereka sendiri pun tak pernah diajak Kemendikbud untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan kurikulum yang tidak/belum tentu mereka pahami itu?

Tampaknya, baru kali ini Kemendikbud mengabaiakan proses normal dalam penyusunan dan pemberlakuan kurikulum. Kemendikbud agaknya menganut paham tujuan menghalalkan cara. Yang terpenting tujuan tercapai, caranya terserah. Soal hasilnya, bagaimana nanti sajalah. Padahal, secara universal, dari dahulu kala lembaga pendidikan selalu mengajar dan mendidik para siswa dan mahasiswa agar berorientasi kepada proses, bukan kepada hasil.

Proses yang baik niscaya akan membuahkan hasil yang baik pula dan sebaliknya. Tentu kita tak ragu akan motif dan tujuan mulia mendikbud. Akan tetapi, sebaik apa pun motif dan tujuan Mendikbud itu dalam membuat dan memberlakukan Kurikulum 2013, bila itu tidak dilakukan dengan proses yang

baik dan benar, pasti hasilnya buruk. Sebagus apa pun bahan mentahnya (dalam hal ini Kurikulum 2013), bila proses pembuatan dan pelaksanaannya buruk, percayalah, hasilnya pun pasti buruk.

Siapa pun tahu kurikulum bukanlah tujuan pendidikan, melainkan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 3), pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pasal 4 (ayat 1) berbunyi, "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."

Agar amanat UU Sisdiknas ini terwujud, para petinggi Kemendikbud harus memberi contoh baik (keteladanan) kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, terutama para siswa dan mahasiswa, bahwa proses (yang baik) jauh lebih penting daripada hasil. Para peserta didik harus dididik dan diajar untuk berorientasi kepada proses (yang baik). Bila berorientasi kepada hasil belaka, para peserta didik tak mustahil menghalalkan segala cara demi tujuan. Ini jelas sangat berbahaya.

Nah, daripada harus mengorbankan para siswa, guru, masyarakat, dan pendidikan nasional, Mendikbud tak perlu merasa malu menunda pemberlakuan Kurikulum 2013. Lebih baik terlambat asal selamat. Masa kekuasaan Mendikbud (M Nuh) tinggal hampir 15 bulan lagi sedangkan masa depan negara dan bangsa ini masih sangat panjang.

Semoga pemerintah, DPR, dan DPRD hasil Pemilu 2014 berhenti mengomoditaspolitikkan pendidikan nasional. Ini sangat penting agar pendidikan kita tidak tertinggal semakin jauh oleh negara-negara jiran kita. ■

21

Menstabilkan Harga Pangan Pokok

■ SUGIYONO MADELAN
Peneliti Indef

Harga daging sapi meningkat meskipun hasil survei yang dilakukan BPS menunjukkan terjadi peningkatan jumlah populasi sapi potong daripada periode 2000-2011. Jumlah ternak sapi potong pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 14,8 juta ekor.

Keyakinan untuk mencapai swasembada daging semula sedemikian besar sehingga pemerintah mengurangi jumlah impor daging sapi. Akan tetapi, kenaikan harga daging sapi yang dianggap tidak wajar itu tetap terjadi bukan hanya sebelum kenaikan harga BBM, bulan puasa, dan seminggu setelah awal puasa. Ketidakstabilan harga daging sapi tersebut telah menimbulkan keraguan terhadap optimisme tentang data kecukupan pasokan daging sapi.

Terungkapnya kasus suap kuota impor daging sapi pun dan operasi pasar daging sapi oleh BUMN PT RNI ternyata tidak langsung mampu menurunkan harga daging sapi eceran. Sementara itu, pedagang daging sapi bertindak kurang bekerja sama untuk menyalurkan daging sapi impor.

Bersamaan dengan itu pula, dari sisi pengeluaran konsumsi untuk daging dijumpai data yang mengejutkan. Harga daging sapi menjadi lebih mahal, diikuti oleh penurunan pangsa pengeluaran konsumsi daging per kapita per bulan secara bertahap dari 2,85% pada tahun 2004 menjadi 2,26% bulan September tahun 2012.

Dari 14,8 juta ekor sapi potong tersebut, sapi yang dipotong pada tahun yang sama berjumlah sebesar 1,5 juta ekor. Keberadaan jumlah sapi yang dipotong se-

banyak 10 persen itu semula juga dijadikan penjeles tentang mengapa harga daging sapi masih tinggi.

Berdasarkan pengamatan pandangan mata secara langsung di Provinsi Gorontalo minggu ini, memang secara mudah dijumpai banyak sapi yang sedang makan rumput di tepi jalan, yang dapat memperjelas makna rasio sapi potong yang dipotong sebanyak 10 persen itu. Rasio 10 persen itu juga menepis anggapan jumlah sapi lokal yang dianggap banyak, sehingga sebagian orang menolak rencana impor daging sapi untuk menormalkan harga daging sapi.

Penjeles lainnya adalah sapi bakal-an akan lebih layak apabila sapi potong tersebut dipotong untuk memperingati Idul Adha dibandingkan pada periode sebelumnya. Dugaan lainnya adalah terdapat kartel pangan yang sedemikian kuat, sehingga rencana pemerintah mempercepat impor daging dan operasi pasar tidak cukup menggetarkan hipotesis adanya kartel pangan.

Badan hukum ternak besar dan kecil di Indonesia berjumlah sebanyak 183 perusahaan pada tahun 2011, sehingga informasi jumlah perusahaan daging sapi kurang jelas. Dari jumlah 183 perusahaan, sebanyak 127 perusahaan berupa PT/CV/firma dan berdasarkan modalan PMA sebanyak 7 perusahaan. Dengan struktur usaha formal yang seperti itu, maka dugaan adanya kartel pangan memerlukan pembuktian yang kuat guna membuktikan adanya pelanggaran pada Undang-Undang Persaingan Usaha. Adanya indikasi keterkaitan antara satu perusahaan dengan anak perusahaan telah menambah informasi, meskipun be-

lum cukup menjelaskan tentang adanya potensi persekongkolan untuk menentukan harga daging sapi.

Fleksibilitas harga

Estimasi elastisitas jumlah penawaran daging sapi terhadap daging sapi jangka pendek sebesar 1,06, sehingga koefisien fleksibilitas harga sebesar 0,94. Untuk menurunkan harga daging sapi eceran sebesar 20 persen, maka diperlukan pasokan daging sapi sebanyak 0,94 x 20 persen x 1,5 juta ekor x 0,23 rasio daging terhadap jumlah sapi yang dipotong yaitu 64.860 ton.

Jadi sebenarnya, apabila pemerintah akan mengimpor 84 ribu ton daging sapi untuk sepanjang tahun 2013, maka masuk akal apabila harga daging sapi eceran belum turun sebesar 20 persen. Sementara itu, elastisitas jumlah permintaan daging ayam ras terhadap harga daging sapi jangka pendek bersifat tidak elastis sebesar 0,56 di Indonesia.

Setiap 1 persen kenaikan harga daging sapi meningkatkan 0,56 persen jumlah permintaan daging ayam ras. Ketidakelastisan tersebut menjelaskan tentang mengapa ketika harga daging sapi meningkat, kemudian konsumen yang berpindah dari mengonsumsi daging sapi ke daging ayam juga menghadapi kenaikan harga daging ayam.

Kondisi tersebut merupakan implikasi atas peningkatan jumlah permintaan daging ayam, terlebih data pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk total daging di atas menurun. Dengan menggunakan elastisitas di atas pada komoditas makanan pokok yang lainnya, akan memperjelas berapa kebutuhan penambahan pasokan. ■

22

6 OPINI

Stok Penyangga Pangan

■ HARIANTO

Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi

Dalam beberapa tahun terakhir ini kebijakan pemerintah melalui stok penyangga diterapkan untuk perdagangan hasil pangan strategis seperti beras. Latar belakang utama timbulnya kebijakan pemerintah tersebut karena komoditas beras di pasar dalam negeri selalu menghadapi problem ketidakstabilan harga pasar.

Stok penyangga kembali menjadi topik berbagai surat kabar di Jakarta. Kali ini yang menjadi sorotan adalah komoditas pangan strategis lainnya, yaitu daging sapi. Tingginya harga daging sapi di pasar dalam negeri memaksa pemerintah untuk turun tangan dalam mengontrol daging sapi. Menjadi pertanyaan adalah, apakah kebijakan stok penyangga oleh pemerintah sesuai untuk stabilisasi harga daging sapi?

Pelaksanaan stok penyangga pada prinsipnya memanfaatkan salah satu hukum ekonomi, yaitu bagaimana mengatur jumlah penawaran untuk disesuaikan dengan naik-turunnya permintaan sehingga harga suatu komoditas dapat dikendalikan. Caranya, pemerintah menetapkan harga acuan komoditas tertentu pada waktu tertentu. Harga acuan yang dikehendaki sudah memperhitungkan keuntungan petani atau peternak, daya beli konsumen, margin keuntungan pelaku pasar, dan harga komoditas di pasar dunia.

Penawaran kemudian diatur sedemikian rupa melalui pelepasan stok untuk mendukung harga yang dikehendaki pemerintah. Apabila jumlah penawaran tidak mencukupi permintaan pasar, maka stok yang tersedia akan dilempar ke pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya, jika harga turun karena penawaran yang melebihi permintaan, maka stok perlu ditambah melalui pembelian di pasar.

Pemegang stok penyangga harus mengeluarkan dana untuk membeli komoditas apabila terjadi kelebihan penawaran dibandingkan dengan permintaan. Pemegang stok juga menanggung biaya simpan, biaya susut, biaya operasional, biaya investasi, ataupun biaya dalam bentuk risiko usaha pelaksanaan stok. Penerimaan akan diperoleh jika permintaan pasar melebihi jumlah yang ditawarkan, yaitu saat harga membumbung tinggi sehingga stok yang tersedia perlu dilempar ke pasar untuk menstabilkan harga.

Mekanisme pengoperasian stok penyangga bukan merupakan suatu hal baru bagi perdagangan dunia dan In-

donesia. Perdagangan gula dan karet, misalnya, sudah melaksanakan sistem tersebut sekitar awal tahun 1970-an. Demikian pula Bulog juga mempunyai fungsi sebagai badan penyangga stok terhadap sembilan komoditas pokok di masa lampau.

Dan dalam masa sekarang pun, Bulog ditugaskan pemerintah untuk melakukan stok penyangga terhadap satu komoditas pangan strategis, yaitu beras. Berdasarkan pengalaman masa lalu, ternyata tujuan dan mekanisme stok penyangga dalam jangka panjang menghadapi berbagai permasalahan. Sedikitnya ada enam permasalahan yang dihadapi dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Masalah pertama, stok penyangga tidak selalu sesuai dilaksanakan untuk semua komoditas pangan. Dalam mengoperasikan stok penyangga diperlukan persyaratan khusus seperti komoditas harus tahan lama, biaya penyimpanan harus rendah, tidak kambah. Persyaratan ini membuat komoditas seperti buah-buahan dan sayuran kurang memungkinkan melaksanakan sistem ini dengan efisien.

Masalah kedua, menyangkut kemudahan pengadaan stok penyangga yang bersumber dari impor. Saat harga komoditas yang diimpor sangat rendah, biasanya negara-negara konsumen dengan relatif mudah mendapatkan komoditas untuk stok penyangga. Sebaliknya, pada waktu harga komoditas relatif tinggi, negara-negara konsumen akan mendapat kesulitan memperoleh komoditas.

Pembiayaan pengoperasian stok penyangga merupakan suatu masalah lain yang cukup rumit. Pengalaman sebelumnya menunjukkan pengoperasian sistem ini memerlukan biaya yang tinggi. Hal ini tecermin dari biaya apabila stok penyangga semakin meningkat berarti semakin besar biaya penyimpanan.

Dalam pengoperasian stok penyangga, ide penentuan harga yang ditetapkan pemerintah haruslah berdasarkan harga yang tidak saja menjamin efisiensi, tetapi juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan yang lebih adil. Satu masalah dari sistem ini, biasanya produsen atau penjual dalam negeri cenderung mengusulkan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar.

Akibatnya, pengelola stok penyangga akan membeli komoditas yang lebih besar daripada yang seharusnya. Sehingga, dalam jangka waktu tertentu, stok akan menumpuk dan biaya naik. Apabila keadaan ini terus berlangsung, maka pemegang stok akan menghadapi kesulitan likuiditas dan pada akhirnya sistem

ini akan ambruk.

Masalah lainnya yang cukup mendasar adalah struktur kapasitas sistem ini sendiri. Stok penyangga diadakan untuk menghadapi situasi di mana kapasitas produksi dalam negeri komoditas tertentu dapat diserap oleh pasar pada harga sewajarnya. Apabila ditemukan kapasitas produksi terlalu banyak dibandingkan dengan kapasitas pasar yang dapat menyerap produksi, maka sistem ini tidak dapat berjalan dalam jangka panjang. Dalam kondisi demikian, yang diperlukan adalah manajemen ekspor yang lebih baik.

Siapa yang mengelola stok penyangga merupakan isu yang menarik. Pengelolaan stok dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, tetapi ada *trade off* antara stok yang dilakukan pemerintah dan yang dikelola swasta. Peningkatan stok pemerintah tampaknya akan menimbulkan pengurangan stok sektor swasta karena mereka dapat memperoleh komoditas dari stok pemerintah. Dengan demikian, pengurangan stok swasta akan menimbulkan pengaruh terhadap stok pemerintah.

Pengelolaan stok komoditas strategis, dalam rangka stabilitas harga, yang menyangkut hajat kehidupan masyarakat (produsen dan konsumen) biasanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga/badan yang ditunjuk pemerintah. Asumsi dari kebijakan ini adalah pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruhnya, tidak hanya memihak salah satu pelaku pasar (produsen, konsumen, atau pedagang).

Di beberapa negara maju, pengelolaan stok untuk stabilisasi harga, dikelola oleh asosiasi produsen. Tujuan pengelolaan stok oleh asosiasi produsen ini lebih kepada mencegah merosotnya harga yang diterima oleh produsen komoditas. Oleh sebab itu, untuk kasus Indonesia, pengelolaan stok penyangga memang lebih tepat dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.

Dalam jangka pendek, stok penyangga memang memberikan kestabilan harga komoditas tertentu. Untuk pasar daging sapi dan beberapa produk hortikultura (cabai dan bawang) yang harganya meningkat tajam akhir-akhir ini, stabilisasi harga dalam jangka pendek dapat diperoleh melalui impor. Dalam jangka menengah dan panjang, stabilisasi harga dapat diperoleh melalui peningkatan produksi dalam negeri dan pengelolaan dari sisi konsumsi melalui diversifikasi pangan produk segar dan produk olahan. ■

Presiden Parpol

■ ASEP SUMARYANA

Kepala LP3AN dan Staf Pengajar Ilmu Administrasi Negara FISIP-Unpad Jatijangor

Bila tren pemilih menurun sehingga tinggal 54 persen seperti disampaikan Ketua KPU Husni Kamil di Jakarta (18/7/13), demokrasi yang dianggap bisa terancam. Penurunan itu bisa saja akibat kekecewaan rakyat yang merasa dikhianati sejumlah penyelenggara negara yang parpol *minded*.

Yang dianggap sejahtera bisa jadi parpol tempatnya berasal. Sementara, sebagian besar rakyatnya harus menjadi pelanggan BLT atau BLSM. Bahkan, APBN/D pun digunakan sebagian besar untuk belanja rutin tanpa banyak kreativitas untuk menambah belanja modal.

Jika presiden yang berasal dari parpol menyejahterakan parpolnya lebih dahulu, sejumlah parpol yang mengusung ketua umumnya dikhawatirkan akan menunjukkan perilaku yang sama dengan ketua parpol yang berkuasa. Padahal, presiden bukanlah presidennya parpol, melainkan yang bertanggung jawab terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah untuk dilindungi, dicerdaskan, dan di sejahterakan sesuai pesan pembukaan UUD 1945.

Bisa jadi mengusung ketua umumnya menjadi calon presiden merupakan paradigma lama. Hal demikian muncul akibat ketidakpercayaan kepada pihak lain akan potensinya. Padahal, dari 250 juta anak bangsa, pastilah tersedia calon bernas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, serta *personality* (Sulistiyani, 2008) untuk bisa dijadikan presiden. Ditambah dengan integritas kebangsaan yang baik, maka calon presiden pun masih bertebaran di luar penguasa parpol.

Mungkin juga, sejumlah elite parpol berpikir, jika parpolnya yang terbaik dan rakyat yang menjadi konstituennya, perlu mendapat perhatian lebih utama ketimbang rakyat yang tidak memilih kader dari parpolnya. Hal seperti ini sudah pula ketinggalan karena Denhardt (2004) sudah mendeklarasikan jika dalam *new public service*, rakyat tidak

lagi dikerangkeng dengan konstituen ataupun konsumen, tapi sudah ditempatkan sebagai *citizen*. Berarti, siapa pun rakyat Indonesia, semuanya perlu mendapat perlakuan yang sama.

Mengikuti alur pikir Denhardt, bisa jadi presiden pun tidak harus diusung oleh parpol tertentu. Mungkin akan bijaksana bila sejumlah upaya penjarangan calon presiden yang dilakukan sejumlah parpol membuka peluang bagi siapa pun figur yang pantas diusung untuk menjadi presiden.

Dengan demikian, tidak lagi bicara parpol, etnis, golongan, atau mungkin sentimen tertentu. Untuk itu, menjadi tanggung jawab parpol terhadap bangsanya untuk menelusuri sejumlah figur agar dipertimbangkan menjadi calon presiden 2014 yang akan dipilih rakyat.

Kesadaran baru

Kesadaran seperti itu membuka lembaran baru dalam seleksi calon presiden yang tidak hanya bertumpu pada sentimen keparpolan, tetapi berangkat dari tanggung jawabnya untuk menawarkan calon pemimpin yang kredibel. Oleh karena itu, calon pemimpin yang baik untuk bangsa ini bisa tidak tersedia pada parpolnya.

Hal yang penting, menurut Moelyono (2004), bahwa pemimpin harus memiliki pandangan jauh ke depan (*vision*) untuk memajukan bangsa ini. Dengan pandangan tersebut, bangsa ini akan dibangun menjadi bangsa mandiri yang tidak dapat didikte bangsa lain.

Visi saja tidaklah cukup, diperlukan pula kemampuan membuat *value* yang berasal dari nilai keagamaan serta budaya yang ada. Kearifan lokal dapat dikembangkan dalam tatanan ini. Mungkin saja ketimpangan yang terjadi pada bangsa ini karena terlalu banyak serapan nilai asing yang dicangkokkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa didahului kajian mendalam akan kecocokan nilai tersebut dengan kehidupan bangsa ini.

Tidak heran jika sejumlah tata kehidupan menjadi oleng karena sebagian nilai yang digunakannya diadopsi dari nilai asing. Para pemimpin patut mengoptimalkan *internal value* agar bangsa ini tidak dianggap miskin dengan nilai luhur kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Kesadaran baru dari calon presiden harus tumbuh, bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah yang digadaikan kepada bangsa lain, melainkan kekayaan nilai yang terpendam dan berserakan dalam kehidupan bangsa ini untuk diikat dan dijadikan kekuatan moral bangsa ini. Dengan *value* yang dimiliki, bisa jadi korupsi pun akan dibencinya karena identik dengan mencuri dan merampok.

Untuk mewujudkan *vision* dan *value*, diperlukan *courage*. Ketika tumpuan pada *value*, *courage* pun akan mendapat dukungan rakyat banyak. Tidak setiap figur pemimpin memiliki *courage* karena sejumlah pertimbangan, maka *courage* pun berubah menjadi *borongan* (melucu sendiri), gamang, atau lempar batu sem-bunyi tangan.

Suasana pun berubah menjadi *chaos* karena pengendalian terhadap aparat bawahannya menjadi melemah. Dampaknya, rakyat kehilangan perutusan yang dipercaya memimpin bangsa ini sehingga memperkecil keinginannya untuk terlibat dalam pemilu.

Mungkin saja keadaan masih dapat diselamatkan dengan upaya parpol untuk mencari mutiara dalam lumpur. Penurunan persentase pemilih 2014 seperti pendapat ketua KPU perlu dijawab parpol dengan upaya mencari figur presiden tanpa mengedepankan egoisme keparpolannya.

Dengan sikap ini, parpol turut berkontribusi menyelamatkan bangsa dari keterpurukan. Langkah parpol untuk tidak mencari calon presiden dari kubunya, bisa menjadi niat mulia untuk mencari figur presiden bagi bangsa ini, bukan presiden untuk parpolnya. ■

24

6 OPINI

Produksi Citra Politik

■ DUDI SABIL ISKANDAR

Dosen Fikom Universitas Budi Luhur, Jakarta

Dalam 10 hari terakhir, publik disugahi enam hasil survei politik. Tema yang diusung berkisar elektabilitas partai politik dan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014. Keenam lembaga tersebut adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indonesia Research Centre (IRC), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institute for Transformation Studies (Intrans), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan terakhir Pusat Data Bersatu (PDB).

Sudah pasti terjadi perbedaan dari hasil survei. Bahkan, perbedaan hasil survei mereka sangat mencolok. Misalnya, hasil survei LSN dan IRC tentang elektabilitas Partai Gerindra. Menurut LSN, Gerindra dipilih 13,9 persen responden dan berada di urutan ketiga di bawah Partai Golkar dan PDIP. Di sisi lain, hasil survei IRC, Gerindra, hanya memperoleh 6,6 persen suara responden dan berada di posisi keempat di bawah PDIP, Golkar, dan Demokrat.

Karena banyak perbedaan mencolok ini pula, banyak tokoh partai yang menolak berbagai hasil survei. Aktivis Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, Ketua Umum PKPI Sutiyoso dan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy serentak menolak hasil survei yang terkadang menempatkan partai mereka di posisi bawah.

"Seringnya publikasi berbeda-beda dari survei yang dilakukan pada periode *sampling* yang sama menjadikan hasil survei seperti sampah informasi yang memenuhkan ruang informasi publik," kata Romahurmuziy (*Republika*, 17/7). Pertanyaannya, bagaimana kita membaca hasil survei-survei tersebut?

Setiap survei pasti memiliki ideologi, tujuan, sumber pendanaan, metodologi, dan kepentingan berbeda. Karenanya, wajar jika hasilnya berlainan pula. Survei yang semula bertujuan mendapat kebenaran dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan berbelok (dibelokkan?) menjadi partisan dan memihak

parpol atau kandidat tertentu, contohnya.

Untuk tujuan dan metodologi survei, nyaris semua pengelola lembaga survei mengemukakan alasan. Untuk kepentingan, rata-rata mereka menjawab remang-remang. Sementara itu, yang pasti tidak pernah dikemukakan adalah asal muasal dana. Karena sumber pendanaan selalu disembunyikan, sudah bisa dipastikan bahwa mereka memiliki agenda tersembunyi (*hidden agenda*). Padahal, dalam sekali survei bisa dipastikan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seorang sumber mengungkapkan, rata-rata membutuhkan Rp 600 juta per survei.

Citra politik

Dalam negara yang menganut sistem politik demokratis, citra dan pencitraan sangat penting. Hal ini disebabkan hadirnya persaingan atau kompetisi. Dalam demokrasi, tidak penting suara siapa (kualitas) yang mendukung. Yang terpenting dan menentukan adalah suara mayoritas (kuantitatif).

Dalam konteks ini, sosok calon di mata pemilih menjadi faktor penentu. Pemilih akan memberikan suaranya kepada yang dikenal, baik, dan membela kepentingannya. Oleh sebab itu, dalam dunia politik di negara demokratis yang terpenting dikenal publik, bukan moralitas pribadi atau kendaraan politik. Makanya, di negara demokratis seperti di negara kita, popularitas yang dihasilkan oleh media massa merupakan faktor kunci meraih pencitraan.

Menurut pakar komunikasi politik, Anwar Arifin (2011), citra dapat didefinisikan konstruksi atas representasi dan persepsi khalayak terhadap individu, kelompok, atau lembaga yang terkait dengan kiprahnya di masyarakat. Sedangkan, pencitraan berarti proses pembentukan citra melalui proses yang diterima oleh khalayak, baik secara langsung maupun melalui media sosial atau media massa.

Karena itulah citra berkaitan dengan empat hal. Yakni, (1) representasi di mana citra merupakan cermin realitas;

(2) ideologi di mana citra menyembunyikan dan memberi gambaran yang salah tentang realitas; (3) citra menyembunyi bahwa tidak ada realitas, dan (4) citra tidak memiliki sama sekali hubungan dengan realitas apa pun.

Jika ditautkan dengan politik, citra bisa diartikan gambaran seseorang tentang politik. Dunia politik berkaitan dengan kekuasaan, otoritas, pengaruh, dan kerja sama, konflik, dan konsensus. Citra politik memiliki makna tidak menggambarkan sesuatu yang sebenarnya.

Dengan demikian, sesungguhnya pencitraan bukan gambaran sejati dari sosok yang dicitrakan. Apalagi, pencitraan yang dihasilkan media massa. Sebab, berita yang diterima dan memengaruhi khalayak bukan realitas yang sebenarnya. Ia menjadi realitas buatan atau realitas kedua (*second hand reality*). Bahkan, berita merupakan realitas bayangan (*shadow reality*). Realitas yang tidak memiliki jiwa.

Dalam konteks citra dan pencitraan politik itulah sesungguhnya lembaga survei sedang memproduksi realitas politik buatan atau realitas politik semu (*politic pseudo-reality*) yang memiliki ideologi tertentu. Kasus kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2009 dan kesuksesan pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 yang gagal diprediksi berbagai survei merupakan bukti sah bahwa survei menyimpan agenda dan kepentingan tersembunyi.

Sebagai catatan akhir, penulis ingin menegaskan bahwa citra politik di negeri ini adalah segalanya. Karena itu, produksi citra politik yang dihasilkan melalui survei—baik menggunakan metodologi kuantitatif ataupun kualitatif—kemudian menjadi industri yang berorientasi pasar.

Ia membicarakan untung dan rugi, bukan benar dan salah. Ideologi survei adalah modal. Bukan tidak mungkin survei di Indonesia bergantung *wani piro?* (berani bayar berapa). *Walla-hu'alam bish shawab.* ■

Anak dalam Kemiskinan

■ RAZALI RITONGA

Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI

Meningkatnya harga-harga kebutuhan akibat naiknya harga BBM dan menjelang Lebaran dikawatirkan kian menggerus daya beli masyarakat. Pada tahap lanjut, melemahnya daya beli masyarakat itu berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

Pemerintah memang telah mengantisipasi melemahnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga BBM dengan dana kompensasi yang disebut sebagai bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Tapi, jika kenaikan harga-harga itu melebihi kompensasi yang diberikan, potensi meningkatnya angka kemiskinan sulit terelakkan.

Dalam kondisi tersebut, satu hal yang perlu diwaspadai dari melemahnya daya beli masyarakat itu adalah dampaknya terhadap anak-anak. Sebab, anak-anak, terutama dari kelompok hampir miskin umumnya berpeluang lebih besar jatuh miskin dibandingkan orang dewasa.

Tumbuh kembang

Lebih rentannya anak-anak tertimpa kemiskinan, terutama disebabkan kebutuhan mereka lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Kebutuhan anak sifatnya tidak bisa tertunda karena diperlukan untuk menjaga proses tumbuh kembang.

Pada umumnya, kemiskinan orang dewasa (*adult poverty*) berkaitan dengan tidak terpenuhinya pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan, penyebab kemiskinan anak (*child poverty*), selain ketiga aspek tersebut (pangan, pakaian, dan tempat tinggal) juga ditentukan aspek lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.

Lebih jauh, Gordon et al (2003) menyebutkan bahwa kemiskinan anak diakibatkan oleh tidak terpenuhinya minimal salah satu dari delapan dimensi kesejahteraan anak, yaitu pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan, informasi, dan akses terhadap layanan publik. Tentunya, semakin banyak dimensi yang tidak dapat dipenuhi dari kebutuhan anak-anak, semakin parah tingkat kemiskinannya.

Untuk mengetahui tingkat keparahan kemiskinan anak, Gordon et al telah melakukan studi di 46 negara berkembang berdasarkan *proxy* delapan dimensi kesejahteraan anak yang disebutkan tadi. Hasil studi menunjukkan bahwa satu di antara dua anak tidak memperoleh salah satu dimensi kesejahteraan anak dan satu di antara tiga anak tidak memperoleh dua atau lebih dimensi kesejahteraan anak.

Maka, cukup jelas bahwa langkah pengentasan kemiskinan anak menjadi lebih sulit dibandingkan upaya pengentasan kemiskinan orang dewasa. Menurut Heidel (2004), kontribusi penurunan angka kemiskinan terhadap kemiskinan anak hanya sebesar sepertiganya.

Tragisnya, kemiskinan anak umumnya terjadi mendahului kemiskinan orang dewasa. Hal itu bisa dilihat saat pendapatan keluarga menurun, acap kali kebutuhan anak terlebih dahulu yang dikorbankan. Untuk pendidikan, misalnya, tidak sedikit orang tua yang mengurangi jatah biaya pendidikan anaknya atau bahkan menghentikan sekolah anaknya ketika ekonomi keluarga memburuk.

Parahnya lagi, anak-anak yang berhenti sekolah kerap dipaksa terjun ke dunia kerja. Pengalaman krisis 1997, misalnya, menunjukkan seperlima penduduk miskin (setara 20,10 persen) menyuruh anaknya bekerja untuk membantu penghasilan keluarga (BPS, 1998).

Secara faktual, kehidupan anak yang terlilit kemiskinan akan berpotensi mengalami penderitaan sepanjang hidupnya. Kemiskinan anak merupakan bibit tumbuhnya kemiskinan kronis yang sulit untuk dientaskan. Sebab, anak-anak yang terjerembab dalam kemiskinan umumnya mengalami gangguan dalam tumbuh kembangnya, sehingga sulit melakukan kegiatan, terutama kegiatan produktif secara optimal.



Perbesar bantuan

Maka dari itu, dengan mencermati besarnya risiko yang akan terjadi dari keberadaan kemiskinan anak, sepatutnya perlu dilakukan upaya pencegahan sejak dini. Dalam konteks ini, pemberian kompensasi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran keluarga sangat miskin yang memiliki ibu hamil, anak balita, dan anak sekolah tampaknya bisa membantu untuk mengatasi gerak laju kemiskinan anak.

Perlu diketahui bahwa pada 2013 pemerintah tetap melanjutkan PKH dengan kompensasi sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 1,8 juta per rumah tangga bagi 2,4 juta rumah tangga di Tanah Air. Namun, sayangnya cakupan PKH itu masih sangat terbatas karena diperuntukkan bagi keluarga sangat miskin di 167 kabupaten/kota. Padahal, anak dari

keluarga sangat miskin diperkirakan terdapat di hampir seluruh wilayah di 505 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara, dari sisi besaran bantuan kesejahteraan yang diterima anak-anak, terutama anak balita juga dinilai belum cukup memadai, bahkan dibandingkan dengan sejumlah negara yang pendapatan per kapitanya lebih rendah dari Indonesia. Kamboja, misalnya, dengan pendapatan per kapita sebesar 2.095 dolar AS mampu memberikan bantuan kesejahteraan pada anak balitanya sebesar 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara itu.

Adapun Indonesia dengan pendapatan per kapita sebesar 4.154 dolar AS ternyata hanya mampu memberikan bantuan kesejahteraan terhadap anak balitanya sebesar 0,31 persen dari PDB-nya. Sementara, India dengan penduduk terbesar kedua sejangat (1,2 miliar jiwa) mampu mengalokasikan anggaran kesejahteraan untuk anak balitanya sebesar 0,54 persen dari PDB-nya (UK, Save the Children, 2009).

Semua pihak perlu meyakini bahwa setiap sen yang dikucurkan dalam rangka memenuhi kebutuhan esensial anak merupakan investasi untuk perbaikan masa depan anak dan bangsa. Studi di Brasil, misalnya, menunjukkan bahwa peningkatan dua tahun pendidikan bagi anak ketika dewasa akan berpotensi meningkatkan pendapatannya sebesar 18 persen (ICCI, Investing in Children in Latin America and the Caribbean, 2000).

Namun, besarnya bantuan pemerintah untuk kesejahteraan anak belum menjamin kesejahteraan mereka serta-merta meningkat. Peran orang tua dalam mengelola bantuan dengan mendahulukan kepentingan anak merupakan aspek yang turut menentukan kesejahteraan anak.

Karena itulah, peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan guna mencegah terjadinya kemiskinan anak. Selain itu, semua elemen juga harus berupaya secara serius untuk mengentaskan anak-anak yang sudah telanjur terperangkap dalam jurang kemiskinan. ■

26

Cinta Alquran Selamatkan Hidup

■ NASHRUDDIN BAIDAN

Guru Besar Ilmu Tafsir dan Direktur Pascasarjana IAIN Surakarta

Boleh jadi ada yang sinis dan bahkan tidak percaya terhadap judul di atas. Namun, bagi orang yang paham Alquran apalagi yang menghayati dan mendalaminya secara substantif, pasti akan berkata, ungkapan itu benar dan amat logis. Mari kita buktikan kebenaran ungkapan itu dengan mengamati fungsi Alquran dalam kehidupan; baik secara individual, berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Tidak asing lagi bagi kita, umat Islam, sejak diturunkannya Kitab Suci itu lebih dari 14 abad yang silam sudah dideklarasikan ke seluruh dunia bahwa dia adalah penuntun kehidupan umat manusia (QS 2:185) di manapun mereka berada. Itu artinya jika ingin selamat menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini, tidak ada jalan lain kecuali mengfungsikan Alquran secara maksimal dalam realitas keseharian kita. Bagaimana caranya?

Pertanyaan yang mendasar dalam konteks ini ialah benarkah kita telah mencintai Alquran? Kalau jawabannya 'ya', berarti kita punya komitmen kuat menjadikan Alquran sebagai teman hidup kita, teman sejati, sehidup semati, seiya sekata. Di manapun berada, kita selalu bersamanya. Dalam keadaan sakit atau senang, susah atau sulit, sempit atau lapang, dan sebagainya, kita tetap bersama Alquran.

Pendek kata, manakala cinta telah bersemi, apalagi telah terpatri di lubuk hati yang paling dalam di antara dua sosok yang berkasih sayang, di antara habib dan mahbub, maka tidak ada lagi *gap* yang membatasi antara keduanya, apalagi yang memisahkan keduanya. Mereka selalu bersama, berinteraksi, saling senyum, saling bertegur-sapa, satu sama lain. Alangkah indahnya cinta itu.

●●●

Tapi, mari kita merenung sejenak, pe-

jamkan mata lahir dan buka lebar-lebar mata batin (*bashirah*) kita, pandanglah dalam-dalam ke sanubari kita dan bertanyalah kepada diri kita masing-masing, betulkah kamu wahai diriku telah mencintai Alquran? Mengapa kamu tidak bertegur-sapa dengannya sebagai layaknya dua insan yang bercinta yakni dengan membaca dan merenungkan pesan-pesannya?

Tanyakan juga mengapa kamu biarkan dia tergeletak sendirian di rak-rak buku, kedinginan, tanpa kamu temani, kamu sentuh, apalagi kamu peluk dan cium bagaikan kekasih tersayang? Bukankah Ramadhan ini dijuluki Rasul sebagai *Syahrul Qur'an* bulan bermesraan dengan Alquran? Paling tidak kamu bercengkrama, bermesraan dengannya setiap malam dengan bertadarus secara tartil serta memahami bisikan-bisikan hidayah yang diembuskannya ke nuraninya minimal kamu baca satu juz sehingga di akhir Ramadhan nanti kamu pasti khatam satu kali.

Wahai diriku yang malang! Kalau kamu memang mencintai Alquran, mengapa kamu tidak beranjak sedikit pun ketika dia meminta kamu berhenti berbuat maksiat, malah sebaliknya, kamu doyan melakukannya, sehingga korupsi makin menjadi-jadi, kolusimu tidak tanggung-tanggung, bahkan prostitusi kamu lakukan terang-terangan tanpa rasa malu sedikit pun. Masih pantaskah kamu disebut kekasih Alquran atau lebih pantas kamu dijuluki pecundang Alquran?

Tidak hanya itu kawan! kamu pun tidak bersemangat melakukan amar makruf yang dimauinya. Fakir miskin kamu biarkan telantar, pengangguran tidak kamu pedulikan; sehingga mereka terpaksa mencari sesuap nasi ke negeri orang di luar negeri, menjadi TKW, dan sebagainya. Sampai di sana bukanlah mendapatkan kesejahteraan, malah pulang ke kampung membawa penderi-

taan setelah diperkosa oleh majikannya.

Kalaupun sekali-kali kamu ikuti ke-mauan Alquran sebagai kekasihmu, itu pun dibarengi interes-teres pribadi yang konyol. Misalnya kalau mau maju sebagai capres, caleg, cagub, cabub, ca-walkot, atau apa pun posisinya, maka kamu membagi-bagi sembako, perbaikan jalan kampung, sering ke posyandu, bantu masjid, sekolah, majelis taklim, dan sebagainya. Singkat cerita kamu berusaha mendekat kepada rakyat sedekat-dekatnya agar mereka menjatuhkan pilihan kepada dirimu untuk memenangkan pemilihan yang akan diadakan.

Setelah menang, kamu kembali lagi ke habitatmu: tidak peduli dengan mereka. Kemudian setelah 5 (lima) tahun berlalu, kamu pun kembali lagi kepada mereka untuk meminta dukungan, begitulah siklusnya perilakumu. Masih pantaskah kamu disebut cinta Alquran?

Sungguh teramat naif jika kamu masih berani mengaku kekasih Alquran padahal perilakumu sedikit pun tidak mengejutkan rasa cinta itu. Malah sebaliknya terkesan merongrong dan menghalanginya, bahkan secara faktual tampak menanamkan kebencian terhadapnya.

●●●

Apabila bangsa kita benar-benar mencintai Alquran dalam arti yang sesungguhnya dan dari lubuk hati yang paling dalam, maka tidak diragukan lagi, bangsa ini pasti bangkit kembali dan akan meraih kemajuan yang amat pesat di masa mendatang. Hal itu dimungkinkan karena tidak akan ada lagi kejahatan; baik kejahatan moral, kejahatan ekonomi, maupun kejahatan kemanusiaan.

Itulah inti tuntunan Alquran. Jadi, benarlah ungkapan, "Cinta Alquran selamatkan hidup." Demikian sekelumit renungan dalam memperingati malam Nuzul Alquran. ■

6 OPINI

Prahara Harga Pangan

KHUDORI

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)

Ritual kenaikan harga menjelang Ramadan kembali berulang. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kehadiran bulan suci bagi umat Islam itu selalu diiringi melentiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tetapi instabilitas harga tak bisa dijinakkan, bahkan kini menjadi rutinitas tahunan.

Tak terhitung sumber daya yang tergerus. Bangsa ini kehabisan waktu, tenaga, dan biaya besar untuk mengatasi hal-hal rutin saat puasa yang mestinya bisa diselesaikan dengan cara cerdas.

Penyebab kenaikan harga pangan sebetulnya sudah diketahui dengan baik oleh pemerintah. Penanganannya, mestinya, jauh lebih mudah. Pertanyaannya, mengapa masalah ini selalu berulang? Ini terjadi karena pemerintah tidak pernah mau menyentuh akar persoalan.

Solusi yang dilakukan hanya menyentuh level permukaan. Contohnya, pemerintah amat sibuk mengurus pasokan. Pemerintah yakin, saat pasokan memadai harga akan stabil. Tapi, pemerintah lupa pasokan yang memadai tak berarti apa-apa bila distribusi macet dan ada pelaku dominan serta pemburu rente yang berulah nakal.

Penyebab instabilitas harga pangan bersifat struktural. Tanpa menyentuh masalah struktural itu, instabilitas selalu berulang. Pertama, dominasi orientasi pasar kebijakan pangan. Banyak komoditas pangan, termasuk kedelai, daging, dan bawang, diserahkan mekanisme pasar.

Kalaupun diatur hanya waktu dan kuota impor. Orientasi ini tak salah kalau infrastruktur sudah baik, petani sejahtera, dan pendapatan konsumen sudah pejal pada guncangan pasar. Kenyataannya, ketiga persyaratan itu belum terpenuhi.

Kedua, konsentrasi distribusi sejumlah komoditas pangan di tangan segelintir pelaku. Orientasi pasar membuat swasta leluasa mengambil alih kendali tata niaga. Jalur distribusi yang konsentris dan oligopolis ini terjadi pada dua sumber pasokan pangan: produksi domestik dan impor. Ini terjadi hampir pada semua komoditas yang volume dan nilai impornya amat tinggi, seperti gandum, gula, kedelai, beras, jagung, daging, tak terkecua-

li bawang (putih). Bisnis impor ini bahkan sudah menjadi *political rent-seeking*.

Ketiga, instrumen stabilisasi amat terbatas. Sejak Bulog mengalami 'setengah privatisasi' menjadi perum, praktis kita tidak memiliki badan penyangga yang memiliki kekuatan besar menstabilkan pasokan dan harga pangan. Bulog yang dulu amat perkasa, mengurus enam pangan pokok dan mendapatkan berbagai *privilege* kini semua itu telah dipreteli.

Kini Bulog hanya mengurus beras, itu pun dengan kapasitas terbatas. Cadangan beras yang dikelola Bulog pun amat kecil, rata-rata tujuh-delapan persen. Dengan kondisi seperti itu, Bulog tidak memiliki kapasitas besar untuk mengintervensi pasar saat terjadi gejolak.

Dalam stabilisasi kebutuhan pokok, Malaysia jauh lebih baik. Malaysia memiliki *The Price Control Act* untuk mengontrol harga barang-barang yang kebanyakan berupa makanan sejak 1946. Juga ada *The Control of Supplies Act* yang berlaku 1961. Undang-undang ini mengatur keluar-masuknya barang di perbatasan.

Dalam UU itu harga 225 kebutuhan sehari-hari warga dan 25 komoditas dikontrol pada hari-hari besar. Ada pula Majelis Harga Negara yang bertugas memonitor harga barang, menerima keluhan masyarakat, dan mendukung cadangan pangan nasional. Ditopang *beleid* yang komprehensif dan kelembagaan yang kredibel, inflasi di Malaysia bisa ditekan rendah.

Keempat, absennya kelembagaan pangan. Sejak Menteri Negara Urusan Pangan dibubarkan pada 1999, tidak ada lagi lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan mengarahkan pembangunan pangan. Otonomi daerah membuat produksi pangan domestik diurus daerah.

Padahal, elite daerah tak menjadikan pertanian dan pangan sebagai *driver* pencitraan. Bahkan, peta jalan swasembada pangan dari pusat diterjemahkan beragam oleh daerah. Mustahil berharap inovasi pembangunan pertanian-pangan lahir dari daerah. Ini semua memperparah kinerja produksi pangan domestik.

Hasil akhir jalinan empat faktor itu membuat kinerja produksi pangan domestik merosot diiringi melonjaknya pangan impor. Pada 2012, nilai impor pangan mencapai Rp 63,9 triliun, horti-

kultura Rp 12,9 triliun, dan peternakan Rp 15,4 triliun. Peningkatan impor terbesar terjadi pada subsektor pangan.

Saat krisis pangan meledak pada 2003, defisit subsektor pangan baru 3,178 miliar dolar AS, tahun 2011 defisit meledak lebih dua kali lipat (6,439 miliar dolar AS). Nilai impor paling besar disumbang gandum, kedelai, beras, jagung, gula, susu, daging dan bakalan sapi, aneka buah-buahan, dan bawang putih.

Saat ini Indonesia bergantung pada impor 100 persen untuk gandum, 78 persen kedelai, 72 persen susu, 54 persen gula, 18 persen daging sapi, dan 95 persen bawang putih. Sebagian besar diimpor dari negara-negara maju. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda ketergantungan akut impor itu menurun. Padahal, permintaan pangan terus melonjak.

Laju permintaan pangan di Indonesia 4,87 persen per tahun. Agar kecukupan pangan tercapai, laju suplai pangan harus lebih besar dari permintaan. Artinya, laju suplai atau pertumbuhan produksi harus lebih dari lima persen per tahun. Padahal, tidak mudah menggenjot produksi pangan lebih dari lima persen per tahun.

Untuk mengurai berbagai problem struktural itu diperlukan sejumlah kebijakan. Pertama, meningkatkan produksi, produktivitas dan efisiensi usaha tani serta tata niaga komoditas pangan di hulu. Untuk pangan tropis berbasis sumber daya lokal, tak ada alasan untuk tidak swasembada.

Kedua, merevitalisasi Bulog dengan cara memperluas kapasitasnya. Bulog tidak hanya mengurus beras, tetapi beberapa komoditas penting lain disertai instrumen yang lengkap, seperti cadangan, harga, pengaturan impor (waktu dan kuota), dan anggaran yang memadai.

Impor komoditas pangan pokok yang semula diserahkan swasta bisa dikembalikan sebagian atau seluruhnya pada Bulog. Ini akan mengeliminasi kuasa swasta dalam kontrol harga dan mereduksi praktik rente politik. Ketiga, segera menaikan pembentukan kelembagaan pangan, seperti amanat Pasal 126 UU No 18/2012 tentang Pangan. Kelembagaan baru ini diharapkan tak hanya berkuat pada perumusan kebijakan, dan koordinasi pembangunan pangan, tetapi juga menuntaskan prahara harga pangan. ■

Hukum dan Sarana Telekomunikasi

■ AGUS PAMBAGIO

Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen

Telekomunikasi merupakan sektor yang krusial dalam menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pentingnya sektor telekomunikasi untuk pertumbuhan ekonomi disadari oleh pemerintah dan telah dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam setiap rancangan strategis pembagian koridor ekonomi Indonesia dirancangan strategis tersebut, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan telematika merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung pembangunan sektor lainnya.

Selain itu, berdasarkan laporan dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), penetrasi seluler tercatat sebesar 120 persen, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Cina, yang tercatat hanya sebesar 70 persen. Pertumbuhan penetrasi yang pesat ini tentu harus didukung pula dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut Kadin, Indonesia paling tidak membutuhkan dana lebih dari Rp 242 triliun hanya untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Dalam laporan terakhir yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel pada 2011, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum merata, dengan pasokan yang kurang pada daerah pedesaan namun berlebihan pada daerah perkotaan. Kebutuhan ini membuat Pemerintah Indonesia perlu untuk bekerja sama dengan entitas bisnis (baca: pihak swasta) dalam pembangunannya.

Namun, pihak swasta, baik lokal maupun asing, memiliki kesulitan ma-

sing-masing untuk dapat membangun infrastruktur telekomunikasi. Pihak lokal sering kali terbentur persoalan dalam mendapatkan dukungan likuiditas dari perbankan maupun lembaga keuangan disebabkan kelangsungan dan potensi keuntungan dari bisnis ini belum dipercaya.

Di sisi lain, banyak investor dan pemodal asing yang ingin memberikan modalnya untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Namun, tidak sedikit yang urung memberikan bantuan modal karena terganjal persoalan kepastian hukum di negara ini.

Masalah kepastian hukum dalam melakukan bisnis di Indonesia sudah menjadi buah bibir yang terus dilontarkan oleh banyak sekali kalangan pengusaha. Tidak hanya pengusaha, namun pejabat publik di luar negeri pun turut menyatakan kekhawatirannya akan kepastian hukum bagi pengusaha di negeri ini.

Menteri Muda Urusan Luar Negeri Singapura Masagos Zulkifli pernah mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya belajar dari Cina dalam hal menghormati dan memberikan kepastian hukum pada para pelaku bisnis. Sebuah reputasi yang tentunya tidak ingin kita pelihara.

Kasus terbaru yang dapat menggambarkan ketidakpastian hukum di Indonesia adalah kasus Indosat-IM2, di mana mantan dirut IM2 Indar Atmanto dijatuhi hukuman empat tahun penjara beserta denda ratusan juta rupiah, dan IM2 sebagai korporasi juga dikenai denda sebesar Rp 1,3 triliun. Putusan yang mengejutkan bagi para pelaku dan pengamat industri telekomunikasi karena perjanjian kerja sama yang dipersoalkan dinilai tidak melanggar aturan sama sekali oleh lembaga regulator (Kominfo) sedari awal.

Interpretasi aturan yang berbeda antara badan regulator dan penegak hukum inilah yang menjadi kelemahan dalam melakukan investasi di negara ini. Jangan sampai hukum yang sudah benar menjadi membingungkan kala lembaga pemerintah dan lembaga hukum memiliki interpretasi berbeda mengenai hal tersebut.

Jika begitu adanya, siapa yang nantinya berani untuk menanamkan modal untuk industri ini? Ke depannya juga bukan tidak mungkin MP3EI hanya berdiri sebagai wacana strategis karena pelaksanaannya terhambat oleh ketidakpastian hukum yang ada.

Ironisnya, di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur di dalam negeri, pemodal yang mampu justru ada yang menanamkan modalnya di luar negeri untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 2012 lalu, salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia berinvestasi untuk pembangunan ribuan BTS (menara pemancar) di Afrika Selatan.

Hal ini tentu harus menjadi bahan renungan bagi pemerintah, mengapa di luar negeri dan bukannya di Indonesia? Negara ini masih sangat membutuhkan modal untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan potensi usaha di bidang ini juga sangat besar, namun peluang besar seperti itu juga ternyata tidak cukup untuk meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di negeri sendiri.

Terlepas dari kepentingan bisnis para investor, persoalan mengenai kepastian hukum merupakan pekerjaan rumah yang tidak bisa lagi ditunda-tunda. Benang kusut yang telanjur ada harus segera terurai demi tercapainya rencana strategis pembangunan ekonomi nasional yang sudah dibuat oleh pemerintah. ■

29

6 OPINI

Firman Pertama

■ NURMAN KHOLIS

Peneliti Póstitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama

Pada peringatan Nuzul Quran, para penceramah biasanya mengutip firman Allah yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu *iqra*. Perintah membaca ini juga telah tertanam sejak masa kanak-kanak seperti melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Pada 2001 lalu, saya duduk bersebelahan di dalam bis dengan seorang kakek bernama Baharuddin bin Ahmad bin Musanif. Sang kakek yang saat itu berusia 67 tahun itu pernah *mondok* di Tebu Ireng dan Gontor dan meraih Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (UI) dan Master Ilmu Ekonomi dari Oxford University. Dia menempuh SD dan SMP di Amerika. Saat itu dia bertanya, "Dulu Nabi Adam AS dan Siti Hawa, manusia pertama, mengapa keduanya dikeluarkan dari surga?" Saya pun menjawab, "Karena tergoda oleh setan."

Sang kakek selanjutnya mengatakan, "Agar Nabi Adam dan Siti Hawa serta seluruh keturunannya dapat pulang kembali ke surga, Allah memerintahkan seluruh manusia untuk berlindung kepada-Nya dari setan yang terkutuk. Jadi, firman Allah yang pertama untuk Nabi Adam AS dan Siti Hawa, setelah diturunkan ke dunia ini adalah perintah mengucapkan *a'udzu billahi min al-syaithan al-rajim*."

Saya lantas berusaha mencari hadis dan buku sejarah terkait perintah mengucapkan *a'udzu billahi min al-syaithan al-rajim* sebagai firman Allah yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Adam AS sejak diturunkan ke dunia ini. Namun, hingga kini belum saya peroleh.

Saya pun berusaha mencari hadis terkait peristiwa penyampaian firman Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW melalui internet hingga diperoleh beberapa hadis. Salah satunya dari kitab *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Adhim wa as-Sab'i al-Matsani* karya Syihabuddin Mahmud bin Abdullah al-Husaini yang mengutip hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Yang pertama diturunkan oleh Jibril AS kepada Nabi SAW adalah ia berkata, 'Hai, Muhammad *ista'idz!* (mintalah perlindungan!) dan katakan! *Bismillahi al-rahman al-rahim.*'"

Sementara itu, dalam *Tafsir Ibnu Katsir Juz I* memuat hadis dari Ibnu Abbas, "Yang pertama diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad SAW adalah ia berkata,

hai Muhammad *ista'idz!* Nabi pun berkata, *asta'idzu billahi as-sami' al-'alim min al-syaithan al-rajim*. Selanjutnya, Jibril berkata, ucapkan *bismillahir rahmanir-rahim* dan kemudian Jibril pun berkata, *Iqra! Bismi rabbika al-ladzi khalaq. Namun, atsar tersebut gharib dan di dalam sanadnya lemah dan terputus.*"

Syekh Abdul Qadir al-Jailani, dikisahkan dalam kitab *Manaqib* (perjalanan hidup) suatu saat melihat cahaya yang memenuhi ufuk. Dari balik cahaya itu kemudian keluar gambaran tubuh dan memanggilnya, "Hai Abdul Qadir, akulah Tuhan-Mu. Kini, aku katakan kepadamu bahwa semua yang haram aku halalkan bagimu." Beliau pun mengucapkan, *audzu billahi min asy-syaithanir rajim*.

Murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani dan para wali lainnya pun menyebar ke berbagai negeri, salah satunya ke wilayah Nusantara.

Para ulama ini memiliki silsilah transmisi keilmuan tidak hanya kepada beliau juga hingga Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, mereka berguru kepada manusia yang hidup. Mereka tidak hanya mengandalkan benda mati berupa kitab-kitab hadis dan sebagainya.

Kitab-kitab ini dijadikan penunjang untuk menjaga ilmu yang mereka peroleh dan bersumber dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Penyebaran ajaran Islam di Nusantara pun berlangsung semakin pesat terutama di era Walisongo. Mereka pun berusaha agar dakwah yang dijalankan bisa berlangsung dengan damai. Di belahan bumi bagian timur, Nusantara pun berubah menjadi kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim dan bahkan hingga kini terbesar di dunia.

Bisikan setan

Bila berabad-abad sebelumnya Islamisasi tidak dapat dilihat mata hati orang-orang non-Muslim maka sejak abad ke-19, deislamisasi sistem ekonomi tidak dapat dilihat oleh mata hati sebagian besar umat Islam. Deislamisasi tersebut salah satunya melalui penggantian dinar (uang emas) dan dirham (uang perak) dengan uang kertas.

Sejak sekitar satu abad silam umat Islam belum bisa keluar dari krisis moneter yang dikendalikan satu atau segelintir orang yang mengendalikan sistem uang kertas secara internasional. Sejak dinar dan dirham diganti uang kertas, umat Islam tertipu oleh bisikan "pertukaran kertas-kertas kecil bernama dolar dengan sekian ton emas, sekian hektare hutan,

dan sebagainya adalah halal".

Bisikan tersebut terus berbunyi dan berhasil menipu umat Islam dari generasi ke generasi sejak abad ke-19. Sekian hektare hutan di Indonesia yang terdiri berbagai pulau ini pun semakin gundul. Akibatnya, ketika musim kemarau udara terasa semakin panas. Ketika musim hujan, banjir dan longsor melanda di mana-mana hingga mudah dilanda gempa bumi. Hal ini terjadi seiring semakin lenyapnya sekian hektare pepohonan sebagai penyerap air dan cahaya mata hari sekaligus penyangga daratan.

Fakta semakin mundurnya umat Islam tersebut membuat saya teringat ilmu yang diberikan sang kakek lainnya, yaitu agar kembali kepada fikih para ulama sebelum abad ke-19. Saya pun belakangan menyadari rahasia di balik pernyataannya tersebut. Salah satunya karena para ulama sejak abad ke-19 menghalaikan uang kertas hingga dinar (uang emas) dan dirham (uang perak) hilang dari peredaran.

Pada hal, seperti ditulis oleh Des Alwi dalam buku *Sejarah Maluku*, penggunaan uang kertas sebagaimana terjadi di Maluku bermula dari bangkrutnya VOC. Mereka pun memaksa rakyat Maluku agar menerima uang kertas yang mereka cetak sebagai alat tukar. Mereka pun mencambuk rakyat Maluku yang tetap ingin gunakan uang perak hingga memicu meletusnya Perang Pattimura pada 1817.

Pada masa transisi berakhirnya penggunaan dinar dan dirham diganti dengan uang kertas, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1860-1916), salah seorang guru KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari saat sama-sama belajar di Makah telah berusaha mempertahankan kedua mata uang emas dan perak ini sebagai standar pemberlakuan zakat mal. Dalam karyanya, *Raf'u al-Ittibas 'an Hukmi al-Anwath al-Muta'amal biha baina an-Nas*, Syekh Ahmad Khatib mengatakan, uang kertas yang disebut *nuth* disamakan dengan *fulus* sehingga tidak termasuk dalam syaria' zakat.

Pelanggaran syaria' Islam dalam penggunaan uang kertas ini kemudian disadari oleh berbagai tokoh. Salah satunya yaitu Syekh Abdal Qadir as-Sufi yang memerintahkan salah seorang muridnya asal Spanyol, Umar Ibrahim Vaddillo, untuk mengkaji kitab *Al-Muwat'ho* dan kitab-kitab klasik lainnya hingga dinar dan dirham pertama kali dicetak pada era modern ini sejak 1992 dan juga beredar ke Indonesia sejak 1999. ■

30

Anomali Pemicu Cikungunya

■ GENTIO HARSONO

Peneliti Dishidros TNI-AL, Dosen Luar Biasa FPIK Unpad Jatinangor

Epidemi cikungunya kembali menggeliat. Kabar terakhir, angka penderita cikungunya di Kecamatan Cibeber Cianjur mencapai ratusan orang, bahkan di Kecamatan Parungkuda Sukabumi bertambah menjadi 69 orang (*Republika*, 28/6; *Republika*, 16/7). Penyakit mirip gejala demam berdarah oleh virus *Arthropod borne* transmisi gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, kini mengancam penduduk di beberapa wilayah bagian barat Indonesia.

Histori catatan kejadian luar biasa otoritas kesehatan di berapa daerah menunjukkan korelasi positif tinggi antara ledakan jumlah penderita dengan gejala sifat fisis massa air Samudra Hindia yang dikenal Indian Ocean Dipole (IOD). Anomali cuaca yang ditandai intensitas hujan tinggi selama musim kemarau, seperti sekarang telah meningkatkan ancaman terhadap epidemi cikungunya dan epidemi nyamuk lainnya dengan kejadian berulang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Osilasi lautan-atmosfir tropis Samudra Hindia yang terungkap pada akhir 90-an merupakan penggerak iklim global lain yang sebelumnya diketahui sebagai ENSO di Samudra Pasifik. Intensitas IOD digambarkan sebagai gradien anomali suhu permukaan laut antara basin barat ekuator (50E-70E dan 10S-10N) dengan basin timur ekuator (90E-110E and 10S-0N) Samudra Hindia, selanjutnya dinamakan Dipole Mode Index (DMI).

DMI ditandai dengan menghangatnya permukaan laut di salah satu basin kutub dan mendingin di basin lainnya. Saat suhu permukaan laut basin timur menghangat di atas normal, terjadi peningkatan penguapan air yang menyebabkan hujan di atas normal wilayah barat Indonesia dan Australia. Sementara, pantai timur Afrika mengalami kekeringan

akibat pendinginan suhu permukaan laut dengan minimnya intensitas penguapan, kemudian disebut sebagai DMI fase negatif.

Fenomena ini kemudian mengalami kondisi berbalik, di mana suhu permukaan laut basin timur samudra mendingin dan basin baratnya menghangat, menyebabkan wilayah barat Indonesia dan Australia mengalami kekeringan yang selanjutnya disebut DMI fase positif. Proses ini terjadi secara bergantian, mirip dengan sebuah ayunan (osilasi) meskipun periode satu dengan lainnya tidak sama.

Indonesia diapit oleh dua samudra besar, Pasifik dan Hindia. Karenanya, iklim Indonesia terkait erat dengan osilasi kedua basin samudra tersebut, ENSO dan IOD. Intensitas hujan di atas normal dan kekeringan panjang di wilayah kita dikontrol oleh dinamika iklim global tersebut. IOD dapat terjadi secara sendiri atau tidak terkait dengan ENSO, tapi koherensi keduanya dapat menguatkan atau melemahkan lainnya.

Sekarang, pantauan lautan global yang dilakukan Climate Prediction Center, NCEP/NOAA (8/7) menunjukkan IOD masuk pada fase negatif dengan fase ENSO normal yang cenderung menghangat di Pasifik timur. Ini cukup meyakini bahwa faktor primer penyebab anomali cuaca akhir-akhir ini utamanya wilayah Indonesia barat bersumber dari gejala massa air yang ada di Samudra Hindia.

Selama rezim IOD negatif berlangsung, intensitas hujan yang tinggi memberikan habitat optimum dalam proses kawin dan penting pada stadium awal spesies nyamuk tropis, seperti *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Kelembapan tinggi memainkan peran penting dalam daya tahan hidup dan proses penyebarannya.

Riset ilmiah kasus epidemi nyamuk tropis di Indonesia dengan IOD masih sangat langka. Kasus terbaru adalah penelitian oleh Hashizume dan ka-

wan-kawan pada 2012 dalam *Scientific Reports Journal*. Ia menemukan pola hubungan yang kuat antara kejadian ledakan jumlah kematian tinggi akibat malaria *Plasmodium falciparum* yang tidak wajar di dataran tinggi Kericho, Kisii, dan Kapsabet Pantai Timur Kenya Afrika dengan Dipole Mode Index (DMI) saat fase positif antara 1958 hingga 2008.

Kejadian luar biasa ini justru tidak terjadi di wilayah dataran rendahnya, seperti Maseno dan Teluk Kendu yang terhindar dari epidemi ini. Ia meyakini bahwa danau besar Victoria Lake yang berada di dataran rendahnya menjadi faktor lokal mampu menstabilkan dan menjaga pengaruh guncangan variabilitas iklim di basin wilayah ini (IOD).

Di Indonesia, laporan kejadian luar biasa cikungunya pertama kali terjadi di Samarinda dan DKI Jakarta pada 1973. Selanjutnya, pada 1982 di Kuala Tungkal Jambi, setahun kemudian, 1983, melanda Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan berikutnya pada 1999 terjadi di Muara Enim dan Aceh pada 2000. Pada 2001, epidemi ini mewabah di wilayah Jabodetabek.

Pada 2002 banyak daerah melaporkan terjadinya KLB cikungunya, seperti Palembang, Semarang, Indramayu, Manado, DKI Jakarta, Banten, Surabaya, dan lain-lain. Pada 2007 sampai 2012 KLB cikungunya terjadi di beberapa provinsi dengan 149.526 kasus tanpa kematian. Jika diurut kejadiannya, tahun-tahun saat KLB cikungunya terjadi mirip dengan fase kejadian saat DMI mengalami fase negatif dan La Nina.

Belajar dari kasus Kenya, membuktikan bahwa perubahan iklim bukan faktor utama gejala epidemi cikungunya. Justru, perilaku manusia telah menjadi bumerang bagi dirinya. Kini, saatnya semua pihak menjaga lingkungan hidup, menjadikan masalah konservasi di halaman paling depan pemikiran kita. ■

6 OPINI

Deradikalisasi Napi Teroris

IRFAN IDRIS
Direktur Deradikalisasi BNPT RI

Tingginya harapan masyarakat Indonesia terhadap program deradikalisasi bagi narapidana teroris, mantan narapidana teroris, keluarga dan jaringannya yang diprogramkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong banyak pihak berupaya mengetahui, memahami, dan merealisasikan program deradikalisasi meski masih ada pihak yang belum memahaminya. Upaya ini telah diprogramkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Bukan hanya lembaga-lembaga negara yang mempunyai program deradikalisasi seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat memiliki program serupa. Pada intinya deradikalisasi mengarah pada upaya pengurangan tensi radikalisme yang menggunakan segala macam cara yang menjangkiti pada sebagian anak bangsa dan bahkan sekelompok masyarakat yang menggunakan kekerasan atas nama agama.

Yayasan Permata Bangsa dengan Klinik Pancasilanya melakukan dialog setara dengan warga binaan (napi teroris) pada Rabu, 3 Juli 2013, di Lembaga Pemasyarakatan Batu Nuskambangan Cilacap. Banyak warga binaan yang tertarik dengan program dialog setara yang diformat dalam Klinik Pancasila karena dilakukan dalam bentuk permainan, tetapi substansinya menyangkut ideologi bernegara, yaitu Pancasila.

Sementara, sebagian warga binaan teroris menganggap ideologi Pancasila sebagai syirik. Program tersebut melibatkan mereka dalam simulasi yang menghibur warga binaan dan berperan sebagai dokter dan diberi gelaran dokter Pancasila. Direktur Klinik Pancasila Dr Dody Susanto menyiapkan alat simulasi, antara lain, stempel besar yang berukuran 40 cm bertuliskan 'Siap Mengamalkan Pancasila' dan baju praktik dokter.

Fasilitator Klinik Pancasila berperan sebagai pasien yang sedang mengalami krisis pemahaman dan pengalaman sila ketiga Persatuan Indonesia. Saat warga

binaan berperan sebagai dokter sila ketiga, pasien yang diperankan oleh fasilitator Klinik Pancasila berkonsultasi mengenai upaya mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia, layaknya antara dokter ahli THT dan pasien yang sedang mengalami sakit tenggorokan.

Sang dokter yang diperankan oleh warga binaan teroris memberikan saran agar persatuan di atas segalanya. Bentuk NKRI merupakan harga final bagi bangsa Indonesia dan tidak ada lagi pilihan bagi rakyat Indonesia mengubah bentuk negara Indonesia.

Simulasi tersebut berlangsung sangat hidup, dialogis terbuka, dan dinamis. Warga binaan berperan sebagai dokter memberikan solusi sehat kepada pasiennya agar tetap mempertahankan Indonesia sebagai negara republik yang telah diraih dengan kurcun keringat dan tetesan darah serta air mata para pahlawan.

Sekilas simulasi tersebut menggambarkan keterbukaan warga binaan dalam melakukan dialog setara. Strategi dialog setara yang berkesinambungan merupakan cara yang efektif untuk dilakukan kepada para warga binaan, terutama narapidana teroris.

Meskipun masih banyak warga binaan teroris yang tidak mau membuka diri dan pikiran untuk berdialog, tidak sedikit di antara mereka yang sudah membuka diri dan pikiran untuk melakukan dialog. Bahkan, di antara mereka ada yang berharap agar pemerintah memberikan perhatian kepada anak-anak mereka dalam melanjutkan pendidikan serta menyiapkan lapangan kerja bagi istri-istri mereka.

Dody Susanto menegaskan bahwa keberhasilan program dialog setara dengan para warga binaan bila mereka dapat menerima para fasilitator Klinik Pancasila melakukan dialog setara, bukan hasil dialog yang menjadi ukuran keberhasilan, melainkan kesediaan berdialog. Memang tidak semudah membalikkan jari tangan dalam mengubah *mind set* dan pikiran mereka. Namun, sebagai langkah awal dalam melakukan program rehabilitasi dalam hal pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, dialog setara merupakan langkah awal membuka kebekuan cara dan gaya berpikir para warga binaan teroris dalam lapas.

Bagi warga binaan yang telah menerima program dialog setara dan siap mengamalkan Pancasila sangat kooperatif dalam memainkan simulasi tersebut dan mereka berharap agar dialog seperti ini sifatnya berkesinambungan. Namun, bagi mereka yang belum siap menerima dan atau tidak siap menerima dan mengamalkan Pancasila, bagi Dody Susanto, bukan sebuah kegagalan program, melainkan membutuhkan penguatan strategi dan penajaman analisis dalam mendekati warga binaan yang masih sangat radikal.

Upaya pencegahan lahirnya radikal yang berevolusi tumbuh menjadi teroris harus terus digalakkan oleh segenap komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kata salah dalam melakukan dan mengupayakan pencegahan, tapi yang tidak boleh salah adalah salah menindak, salah menangkap, serta salah menembak.

Peran segenap komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat dalam memelihara keutuhan NKRI dan membunikan nilai-nilai Pancasila harus bersinergi dan berintegrasi agar tidak terjadi disintegrasi bangsa yang dapat merontokkan persatuan dalam keragaman serta perbedaan dalam persatuan. Melakukan upaya deradikalisasi bagi warga binaan teroris dalam lembaga pemasyarakatan harus terus digalakkan tentunya dengan kerja sama antarkomponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat.

Deradikalisasi juga dilakukan bagi mantan napi teroris, keluarga, dan jaringannya yang sudah kembali bertobat dan telah berada di tengah-tengah masyarakat. Meski tidak sedikit mantan napi yang kembali menjadi pelaku teroris.

Untuk melakukan upaya deradikalisasi, baik bagi napi teroris maupun mantan napi, keluarga dan jaringannya, tentu tidak cukup bila semua diserahkan kepada negara, dalam hal ini BNPT, sebagai badan nasional yang berperan menanggulangi terorisme serta mengoordinasikan dengan semua pihak. Keterlibatan semua komponen negara dan segenap lapisan masyarakat harus segera diwujudkan dalam *action plan* dan bukan sebatas berargumentasi yang hanya meramaikan banyak media, tapi tidak menyelesaikan masalah kebangsaan. ■

THR Buruh Kontrak *Outsourcing*

■ NINING ELITOS

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)

Menjelang Idul Fitri, salah satu hal yang paling ditunggu adalah pembayaran tunjangan hari raya (THR). Maklum, berbagai harga kebutuhan biasanya melonjak tinggi. Tanpa THR, perayaan Lebaran jelas terancam segala-galanya, mulai dari tidak dapat mudik sampai sekadar menyediakan ketupat dan opor ayam.

Adalah buruh, terutama buruh kontrak dan *outsourcing*, yang pada masa-masa sekarang ini pasti cemas dan khawatir perihal THR. Posisi tidak permanen sebagai pekerja membuat buruh berstatus kontrak dan *outsourcing* kerap terdiskriminasi. Mereka melakukan pekerjaan yang sama dan setara, tapi beberapa hak sering tidak diberikan atau dihalang-halangi, termasuk THR.

Padahal, THR merupakan salah satu hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin peraturan perundang-undangan yang berlaku. THR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Setiap pekerja yang telah bekerja selama tiga bulan terus-menerus atau lebih, baik permanen maupun kontrak/*outsourcing*, berhak untuk mendapatkan THR.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan, pekerja/buruh dengan status *outsourcing* (alih daya), kontrak, atau pekerja tetap, berhak menerima THR. Pada kenyataannya tak sesederhana itu. Menjelang puasa, perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau memutus kontrak kerja tiba-tiba. Anehnya, buruh-buruh ini diminta kembali bekerja selepas Lebaran, yang ternyata merupakan strategi untuk menghindari masa pembayaran THR.

Agar strategi ini berhasil, buruh pun ditakut-takuti tak dipekerjakan kembali jika sampai protes atau melawan. Upa-

ya ini untuk mengakali peraturan yang menyebutkan buruh ter-PHK asal tak lebih dari sebulan sebelum Lebaran tetap berhak mendapatkan THR. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Permenaker No PER-04/MEN/1994 disebutkan bahwa pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan, berhak atas THR.

Pihak pengusaha pun beralih bahwa THR adalah bagian dari ongkos biaya personal. THR dihitung sepanjang tahun yang berarti tambahan ongkos dan kemudian dibebankan pada harga jual produk. Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengatakan, kebanyakan perusahaan adalah pengguna, sehingga yang wajib membayar THR pekerja alih daya adalah penyalurnya. Sebab, si pengguna sudah membayar kepada agen penyalurnya.

Di Jawa Timur, saat ini sudah ada sekitar 3.750 buruh yang mengadukan pemecatan sepihak yang dilakukan perusahaan ke lembaga bantuan hukum (LBH) Surabaya. Pemberhentian tersebut diduga karena ada upaya penolakan membayar THR.

Menurut Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Jamalludin, para buruh ini diminta melamar kembali pasca-Lebaran dan dijanjikan akan diterima. Sebagian besar pengaduan itu berasal dari pekerja *outsourcing* di kawasan industri Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik. Didug ada tujuh perusahaan besar yang melakukan pelanggaran tersebut (*Republika*, 23/07/13).

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Tangerang, Banten, sedang mengadvokasi berbagai kasus PHK di bulan Ramadhan. Ratusan buruh kontrak PT Wingoh Albindo, Kota Tangerang, tiba-tiba di-PHK tanpa alasan jelas.

Secara global, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan 10 juta buruh *outsourcing* terancam tidak diper-

oleh THR karena di-PHK sepihak sebelum H-7 Lebaran. Menurut Said Iqbal, angka 10 juta itu ia dapatkan berdasarkan asumsi 60 persen dari buruh industri merupakan pekerja *outsourcing* dan kontrak. Apabila setengah dari buruh kontrak/*outsourcing* tidak mendapatkan THR, sementara jumlah total buruh berkisar 33 juta orang, maka ketemulah angka 10 juta itu.

Sejauh ini tidak banyak yang bisa dilakukan Kemenakertrans. Peraturan menteri soal THR tidak memuat sanksi, sehingga banyak pengusaha nakal berani tidak membayar THR. Kemenakertrans dan disnaker-disnaker memang secara rutin membentuk Posko THR, namun tak cukup banyak yang mengadu (84 pengaduan pada tahun 2011 dan 28 pengaduan pada 2012).

Mekanismenya, untuk menyelesaikan setiap pengaduan THR, pihak perusahaan yang dilaporkan bakal dipanggil lalu kemudian diadakan pertemuan dan mediasi antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan pembayaran THR. Namun, apabila perusahaan tetap membandel dan menolak membayarkan THR kepada pekerjanya, maka Kemenakertrans bisa menugaskan pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan penyelidikan mendalam dan menyiapkan tuntutan secara hukum ke pengadilan.

Membayangkan mekanisme ini efektif di lapangan sungguh sulit. Birokrasi yang terkenal tidak sigap akan membuat penyelesaian masalah bertele-tele dan memakan waktu melebihi masa Lebaran itu sendiri. Belum lagi bicara soal pemihakan, akan sulit mengandalkan mediator atau pengawas yang dicurigai memiliki tendensi pada salah satu pihak.

Buruh mau tak mau harus berdaya sendiri. Mengandalkan inisiatif pemerintah sama sekali tidak cukup. Banyak serikat yang telah membuka posko-posko THR secara mandiri. Keberadaan posko-posko ini membuka ruang lebar bagi advokasi kasus-kasus THR. ■

33

6 OPINI

Kemitraan Kebijakan Pangan

■ ACHMAD SURYANA

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Ketua APEC PPFS 2013

Pangan dan ketahanan pangan merupakan salah satu isu prioritas bagi komunitas global dan organisasi internasional, termasuk Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di kawasan APEC cukup kompleks dan multi-dimensi. Dari sisi permintaan (*demand*), tantangan bagi APEC adalah adanya kebutuhan pangan yang terus meningkat karena pertumbuhan penduduk di kawasan ini masih relatif tinggi.

Dari sisi penyediaan (*supply*), adanya persaingan pemanfaatan sumber daya alam (lahan, air, perairan) yang lebih ketat lagi pada tahun-tahun mendatang dapat menurunkan kapasitas peningkatan produksi pangan global. Luas pengusahaan lahan per petani di negara berkembang kawasan APEC yang sempit (sekitar 0,22 hektare pada tahun 2012) akan menyulitkan upaya peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Selain itu, perubahan iklim ekstrem juga dapat menurunkan produktivitas pangan utama, seperti beras, gandum, dan ikan.

Masing-masing anggota APEC juga menghadapi persoalan ketahanan pangan yang berbeda-beda. Untuk negara maju anggota APEC seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, ekonomi pangan mereka dicirikan oleh kelebihan penyediaan atau surplus pangan. Bagi sebagian negara berkembang anggota APEC seperti Filipina, Peru, dan Indonesia, bahkan negara maju seperti Cina dan Jepang, tantangan utamanya adalah bagaimana memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan karena produksi dalam negeri belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan.

Menyadari adanya berbagai permasalahan seputar upaya pencapaian ketahanan pangan seperti diuraikan di atas, APEC bersepakat membentuk Policy Partnership on Food Security (PPFS) atau Kemitraan Kebijakan Ketahanan Pangan, yang diresmikan 2012 di Kazan Rusia. Forum PPFS merupakan kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah dengan tugas membahas kebijakan ketahanan pangan di kawasan APEC.

Visi dan strategi

Sesuai dengan acuan kerja PPFS, se-

bagai tuan rumah APEC, Indonesia otomatis menjadi Ketua PPFS. Sebagai ketua, Indonesia mengusung tema PPFS 2013 dan disepakati oleh seluruh anggota PPFS, "Aligning Farmers Into the Achievement of Global Food Security", atau "Menyelaraskan Peran Petani dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Global". Dengan tema ini, Indonesia ingin menempatkan petani, terutama petani kecil, sebagai sentral dari pembangunan ketahanan pangan.

Tahun ini merupakan tahun kedua PPFS, karena itu fokusnya pada perumusan kebijakan strategis. Pada pertemuan di Medan Juni 2013, PPFS menyepakati dokumen APEC "Food Security Road Map toward 2020" atau "Peta Jalan Ketahanan Pangan APEC menuju 2020". Disepakati pula langkah berikutnya adalah menyusun rencana bisnis operasional yang menarik dan memudahkan swasta untuk berinvestasi di sektor pangan, termasuk melaksanakan kemitraan dengan petani pada sepanjang rantai pasokan pangan.

Dalam *road map* tersebut dinyatakan visi PPFS adalah terwujudnya wilayah APEC yang bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi, serta berperan dalam pencapaian peningkatan standar hidup layak secara berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Tujuan jangka panjang PPFS adalah tercapainya struktur sistem pangan yang mempunyai kemampuan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan berkelanjutan.

Ada tiga misi yang diemban PPFS. Pertama adalah mengembangkan sektor pangan yang secara ekonomi efisien dan menguntungkan, secara sosial diterima masyarakat, dan sesuai secara lingkungan. Dalam kerangka kerja PPFS ditegaskan bahwa untuk mencapai hal tersebut diperlukan peran aktif sektor swasta. Karena itu, *public-private partnership* (kemitraan pemerintah-swasta) menjadi pendekatan utama PPFS dalam setiap kegiatannya.

Dengan spirit kemitraan tersebut, misi kedua PPFS adalah meningkatkan produksi dan perdagangan pangan, dan bersama dengan itu memperbaiki pengelolaan cadangan pangan dan menyempurnakan pengelolaan jaring pengaman sosial bagi

masyarakat miskin. Misi ini dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kemajuan pembangunan dan penguasaan sumber daya setiap anggota APEC.

Dengan pemahaman bahwa di sebagian besar anggota APEC sektor pertanian dan perikanan didominasi petani dan usaha skala kecil, serta dengan menyadari kemiskinan dan ketahanan pangan saling berkaitan; misi ketiga PPFS adalah mengupayakan perbaikan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil, serta meningkatkan daya saing mereka dalam memproduksi pangan.

Untuk mencapai ketahanan pangan di kawasan APEC, dalam *road map* PPFS dirumuskan tiga strategi. Pertama, mengembangkan sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan dengan mengacu pada prinsip "memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan pangan generasi yang akan datang." Kegiatan prioritas untuk mewujudkan hal ini antara lain penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mengatasi dampak perubahan iklim serta percepatan diseminasinya; pemberdayaan organisasi petani termasuk penguatan peran wanita tani; dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Strategi kedua adalah memfasilitasi investasi dan pengembangan infrastruktur. Kegiatan yang dijabarkan dari strategi ini mengacu pada prinsip investasi pertanian yang bertanggung jawab, antara lain yang menghargai hak atas tanah dan sumber daya alam, menjamin transparansi dan tata kelola pemerintah yang baik, dan membangun dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Strategi ketiga, meningkatkan peran perdagangan dan pasar. Para anggota APEC meyakini bahwa perdagangan dapat mendukung ketahanan pangan bila kegiatan ini dapat memperbaiki pendapatan para produsen pangan, memperbaiki ketersediaan atau akses pangan bergizi; dan meningkatkan stabilitas harga pangan. Karena itu, APEC PPFS mendukung perdagangan internasional pangan yang dapat meningkatkan pendapatan dengan pembagian manfaat yang lebih berkeadilan bagi para pelaku usaha kecil. ■

Konflik Mesir dan Indonesia

■ HERY SUCIPTO

Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

Sajak dikudeta oleh militer, para pendukung presiden terguling Mesir, Muhammad Mursi, terus melakukan pembelaan dengan turun di jalan-jalan utama negeri itu. Aksi damai puluhan ribu massa itu, yang berlangsung tiap hari, menunjukkan proses inkonstitusional yang dilakukan militer Mesir tidak bisa diterima sebagian besar rakyat Mesir.

Sementara itu, pada saat yang sama, kepala angkatan bersenjata Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sissi, serta pihak istana kepresidenan, menyerukan rakyat Mesir turun ke jalan menentang para pendukung Mursi. Militer meminta mandat rakyat Mesir untuk menumpas apa yang mereka sebut sebagai 'teroris'. Itu ditujukan untuk membasmi para pendukung Mursi dan gerakan Ikhwanul Muslimin (IM), tempat Mursi aktif di dalamnya.

Jalan kehancuran

Seruan militer dan istana itu setidaknya menyiratkan dua hal: Pertama, bentuk kepanikan politik militer dan pemerintah menghadapi perlawanan para pendukung Mursi dan IM. Di satu sisi, militer ingin segera kondisi Mesir segera membaik sehingga pemerintahan sementara di bawah komando Presiden Adly Mansur dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Namun di sisi lain, pencabutan mandat secara tidak sah melalui kudeta tidak diterima para pendukung IM. Mereka menuntut Mursi dikembalikan pada jabatannya sebagai presiden yang sah. Seharusnya, pencabutan secara konstitusional adalah melalui pemilu, karena pemilik mandat sejati adalah rakyat, bukan militer.

Kedua, tindakan militer yang meminta rakyat mendukung mereka untuk

menumpas para pendukung IM, tidak saja semakin menambah rumit dan pelik persoalan yang dihadapi rakyat negeri itu. Akan tetapi, juga menimbulkan polarisasi di dalam masyarakat.

Partai Noor yang berafiliasi dengan gerakan Islam Salafi, misalnya, dan merupakan koalisi dalam pemerintahan Mursi, namun mendukung kudeta, secara tegas menolak ajakan militer. Demikian institusi al-Azhar, yang semula cenderung mendukung kudeta, belakangan justru menolak seruan militer Mesir untuk turun ke jalan, memakai cara kekerasan untuk menghentikan aksi pendukung IM dan Mursi.

Militer Mesir tidak seharusnya mengeluarkan seruan tersebut. Justru seruan itu sama halnya mengobarkan perang saudara dan mengajak rakyat Mesir membawa negerinya menuju kehancuran. Faktanya, hampir setiap hari jatuh korban, bahkan militer semakin telanjang menembak mati para pendukung Mursi, seperti terjadi pada Sabtu dini hari (sebelum Subuh) pekan lalu, sekitar 70 pendukung IM diberondong peluru saat mereka duduk-duduk santai di pinggir jalan.

Para elite Mesir, baik IM, oposisi, maupun militer, seharusnya dapat menahan diri sebagai upaya mencegah negeri itu pada kehancuran. Justru dengan cara kekerasan, bukan saja merugikan Mesir, tapi juga mengundang kekuatan asing untuk 'bermain' memperumit kondisi di negeri itu.

Konflik yang terus memakan korban di Mesir itu sekaligus menunjukkan bagaimana para elite di negeri itu telah membunuh logika politik (*uqul as-siyasah*), yang sesungguhnya memiliki tujuan dan cita-cita menyejahterakan rakyat. Logika politik sebagai sarana mewujudkan kedamaian, keamanan,

dan ketenteraman umum.

Yang berkembang kini justru logika kekuatan (*uqul al-quwwah*), di mana yang kuat, lebih-lebih memiliki senjata, akan dapat sewenang-wenang bertindak dan menindas yang lemah. Dalam logika kekuatan, para elite saling mengerahkan kekuatan, dan lagi-lagi mereka pula yang menjadi korban, sebaliknya para elite tiarap selamat.

Peran Indonesia

Secara historis, Indonesia memiliki hubungan sangat kuat dengan Mesir. Negeri piramid ini pula yang pertama kali mengakui kemerdekaan RI, disusul kemudian negara-negara Arab lainnya. Selain itu, juga sama-sama berpenduduk Muslim terbesar. Dalam konteks ini saja seharusnya Indonesia lebih bisa memainkan peran signifikan dalam mendorong penyelesaian konflik di Mesir.

Pemerintah kita terkesan 'bermain aman', hanya sesekali mengeluarkan imbauan agar para pihak di Mesir dapat menahan diri supaya tidak terjadi aksi kekerasan lebih besar lagi. Langkah maksimal sebenarnya dapat diambil Indonesia. Misalnya, dengan memprakarsai sidang darurat OKI membahas khusus soal Mesir, atau mendorong PBB menurunkan pasukan perdamaian, serta mendorong pembentukan tim investigasi internasional.

Memiliki potensi peran politik luar negeri yang besar, namun tidak ditunjang dengan *grand strategi* yang jelas dan tegas, membuat Indonesia sebagai negara besar tapi tidak diperhitungkan di kancah internasional. Tentu ini pekerjaan besar pemerintahan SBY agar permasalahan politik bebas aktif kita dapat diejawantahkan lebih tegas, berani, dan transparan, bermanfaat bagi terciptanya kesejahteraan dan perdamaian dunia. ■

35

6 OPINI

Esensi Mudik

■ RAKHMAT HIDAYAT

Pengajar Sosiologi Perkotaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kandidat PhD Sosiologi Universite Lumiere Lyon 2 Prancis

Zaman boleh berubah. Teknologi juga terus berkembang. Tetapi, tradisi mudik tak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi apa pun. Bagi sebagian masyarakat, rasanya kurang lengkap jika Lebaran tidak melakukan mudik ke kampung halaman. Bahkan, tidak sedikit warga yang menganggap mudik sudah menjadi kewajiban yang tidak bisa digantikan dengan nilai materi apa pun.

Semua lapisan masyarakat dari masyarakat kelas atas hingga masyarakat akar rumput secara bersamaan melakukan mudik. Menariknya, fenomena ini melewati batas-batas teologis dan etnis. Bukan hanya monopoli umat Islam karena bertepatan dengan momen Lebaran. Durasi liburan yang cukup panjang menjadi keuntungan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan mudik.

Sulit untuk tidak mengatakan mudik melanda seluruh rakyat Indonesia. Gejala ini menunjukkan mudik sudah tertanam kuat dalam realitas sosial kultural masyarakat Indonesia. Mudik merepresentasikan proses sosial yang berlangsung lintas generasi dan diwariskan secara turun-temurun. Semakin lama, mudik menjadi kebiasaan karena menjadi sesuatu yang rutin dilakukan, diharapkan, dan disetujui bersama.

Inilah yang disebut dengan proses pelebagaan (institusionalisasi) mudik dalam masyarakat. Kita melihat di masyarakat, mudik sudah menjadi tradisi yang kuat tertanam di masyarakat kita. Adanya kolektivitas nilai sosial yang melekat dan diperjuangkan dalam tradisi mudik tersebut. Nilai sosial ini yang terus mengalami pelebagaan secara kuat di masyarakat.

Berjumpa dengan orang tua, keluarga, tetangga menjadi pendasaran sosial yang mengikat tradisi tersebut. Momen paling dinanti-nanti adalah dengan orang tua. Di masyarakat, kita menjumpai berbagai varian istilah seperti *sungkem*, *sowan*, maupun *silaturahmi*.

Rasa kebersamaan

Kata 'mudik' itu berakar dari kata 'udik'. Secara harfiah, udik itu berarti kampung atau desa yang lawan katanya adalah kota. Ini seperti istilah Arab 'badui' sebagai lawan dari kata 'hadhory'. Dengan sederhana bisa diambil kesim-

pulan bahwa mudik adalah kembali ke kampung halaman.

Makna kembali ke kampung halaman tidak hanya didefinisikan secara fisik, tetapi lebih menunjukkan kembali ke kampung halaman sebagai bagian kecintaan sosial kultural terhadap kampung halamannya. Faktor kedekatan emosi dengan kampung halaman mendeterminasi panggilan pulang kampung tersebut.

Relasi sosial, kultural, dan emosilah yang mengikat jutaan warga Indonesia untuk melakukan mudik. Kampung halaman menjadi ruang otentik seseorang berasal. Sementara kota menjadi ruang abstrak bagi individu. Seseorang boleh bekerja keras dan banting tulang di kota untuk mencari nafkah, tapi kecintaan terhadap kampung halaman menunjukkan keterikatan kultural yang menjadi harga mati.

Fenomena mudik menemukan ruang otentisitasnya bagi rakyat Indonesia. Meminjam Max Weber, mudik maupun kampung halaman menjadi 'panggilan' (*calling*) bagi jutaan rakyat Indonesia untuk menengok kampung halamannya.

Menguatnya tradisi mudik di masyarakat Indonesia dikonstruksikan karena menguatnya kebersamaan dan keterikatan di masyarakat kita. Keterikatan horizontal masyarakat maupun keterikatan antara individu dan kampung halamannya.

Keterikatan ini dalam perspektif sosiologi disebut dengan *attachment* total yang merujuk suatu keadaan di mana seorang individu melepas ego yang terdapat dalam dirinya diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Mudik melepaskan ego pribadi, ego primordial, maupun ego ekonomi sosial. Warga berlomba-lomba dan berjuang untuk melaksanakan mudik. Keluarga, tetangga, maupun kerabat di kampung halaman menjelang Lebaran sudah menanti kehadiran para pemudik.

Keluarga dan kerabat di kampung jauh hari sebelum Lebaran tiba sudah bertanya, "kapan mudik?" Ini bukan seka-dar pertanyaan biasa. Tapi, menunjukkan sebuah ekspektasi sosial bagi perantau untuk merekatkan dirinya dengan kampung halaman. Pertanyaan itu sekaligus

menjadi *calling* bagi jutaan warga Indonesia untuk mudik.

Kehadiran warga perantau di kampung halamannya yang sudah ditunggu-tunggu keluarga dan kerabatnya memiliki makna yang sangat mendalam. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh pemudik. Selama liburan para perantau bekerja keras di kota, saatnya mereka mudik untuk menyucikan diri. Keluarga adalah prioritas proses penyucian diri tersebut.

Kehangatan bersama keluarga menjadi momen yang sangat istimewa. Seolah tak bisa diwakili oleh kecanggihan teknologi apa pun. Tetangga, kerabat, teman kecil maupun teman sekolah juga memperkuat proses penyucian diri tersebut. Rasa kangen selama satu tahun terakhir dibalas dengan kedatangan para pemudik.

Momen Lebaran ini sering dijadikan ajang pertemuan berbagai kalangan dalam bingkai silaturahmi, reuni, maupun temu kangen. Misalnya, reuni/pertemuan alumnus sekolah, kampus, keluarga besar, hingga etnis primordial. Kolektivitas masyarakat tumpah ruah dalam upaya menyucikan diri tersebut.

Proses penyucian diri juga dilakukan dengan pembagian zakat, infak, maupun sedekah pemudik untuk warga kurang mampu di kampung halamannya. Para pemudik memanfaatkan Lebaran sebagai penyucian harta mereka yang dihasilkan dari keringat mereka di kota. Bagi warga yang mampu secara ekonomi, mereka sering berbagi dengan sesama warga. Istilahnya adalah berbagi THR.

Di kalangan keluarga, THR sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam fenomena mudik. Anggota keluarga dari mulai anak-anak hingga dewasa berharap anggota keluarganya yang mudik dapat berbagi THR. THR adalah simbol berbagi kebahagiaan.

Menjelang mudik, berbagai bank menyediakan jasa penukaran uang yang memudahkan para pemudik untuk digunakan selama mudik. Penukaran uang tersebut salah satunya digunakan untuk berbagi THR di kampung halamannya.

Para pemudik juga membawa berbagai oleh-oleh lainnya untuk keluarga dan kerabat. Mulai dari pakaian, sepatu, perhiasan, makanan, hingga alat teknologi. Semua melengkapi proses penyucian diri para pemudik. ■

Konteks Lailatul Qadar

■ M ULINNUHA HUSNAN
Dosen IIQ Jakarta

Lailatul qadar adalah peristiwa luar biasa dan penuh misteri. Banyak kejadian mahadahsyat yang berlangsung di malam itu. Salah satunya yang paling fenomenal adalah proses penurunan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW. Data-data teologis dan historis merekam kejadian itu (lihat misalnya QS al-Qadr [97]: 1-5; QS ad-Dukhan [44]: 4-5), sehingga tak ada tempat bagi umat manusia untuk meragukan atau bahkan mendustakannya.

Kemahadahsyatan lailatul qadar itu terlihat secara tekstual, misalnya, pada kata lailatul qadr yang diulang sampai tiga kali dalam surah al-Qadr. Karena status dan kedudukannya yang begitu agung, tak berlebihan bila Rasul SAW kerap memerintahkan kepada diri, keluarga, dan umatnya agar selalu memperbanyak amal saleh dan ibadah pada malam itu (lihat misalnya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari 'Aisyah dan Abu Sa'id al-Khudri).

Dalam konteks kekinian, sejatinya banyak hikmah, pesan, dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa lailatul qadar. Pertama, lailatul qadar mengajarkan kepada kita tentang pentingnya fungsi manajemen hidup yang —menurut Henri Fayol (1841-1925 M)— meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengawasan (*controlling*), dan evaluasi (*evaluating*).

Pesan ini terinspirasi dari pemahaman atas makna dasar term *lailatul al-qadr* yang berarti malam penentuan bagian (takdir). Menurut informasi Alquran, pada malam itulah Allah 'merencanakan', 'mengorganisasikan', 'mengawasi' sekaligus 'mengevaluasi' tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta hak seluruh umat manusia. Inilah kesan yang tersirat dari firman Allah; *fiha yufruqu kullu amrin hakim* (di malam itu, dijelaskan [kepada malaikat] tiap-tiap perkara yang mengandung hikmah) (QS ad-Dukhan [44]: 4), dan kalimat *min kullu amr* (dari tiap-tiap perkara) dalam QS al-Qadr [97]: 4.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pesan pertama ini memberikan wejangan kepada para penguasa untuk mengatur bangsa ini secara serius dalam semua lini kehidupan yang meliputi pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan, keamanan, dan kebudayaan. Fungsi manajemen juga harus dilakukan dengan baik dan maksimal, tidak sekadar formalitas dan dalam konteks menghabiskan anggaran. Jika pesan pertama ini dilakukan dengan baik, niscaya huru-hara dan karut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah terjadi di negeri ini.

Kedua, mengatur (mengelola) hidup harus dilakukan secara periodik —minimal setahun sekali— dan berkesi-

nambungan. Pesan ini tersirat dari ayat *tanazzalul mala'ikatu* (QS al-Qadr [97]: 3). Menurut para mufasir, bentuk asli kata *tanazzalu* (turun-temurun) adalah *tatanazzlu*, namun huruf *ta'* yang pertama dibuang untuk memudahkan bacaan.

Jika demikian, maka *tatanazzalu* adalah *fi'il mudhari'* (*present continuous tense*), yang dalam kaidah bahasa Arab mengandung makna kekinian (*al-hadhir*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). Dari pemahaman semacam ini maka umat Islam dan seluruh lapisan bangsa, sejatinya diajak untuk terus serius dan komitmen mengatur kehidupan umat dan bangsa ini.



Da an Yahya/Republika

Ketiga, aturan, sistem, dan manajemen yang ditetapkan harus berorientasi jangka panjang dan untuk kebaikan bersama. Ini adalah kesan dari ayat *khairun min alfi syahrin* (lebih baik dari seribu bulan) (QS. al-Qadr [97]: 2). Jadi, selama sistem yang digunakan masih berbasis pada kepentingan sesaat, apalagi kepentingan kelompok dan orang per orang, maka sistem itu tidak akan membawa dampak signifikan bagi perbaikan kehidupan ini.

Keempat, peristiwa yang terjadi pada lailatul qadar —khususnya Nuzulul Qur'an— mengajak kepada kita untuk me-nuzul-kan (menurunkan) Alquran ke dalam relung jiwa dan seluruh aspek kehidupan, baik pribadi maupun sosial kenegaraan. Kata *anzalnaa* di awal surah al-Qadr —yang menggunakan

diksi *anzala*, yang berbentuk *fi'il maadh-hii* (*past tense*)— menunjukkan bahwa penurunan Alquran ke dalam diri manusia itu harus dilakukan secara totalitas dan sungguh-sungguh.

Dengan demikian, Alquran tidak lagi sekadar dirapal secara kuantitatif, tapi jauh di atas itu adalah bagaimana Alquran dapat berfungsi secara kualitatif pada hidup dan kehidupan ini. Berfungsi secara kualitatif mengandaikan pembacaan dan pengkajian yang begitu mendalam, kontinu, terprogram, dan pengejawantahan secara maksimal dalam keseharian.

Sementara me-nuzul-kan Alquran dalam konteks sosial kenegaraan berarti menjadikannya sebagai basis utama dalam menentukan regulasi dan kebijakan. Regulasi yang berbasis pada Alquran berarti regulasi yang prorakyat, prokepentingan bangsa, prokaum dhu'afa, fakir miskin, dan marjinal. Kebijakan yang Qurani berarti kebijakan yang berorientasi dan mengedepankan nilai-nilai dasar, karakter, dan jati diri kebangsaan, bukan proasing, apalagi tunduk dan patuh pada keinginan asing.

Kelima, peristiwa lailatul qadar juga mengajak kita untuk menyebarkan perdamaian dan kedamaian (*salam*). Perdamaian dan kedamaian itu harus terus disebarkan umat Islam dan seluruh lapisan bangsa ini, hingga benar-benar mewujud dalam kehidupan seru sekalian alam.

Secara sufistik, term *hattaa mathla'il fajr* (hingga terbit fajar) (QS al-Qadr [97]: 5) berarti hingga (perdamaian dan kedamaian) itu termanifestasi dalam seluruh semesta alam, bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, tanpa melihat perbedaan latar belakang dan status sosial. Kata *fajr* di akhir ayat itu juga mengisyaratkan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan kesentosaan.

Karut-marut kehidupan di berbagai belahan bumi Islam, khususnya di Indonesia belakangan ini, adalah bentuk penodaan terhadap visi *salam* (perdamaian dan kedamaian) yang dititahkan Tuhan dalam Alquran. Dengan demikian, lailatul qadar bukanlah sekadar peristiwa biasa yang layak diperingati secara seremonial, tapi jauh di atas itu, lailatul qadar adalah peristiwa adiluhung di mana masa depan hidup dan kehidupan manusia ditentukan.

Maka, tak ada pilihan lain bagi kita semua, khususnya umat Islam Indonesia, kecuali menyebarkan perdamaian dan kedamaian di negeri ini. Tentu harus diawali dengan pemahaman yang mendalam dan semangat mencari serta mengisi malam lailatul qadar dengan amal saleh dan ibadah-ibadah individual maupun sosial. *Wallahu a'lam.* ■

37

Mesir dan Keruntuhan Demokrasi

■ DONNY SYOFYAN

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Kelompok militer di Mesir kembali bertindak represif terhadap kelompok pendukung presiden terguling Muhammad Mursi. Serangan membabi buta aparat keamanan kembali dilancarkan ke bundaran Rabiah Adawiyah di Kairo, tempat unjuk rasa pendukung Muhammad Mursi. Jumlah korban tewas mencapai 38 orang.

Pecahnya kerusuhan terbaru itu membuat jumlah korban tewas mencapai 120 orang dan lebih 1.000 lainnya terluka. Belum ada laporan resmi dari Kementerian Kesehatan. Tetapi, menurut dokter di lapangan, korban meninggal akan terus bertambah lantaran banyak korban luka karena tembakan peluru tajam yang masih terus berdatangan.

Mesir terus membara. Lagi-lagi sejarah menunjukkan bahwa warga Mesir memilih militer ketika mereka tidak sabar dengan presiden mereka. Persoalan kian keruh ketika mayoritas kaum liberal dan Barat memasang standar ganda dan pembiaran (*omission*) bahwa penggulingan Muhammad Mursi bukanlah kudeta atas nama demokrasi. Di sinilah letaknya paradoks demokrasi di Mesir dan di banyak tempat di negara-negara Islam atau yang bermayoritas penduduk Muslim.

Dalam konteks Mesir, terjun bebas demokrasi ini sejatinya berawal dari inkonsistensi dan ketidaksabaran militer Mesir dalam mengawal proses demokrasi Mesir yang belum seumur jagung pascalgensernya Husni Mubarak. Pihak militer Mesir telah mengalami pasang surut pascagelombang protes Mesir yang menurunkan Mubarak.

Pada 2011 militer terbukti menjalankan perlakuan kasar terhadap para pengunjuk rasa. Brutalitas ini berhenti ketika militer meninggalkan politik pada Juni 2012 di bawah kesepakatan bahwa militer tetap mendapatkan otonomi dan fasilitas yang telah mereka nikmati sejak era Mubarak. Kesepakatan ini juga men-

cakup kekebalan atas penuntutan dan peradilan militer bagi para perwira dan petingginya pasca-Mubarak.

Rusakanya demokrasi di Mesir merupakan perpaduan antara syahwat berkuasa militer, yang dikomandani oleh Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdel Fatah al-Sisi, dan inkonsistensi kaum liberal dan sekuler Mesir dalam memaknai demokrasi, yang dipimpin oleh Mohamed el Baradei. Alih-alih memperlakukan massa pendukung Mursi secara manusiawi, militer Mesir justru menggunakan peluru tajam, pasukan *sniper* dan kendaraan lapis baja seperti menghadapi musuh. Lebih parah, pihak militer menggunakan gas syaraf untuk membunuh ratusan orang di antara jutaan demonstran.

Militer Mesir selama ini tidak membunuh saat berperang melawan Zionis yang merampas tanah suci Palestina, tapi memilih membunuh kaum warga Mesir Muslimin yang tak bersenjata. Tak pelak, intervensi militer adalah kemunduran bagi pluralisme Mesir.

Kudeta secara definitif jelas antidemokrasi dan mustahil memuluskan perbaikan demokrasi. Kasus Mesir menegaskan bahwa otonomi militer, kepentingan ekonomi, dan peran tunggal sebagai sumber legitimasi dan otoritas tak pernah sukses memperkuat demokrasi.

Pertarungan politik destruktif untuk menguasai Mesir kian mengkristal. Kudeta dan penggulingan Mursi boleh jadi dipuji oleh beberapa negara Arab. Israel girang bukan main. Namun, tindakan tersebut adalah resep untuk bencana. Semua dukungan untuk al-Sisi dimotivasi oleh perhitungan sesaat. Pengambilalihan Mesir oleh militer secara tajam memolarisasi demografi bangsa Mesir yang saat ini berada dalam puncak yang mengerikan. Kudeta al-Sisi memperdalam fluiditas lokalitas Mesir.

Lewat tindakan ini, militer hanya mendorong politik intoleransi yang mengamanatkan kerumunan yang gaduh

untuk merealisasikan tuntutan mereka melalui protes jalanan ketimbang melalui perdebatan di parlemen. Bila demokrasi adalah jalan yang diinginkan warga Mesir, protes jalanan tetap saja tak menjamin bahwa masyarakat Mesir akan mendapatkan pemerintah yang representatif. Rakyat Mesir perlu belajar untuk menoleransi perbedaan pendapat dan oposisi, alih-alih secara ketat menghiraukan setiap permintaan dan keluhan di jalan-jalan.

Menggulingkan presiden yang terpilih adalah sebuah kecelakaan—sebuah langkah fatal dan perhitungan salah dengan kegagalan tentara menangani efek resistensi pro Mursi. Al-Sisi ingin menggunakan momen ini untuk menyamarkan mat sebenarnya sebagai Firaun baru; reinkarnasi dari Husni Mubarak.

Al-Sisi membawa kembali rezim Mohamad Naguib, Anwar Al Sadat, Gamal Abdel Nasser, dan Husni Mubarak yang memerintah Mesir selama lebih dari 50 tahun dengan menenggelamkan demokrasi di Sungai Nil. Kini krisis politik di negara ini jauh dari solusi. Tindakan keras pada Ikhwanul Muslimin hanya akan meningkatkan krisis politik di negara itu.

Demokrasi hanya bisa mewangi di Mesir ketika kekuasaan Mursi direstorasi. Upaya selanjutnya adalah menegosiasikan paket rekonsiliasi yang menjamin kelompok-kelompok Islam tidak tercampak dari setiap kebijakan dan langkah politik, ekonomi, atau sosial di masa depan.

Pada saat yang sama, kelompok Islam perlu mengonfirmasi komitmennya untuk menghormati hak-hak minoritas. Inilah skenario optimistis yang melibatkan rekonsiliasi serta mediator internasional. Rekonsiliasi masyarakat sipil di Mesir menghajatkan Mesir kembali menjadi pelopor di dunia Arab, mencita-citakan lahirnya pemerintah yang dijalankan orang-orang yang kompeten guna memulihkan ketertiban dan menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendambakan pemerintahan yang inklusif. ■

6 OPINI

Membangun Kapet

■ MOH ILHAM A HAMUDY

Peneliti di BPP Kementerian Dalam Negeri

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) awalnya dibentuk melalui Kepres No 89 Tahun 1996, lalu direvisi menjadi Kepres No 55 Tahun 2001. Kapet sejatinya merupakan salah satu dari beberapa kawasan andalan yang dipandang penting dalam menyinergikan pelbagai potensi kawasan guna mempercepat pembangunan ekonomi, sekaligus menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*) dan memberikan nilai tambah bagi produk daerah.

Kapet selama ini, katanya, berfokus pada percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif, sekaligus meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk unggulan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, dan energi yang mendukung pengembangan kawasan strategis. Tujuan utama Kapet adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar berperan serta dalam kegiatan pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI) yang relatif tertinggal dan juga di kawasan barat Indonesia (KBI).

Selain itu, Kapet berupaya mendorong terbentuknya suatu kawasan penggerak utama (*prime mover*) pengembangan wilayah, sembari melakukan pemilahan kawasan pembangunan dengan menentukan prioritas atas suatu kawasan. Dengan demikian, percepatan pembangunan dapat dilakukan.

Sejauh ini sudah terbentuk 12 Kapet di KTI dan satu Kapet di KBI. Ketiga belas Kapet itu adalah Sabang (Aceh), Das Kakab (Kalimantan Tengah), Sanggau (Kalimantan Barat), Batulicin (Kalimantan Selatan), Sasamba (Kalimantan Timur), Manado-Bitung (Sulawesi Utara), Batui (Sulawesi Tengah), Pare-Pare (Sulawesi Selatan), Bukari (Sulawesi Tenggara), Bima (Nusa Tenggara Barat), Mbay (Nusa Tenggara Timur), Seram (Maluku), dan Biak (Papua).

Belum berkontribusi

Kapet oleh banyak ahli diyakini mampu menarik investor sekaligus sebagai sarana promosi bagi investor yang belum

menanamkan modalnya. Kapet diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan memberikan dampak pada wilayah sekitar kawasan melalui apa yang disebut *trickle down effect*.

Namun, kenyataannya hal itu masih jauh dari harapan. Data Kementerian Perdagangan 2012 menunjukkan, sejak 2005, dari 13 Kapet yang ada, realisasi investasi hanya sekitar Rp 27,5 triliun atau 3,14 persen dari total investasi nasional Rp 809,27 triliun. Hanya tiga Kapet yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total investasi nasional, yaitu Kapet Sasamba menyumbang Rp 11 triliun, Kapet Batu Licin Rp 3 triliun, dan Kapet Manado-Bitung Rp 3,4 triliun.

Kapet senyatanya memang sedang terlilit beberapa masalah. Masalah utama yang mengemuka adalah soal kebijakan hukum dan insentif, ditambah minimnya anggaran promosi. Lokasi Kapet pun terlalu luas dan tidak terfokus. Ketersediaan infrastruktur tidak jelas. Insentif yang diberikan untuk Kapet juga sangat terbatas. Belum lagi masalah penataan ruang.

Sejak UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disahkan, misalnya, hingga kini rencana tata ruang Kapet belum ada. Padahal, UU Penataan Ruang dan PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan Kapet sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Akhirnya, konsep pengembangan Kapet belum dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan belum mampu mengatasi ketimpangan wilayah.

Segera atasi

Oleh karena itu, pemerintah mesti segera mengatasi pelbagai masalah tersebut sehingga tujuan awal terbentuknya Kapet bisa segera tercapai. Langkah pertama yang harus diambil adalah memaksimalkan dana pembangunan untuk membangun infrastruktur fisik yang diperlukan di wilayah Kapet.

Pembentukan Project Management Unit yang berisi program pengembangan infrastruktur Kapet di tingkat pusat dan daerah yang sudah dicanangkan pemerintah patut diapresiasi. Sebab, dengan

begitu akan ada jaminan terciptanya keterpaduan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Kapet.

Konsistensi dalam menyusun usulan dukungan infrastruktur, yang mengacu pada rencana tata ruang, baik itu RTR-WN, Rencana Tata Ruang Kapet, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dokumen sinkronisasi program, maupun memorandum program infrastruktur, sangatlah diperlukan.

Kedua, mengatur regulasi perpajakan dalam pengelolaan Kapet sehingga pelaksanaan Kapet dapat optimal memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk itu, mesti ada pengurangan pajak penghasilan sebesar 30 persen selama enam tahun dan 5 persen per tahun di Kapet.

Selain itu, perlu ada pilihan percepatan penyusutan pajak (amortisasi). Kompensasi kerugian fiskal paling lama 10 tahun patut diwujudkan. Pengenaan pajak dividen 10 persen, atau lebih rendah, dan juga pelayanan terpadu satu pintu di seluruh Kapet adalah sebuah keniscayaan.

Ketiga, mengintegrasikan Kapet ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan fokus sektor usaha. Integrasi akan membuat pembangunan kawasan industri menjadi lebih baik sehingga Kapet dan KEK bisa bersinergi dengan landasan hukum yang lebih jelas. Impaknya, insentif baik fiskal maupun nonfiskal pun akan mudah diberikan pada setiap kawasan di bawah koridor ekonomi khusus.

Keempat, membentuk strategi baru yang berbasis *local economic development*, dengan bersandar pada sektor unggulan pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata, dan beberapa sektor unggulan lainnya sesuai potensi dan karakteristik daerah di masing-masing Kapet.

Kelima, merevitalisasi kelembagaan Kapet di daerah seraya senantiasa berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk memaksimalkan potensi memperluas peran pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan agar dapat lebih berdaya saing. Dengan begitu, ketimpangan wilayah di republik ini bisa segera teratasi. ■

Fenomena Sidang Istbat

■ YUSUF UTSMAN BAISA
Ketua Umum DPP Perhimpunan Al Irsyad

Setiap menjelang Ramadhan, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama selalu menggelar sidang itsbat. Bahkan, sidang itsbat telah menjadi magnet besar yang mampu menyedot perhatian kaum Muslim Indonesia sehingga semua mata dan telinga diarahkan ke berbagai media informasi yang mereka miliki untuk mengikuti agenda acara yang berlangsung pada sidang ini.

Alangkah indahnya kalau sidang ini dihadiri oleh segenap ormas Islam Indonesia dengan kesadaran yang tinggi dan keinginan yang murni dalam mementingkan nasib Islam dan Muslimin serta mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu atau kelompok masing-masing.

Ajang ini jadi sangat penting artinya karena di dalamnya akan ditentukan hari ibadah umat Islam terkait puasa Ramadhan dan shalat Id. Karenanya, acara ini sangat dinantikan dan diharapkan keberlangsungannya.

Berpuh media masa lokal dan nasional berfokus pada acara ini, kru mereka tidak kurang dari seratusan orang memadati ruangan dengan sigap dan hiperaktif untuk langsung menyiarkan acara ini saat itu juga, bahkan mereka tidak mau terlambat.

Sayang sekali kalau acara yang sangat strategis ini tidak diberi perhatian besar dan ditata dengan elegan sehingga mampu mempersatukan Muslimin di Indonesia dan menarik perhatian Muslimin di berbagai penjuru dunia, bahkan tidak mustahil kalau suatu saat acara ini menjadi pusat perhatian Muslimin sedunia.

Sidang itsbat yang diadakan secara terbuka dan siap mendengar suara para ulama dan ormas Islam adalah forum yang tergolong langka di tingkat internasional sekalipun. Karena, belum tentu bisa didapati di negara Islam lainnya ada sidang itsbat yang terbuka seperti di negeri ini.

Kekecewaan kita pada saat ini mengembang manakala sidang yang sangat terhormat ini menjadi medan laga kepentingan politik yang bersifat sesaat. Sementara, di negara-negara Islam lainnya, keputusan menentukan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah sepenuhnya dipegang oleh pemerintah di negara tersebut.

Di antara hal yang juga sangat disayangkan dan amat mengecewakan adalah setiap orang di negeri ini punya hak untuk memutuskan dan mengumumkan ketetapan hari-hari yang krusial ini. Bahkan, dari jauh hari sebelumnya dengan tanpa harus memikirkan akibatnya.

Kalau kita menarik sejarah, didapati bahwa para ulama dan pendiri ormas Islam pun melakukan hisab seperti saat ini. Namun, mereka dengan penuh adab dan mengedepankan persatuan dan kesatuan sehingga menunda pengumuman mereka untuk tidak menimbulkan fitnah dan perpecahan di kalangan Muslimin.

Pada saat ini, sebetulnya kalau kita mau, tentu bisa dan mampu untuk saling menghormati dan menghargai serta membuang sikap yang mendiskreditkan sesama Muslimin. Namun, yang terjadi justru kita terjebak dalam kepentingan politik sesaat. Sayang sekali jika potensi besar umat Islam tidak terakomodasi dan dikelola dengan sistem manajemen yang bagus.

Padahal, permasalahan dan hambatan yang sesungguhnya sangatlah sederhana dan mudah untuk diselesaikan jika kita semua memiliki jiwa yang besar, siap menang dan siap kalah, siap dibenarkan dan siap disalahkan, serta mengutamakan tujuan besar berupa kepentingan umat Islam yang semua pihak sama-sama sedang memperjuangkannya.

Setidaknya ada beberapa permasalahan dan hambatan yang seharusnya bisa dipecahkan dan dijawab bersama-sama. Di antaranya adalah manakah yang lebih akurat, metode hisab atau rukyah. Mana yang jadi standar keputusan, *wujudul-hi-*

lal atau *imkanur ru'yah*. Melihat harus dengan kasat mata atau boleh juga menggunakan peralatan canggih. Berapa derajat minimal ketinggian hilal untuk bisa dilihat. Apakah ada perbedaan *matholi'*.

Selain itu, mana yang paling akurat di antara beberapa mazhab hisab yang digunakan para ahli hisab di Indonesia. Sejauh mana pengaruh ilmu astronomi modern terhadap hisab dan rukyah konvensional. Siapakah yang berhak memutuskan dan menetapkan hasil hisab dan rukyah. Kapan saat yang tepat untuk mengumumkan hasilnya.

Sesungguhnya permasalahan dan hambatan ini bisa diselesaikan dengan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan dibidang hisab dan rukyah yang benar-benar mendalam, disiapkan dengan cermat dan komprehensif, untuk segera melahirkan para pakar yang mumpuni sebanyak-banyaknya.

Tentunya, mereka harus menguasai dengan luas dan mendalam ilmu hisab dan rukyah, baik secara modern maupun konvensional, beserta keterampilan dalam mempraktikkannya sehingga bisa mengombinasikannya dengan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara, para pakar yang ada terus berkurang dan jarang sekali yang menguasai semua disiplin ilmu hisab dan rukyah modern dan konvensional secara terpadu. Akibatnya, mereka saling melecehkan antara satu pakar dan pakar lainnya, padahal setiap disiplin ilmu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain.

Harapan ke depan ialah agar acara sidang itsbat dipenuhi oleh para pakar hisab dan rukyah yang benar-benar mumpuni dan mampu memadukan antara kelebihan yang dimiliki oleh model konvensional dan kelebihan lainnya yang dimiliki oleh model mutakhir. Hal itu agar benar-benar mampu menyajikan hasil yang sangat ilmiah dan mampu menyatukan Muslimin di Indonesia, bahkan tidak mustahil sedunia. ■

40

6 OPINI

Quo Vadis Swasembada Daging Sapi

■ ANDI IRAWAN

Peminat Telaah Ekonomi Pertanian Indonesia dan Doktor Ekonomi IPB

Berbicara swasembada, parameter penting bagi masyarakat bukan pada klaim pemerintah tentang jumlah suplai domestik yang mampu memenuhi *demand*-nya, atau yang dikenal dengan aspek *availability* (ketersediaan). Tapi, yang lebih penting adalah kemudahan masyarakat mengakses komoditas tersebut secara berkelanjutan.

Begitu juga halnya dengan swasembada daging sapi. Ada permasalahan penting yang hadir di lapangan, yakni kemampuan akses masyarakat akan daging sapi yang semakin sulit dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2010, harga daging sapi berkisar di Rp 60 ribu per kilogram (kg). Sedangkan, pada awal 2013 ini harganya sudah mencapai Rp 100 ribu per kg. Dan harga itu di pertengahan 2013 tidak bereser dari kisaran Rp 90 ribuan.

Imbas dari kenaikan harga BBM dan bulan puasa membuat *shock* baru yang melambungkan harga di atas Rp 100 ribu. Semakin tinggi harga daging menunjukkan semakin sulit akses masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Akses masyarakat atas daging sapi yang semakin sulit ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mencapai swasembada pangan tidak bernas dalam implementasinya. Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah adalah pengurangan impor daging sapi dengan cara membatasi kuota impor dalam tiga tahun terakhir untuk memacu memacu suplai domestik.

Dengan demikian, implementasi penurunan impor daging sapi seharusnya tidak boleh menyebabkan kenaikan harga yang tinggi kalau memang benar kebutuhan sapi domestik bisa dipenuhi dari pasokan sapi lokal. Karena berkurangnya daging sapi impor akan ditutup oleh daging sapi lokal.

Kenyataannya, dampak kenaikan dari pembatasan impor yang dilakukan pemerintah selama tiga tahun terakhir menyebabkan naiknya harga dari Rp 60 ribu per kg (2010) menjadi Rp 100 ribu per kg pada penghujung 2012 sampai sekarang. Atau terjadi kenaikan harga sebesar 40 persen.

Pada 2010, harga daging rata-rata Rp 60 ribu per kg, saat itu kita impor sebesar 221,23 ribu ton (53,05 persen dari kebutuhan domestik). Tahun 2012, impor turun cukup tajam menjadi 95,02 ribu ton atau setara 18,63 persen dari kebutuhan domestik dan harga daging sapi mencapai Rp 100 ribu per kg.

Kenaikan harga yang tajam dari penurunan impor daging sapi menunjukkan kebijakan pemerintah membatasi impor sepenuhnya hanya berimplikasi pada penurunan suplai domestik. Akibatnya berdampak pada kenaikan harga yang cukup signifikan.

Padahal, kalau pencapaian swasembada dalam *track* yang benar hadir, maka pembatasan impor yang dilakukan pemerintah itu tidak berimplikasi pada ke-

■ Kebijakan pembatasan impor hanya bisa ditunjukkan untuk mencapai swasembada daging sapi dalam waktu yang lebih panjang. ■

naikan harga yang tajam karena sumber daging impor itu diganti oleh sumber daging sapi domestik.

Dengan demikian, pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya target dari kebijakan pembatasan kuota impor itu? Kalau tujuan untuk mencapai swasembada daging dari ilustrasi di atas, dengan tegas ingin kita katakan bahwa kebijakan tersebut akan sulit merealisasikan swasembada daging sapi, apalagi untuk 2014.

Pemerintah berasumsi bahwa dengan mengimplementasikan kebijakan pembatasan impor daging sapi, maka kekurangannya akan dipenuhi dari daging sapi lokal. Di atas kertas, hitungan untuk swasembada hanya butuh 12,6 juta ekor, padahal populasi sapi kita 14,8 juta ekor berdasarkan sensus ternak BPS 2011.

Tetapi, permasalahannya adalah puluhan juta sapi yang terdata tersebut berada di kandang para peternak kecil

yang lokasinya tersebar di seluruh pelosok negeri. Semua itu bukan merupakan ternak yang sewaktu-waktu bisa dipotong dalam kondisi darurat kelangkaan daging (*ready stock*).

Para peternak kecil skala rumah tangga itu memelihara ternak untuk kepentingan berjaga-jaga dan tabungan, dijual ketika ada kepentingan mendesak. Padahal, peternak kecil harus memenuhi 86 persen kebutuhan daging sapi domestik. Sehingga, ketika tidak tersedia (*ready stock*), maka wajar terjadi kenaikan harga daging sapi yang tajam.

Kebijakan pembatasan impor hanya bisa ditujukan untuk mencapai swasembada daging sapi dalam waktu yang lebih panjang sekitar lima tahun ke depan. Itupun kalau pemerintah serius mengatasi kendala-kendala kelembagaan pasar di lapangan.

Pertama, harus hadir BUMN logistik untuk daging yang berfungsi sebagai stabilisator harga dan penjaga *buffer stock* daging seperti halnya Bulog untuk komoditas beras. BUMN inilah yang menjemput dan membeli ternak sapi rakyat dan membelinya dengan harga subsidi pemerintah yang masih menguntungkan peternak, dan selanjutnya menyimpannya sebagai stok negara.

Ketika harga daging sapi mahal, stok negara inilah yang dilempar ke pasar dengan harga yang lebih murah sehingga stabilisasi harga yang menguntungkan petani, dan masih bisa diakses masyarakat, bisa terjaga.

Kedua, mengatasi masalah distribusi dalam rangka mewujudkan pengangkutan sapi yang mudah dan murah. Seperti mengaktifkan kapal angkut khusus ternak dalam jumlah yang memadai untuk mengangkut ternak Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa pulau lainnya ke Pulau Jawa. Termasuk perbaikan dermaga pengangkutan ternak, mencegah pengangkutan ternak yang tidak mengikuti kaidah *animal welfare*.

Begitu juga angkutan darat via kereta api khusus ternak perlu dihadirkan untuk angkutan dari sentra produksi ke daerah konsumen di Jawa. Dan tidak kalah penting, meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas dan pelayanan rumah-rumah potong hewan (RPH). ■

41

Bom Waktu “Panic Policy” Sapi

■ HANIBAL WY WIJAYANTA
Wartawan Utama, Alumni IPB

Bagai air bah, gelombang sapi impor siap potong dari Australia pekan ini mulai membanjiri Tanah Air. Rabu (31/7) dini hari lalu, 1.478 ekor sapi tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Gelombang kedua, sebanyak 4.817 ekor sapi telah dikapalkan pada 30 Juli 2013. Dengan diangkut Kapal Ocean Swagman, sapi-sapi ini akan tiba di Tanjung Priok pada Ahad (4/8).

Kedua gelombang ini bagian dari total impor 12.500 ekor sapi siap potong dari Australia hingga H +5 lebaran. Dengan alasan untuk menstabilkan harga daging sapi yang tak kunjung turun, pemerintah membuka keran impor sapi siap potong besar-besaran. Impor sapi siap potong dari Australia ini diatur dengan Keputusan Menteri Perdagangan nomor 699/M-DAG/KEP/7/2013 tentang stabilitas harga daging sapi.

Keputusan ini diambil setelah dalam rapat kabinet terbatas pada 13 Juli 2013, di Bandara Halim Perdanakusuma. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono murka. Dalam rapat itu, Presiden mengaku kecewa atas kinerja para menteri dan pejabat terkait. Sebab, sejak Januari 2013, harga daging sapi terus membubung tinggi. “Kita ini harus punya tiga sense, *sense of crisis*, Mentan juga harus punya *sense of crisis*, Kabulog, Mendag, *sense of urgency*, *sense of responsibility*,” kata SBY.

SBY mendesak semua pejabat terkait untuk segera menyelesaikan persoalan daging sapi dalam hitungan hari. “*Shortcut*” solusi dengan impor daging sapi dan sapi hidup dipilih. Intinya, lonjakan harga daging sapi harus ditangkal.

Kemarahan Presiden tentu bikin kecut para pejabat. Maka, walau sudah diingatkan agar mereka tidak saling lempar tanggung jawab, kambing hitam tetap diperlukan untuk mengesahkan langkah selanjutnya. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, kelambanan stabilisasi harga daging disebabkan perbedaan data Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Belakangan muncul bocoran hasil

sementara Sensus Pertanian per 3 Juni 2013. Menurut bocoran data Badan Pusat Statistik (BPS) itu, populasi ternak sapi potong, sapi perah, dan kerbau Indonesia anjlok 19,52 persen dibandingkan hasil Sensus Pertanian 2011. Populasi ternak kini tercatat hanya 13,28 juta ekor. Padahal, pada periode sebelumnya mencapai 16,5 juta ekor.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku kecewa terhadap para *feedlotter*. Sebab, meski sudah dijatah impor dan pembesaran 109 ribu ekor sapi, mereka tak juga memotongnya. Akibatnya harga daging sapi tetap mahal. Menteri Pertanian Suswono seolah menyerah dan seakan melupakan program swasembada sapi yang direncananya sendiri.

Maka, sabda murka Presiden SBY menjelma menjadi sebuah *panic policy*, alias kebijakan dalam kepanikan. Kebijakan pertama, mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) agar segera mengimpor daging sapi, dengan total 3.000 ton sampai Desember nanti. Tujuannya untuk menurunkan harga daging sapi sampai Rp 75 ribu per kg.

Kedua, membuka keran impor sapi siap potong, tanpa perlu rekomendasi Kementerian. “Ditjen Peternakan hanya bertugas mengeluarkan persyaratan kesehatan hewan yang harus dipenuhi importir,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro.

Seperti arahan Presiden, untuk kebijakan ketiga, Menteri Gita menggandeng bos Artha Graha, Tomy Winata, untuk menggelar operasi pasar daging. Pekan lalu, Tomy mengerahkan 22 truk berpendingin berisi 800-1.000 kg daging sapi asal Australia untuk didistribusikan ke 20 titik kelurahan di lima wilayah Jakarta untuk menurunkan harga. Tapi, hingga pekan pertama Agustus, harga daging sapi belum juga turun seperti target pemerintah. Harga masih berkisar Rp 80-90 ribu. Pasokan daging impor beku rupanya kurang diminati warga.

Bom waktu

Impor sapi siap potong jelas mengandung bom waktu, terutama soal pe-

nanganan karantina. Dalam rangka percepatan pelayanan karantina, Badan Karantina Pertanian telah mengirim dua orang dokter hewan untuk menginspeksi dan menggelar tindakan karantina pra-pengapalan di Darwin, Australia, dan di atas kapal.

Hal ini dimaksudkan agar sapi-sapi impor siap potong itu bisa segera masuk rumah pemotongan hewan setiba di Indonesia, dan tak perlu diperiksa lagi di Instalasi Karantina Hewan. Kegiatan *pre-shipment inspection* ini sesuai dengan kewenangan petugas karantina dalam Pasal 58 PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Intinya, agar sapi yang diimpor itu benar-benar sehat dan aman bagi masyarakat untuk dikonsumsi.

Menurut Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kementerian Pertanian, Drh Sujarwanto, pada gelombang pertama, PT BMT berencana mengimpor 1.600 ekor sapi. Namun, hanya 1.478 ekor sapi yang lolos pemeriksaan. Sayang, penyebab 122 sapi lainnya tidak lolos belum jelas apakah karena terjangkit penyakit atau faktor lain.

Soal kandungan hormon trenbolone, pemacu pertumbuhan masa daging, yang diberikan kepada sapi-sapi pedaging asal Australia juga mencemaskan. Penelitian Dr Kisman Achmad Rasyid pada Agustus 2008, menunjukkan dari 60 sampel daging dan hati sapi impor eks Australia yang sudah dibesarkan selama 2-5 bulan di *feedlotter* di Bogor dan Sukabumi, terdeteksi 100 persen hormone trenbolone.

Jika dikonsumsi terus-menerus, hormon trenbolone dapat menimbulkan kanker rahim dan kanker payudara pada perempuan, serta menimbulkan kanker prostat pada laki-laki. Hormon karsinogenik ini baru bisa hilang setelah sapi yang disuntik didetoksifikasi minimal tiga bulan pasca penyuntikan.

Apalagi muncul *panic policy* akibat lonjakan harga daging sapi. Karena itu, sudah selayaknya kita berpikir jernih, mengambil langkah yang tepat, dan tidak gegabah, termasuk dengan tidak membuka keran impor sapi siap potong ugal-ugalan. ■

Manajemen Mudik

■ AUNUR ROFIQ

Ketua DPP PPP Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan/Praktisi Bisnis Pertambangan dan Perkebunan

Mudik adalah sebuah ritual yang memiliki dimensi budaya (kultural), religius, dan ekonomi. Secara kultural, mudik sudah dikenal ribuan tahun lalu sebelum zaman Majapahit. Secara historis kegiatan ini dikenal pada masyarakat petani Jawa.

Awalnya kegiatan mudik ini bertujuan untuk menengok dan membersihkan makam leluhur dengan memanjatkan doa kepada para dewa. Seiring dengan masuknya pengaruh Islam, kegiatan mudik seperti itu mulai luntur dan muncul kembali dengan memanfaatkan momentum Idul Fitri. Dengan demikian kegiatan mudik juga salah satu kegiatan khas, sekaligus suatu bentuk kearifan lokal bangsa kita.

Mudik juga memiliki dimensi ritual keagamaan (religius) yakni silaturahmi. Suatu bentuk ibadah agama yang dianjurkan. Dalam hari raya Idul Fitri, selalu diiringi dengan silaturahmi dan saling berbagi makanan.

Selain dimensi kultural dan ritual, juga ada dimensi ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari pergerakan manusia dan sumber daya ekonomi yang demikian besar, sehingga memiliki *multiplier effect* ekonomi yang juga besar.

Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada Idul Fitri 2013 akan bertambah. Secara umum, kenaikan diprediksi mencapai 4,46 persen atau akan mencapai 18 juta orang. Kenaikan jumlah penumpang tertinggi diprediksi akan terjadi pada angkutan udara, yaitu sebesar 11,7 persen. Jika pada mudik 2012 jumlah penumpang angkutan udara sebanyak 3,36 juta orang, maka pada 2013 diprediksi mencapai 3,75 juta orang.

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, transaksi pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia (remitansi) oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) ditaksir mencapai Rp 15 triliun, selama Ramadhan dan Idul Fitri 2013. Remitansi TKI di luar negeri sudah cukup tinggi pada hari-hari biasa. Namun, jumlahnya meningkat tajam setiap Ramadhan dan Lebaran.

Kegagalan pembangunan

Selain faktor budaya, kegiatan mudik juga didorong oleh faktor ekonomi yakni pembangunan nasional (terutama ekonomi) yang berpusat di Ibu Kota Jakarta.

Strategi pembangunan nasional hanya menciptakan pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi yang tersentralisasi di Jakarta dan sekitarnya. Pertumbuhan usaha seperti pabrik dan perputaran uang hanya melimpah di Jakarta.

Sementara di daerah, sulit mencari lapangan kerja dan miskin pembangunan. Akibatnya, terjadi arus urbanisasi ke Jakarta dalam jumlah besar. Tatkala terjadi libur panjang saat Idul Fitri, mudik menjadi kegiatan yang luar biasa besar.

Inilah sesungguhnya wajah asli mudik yang kolosal tersebut. Ini adalah wajah kegagalan kita dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan, antara Jawa dan Luar Jawa dan antara desa dan kota. Mudik menyimpan wajah kegagalan kita dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang merata di seluruh Tanah Air sekaligus wujud kegagalan kita mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial.

Meskipun kegiatan mudik tidak mengenal strata dan status sosial, tetapi rakyat kecil tetap menjadi bagian yang terlunta-lunta dalam menikmati mudik Lebaran. Warga kelas menengah ke atas bisa menikmati mudik dengan lebih baik. Tapi rakyat kecil, tetap saja susah.

Kesiapan mudik

Bukan berita baru jika mudik selalu memakan banyak korban jiwa. Korban jiwa mudik Lebaran mengalami tren peningkatan. Pada 2007, korban tewas mencapai 798 jiwa, 2008 sebesar 633 jiwa, 2009 menjadi 728 jiwa, dan 2010 meningkat hingga 853 jiwa. Selanjutnya pada 2011 turun menjadi 779 jiwa dan pada 2012 naik mencapai 908 jiwa.

Selain korban jiwa, juga kehilangan harta benda serta korban kriminalitas dan ketidaknyamanan lain. Semua ini ditanggung pemudik dan tidak ada kompensasi dari pemerintah. Namun, melihat tren kenaikan permasalahan sosial saat

mudik, jelas menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah dalam mempersiapkan *grand strategy* memecahkan masalah mudik, belum memuaskan.

Jika pemerintah menahami besarnya arus urbanisasi di Jakarta, maka pemerintah seharusnya mempersiapkan infrastruktur dari dan ke Jakarta secara memadai. Anehnya, meski dari tahun ke tahun, kita sibuk menghadapi mudik sebagai sebuah ritual rutin, yang bagi sebagian orang bahkan disakralkan, namun langkah yang dilakukan pemerintah juga sekadar rutinitas tanpa ada peningkatan pelayanan yang memadai.

Melihat dampak kegiatan mudik yang demikian besar, terutama korban jiwa, pemerintah perlu melakukan langkah strategis yang mendidik rakyatnya. Apalagi kegiatan mudik juga sebuah 'pemborosan' karena banyak pengeluaran. Hasil kerja setahun, dua tahun, atau lebih, habis dipakai untuk sekali mudik.

Transportasi darat juga memakan banyak BBM bersubsidi dan puluhan ton polutan yang membahayakan kesehatan. Ribuan hektare tanah juga sering kali menjadi korban pemudik dan kerusakan infrastruktur juga meningkat.

Kegiatan semacam ini cenderung tidak produktif atau lebih banyak nilai hura-hura yang terbungkus nilai budaya dan religius. Bagaimana kita bisa memaknai dengan logika kita, di mana sebuah kegiatan silaturahmi yang dianjurkan dalam agama tetapi juga diikuti dengan risiko kehilangan nyawa?

Di sini jelas bahwa ritual mudik dekat dengan motif ekonomi yang banyak mengandung unsur-unsur konsumerisme, memanjakan pola hidup konsumtif, hedonis, dan bentuk kemewahan lainnya yang cenderung *demonstration effect*.

Budaya hemat dan kegiatan investasi atau tabungan tampaknya sudah harus dipikirkan sejak sekarang. Budaya investasi harus ditingkatkan mengurangi tekanan ekonomi yang berat mengharuskan dilakukannya investasi yang dananya berasal dari tabungan. Masyarakat harus bersikap hemat dan mampu menabung dan berinvestasi. ■

43

6 OPINI

Komunikasi Lebaran

■ DR LEILA MONA GANIEM
Pengamat Komunikasi

Lebaran sebentar lagi. Saat ini umumnya orang Indonesia berbondong-bondong mudik (pulang kampung), meski dalam kerapatan yang luar biasa. Pulang kampung bertemu sanak saudara bagai syarat lengkapnya hajatan besar ini. Agenda tahunan spiritual ini sangatlah disayangkan bila hanya memenuhi kebutuhan kebersamaan fisik.

Minimal ada dua manfaat komunikasi penting yang dapat dioptimalkan dengan datangnya Lebaran. Dua berkah itu adalah kesempatan bersilaturahmi dan kesempatan bermaaf-maafan. Bersilaturahmi mengeratkan kualitas hubungan dengan keluarga dan kerabat. Bermaaf-maafan ditujukan untuk memperbaiki permasalahan yang sangat mungkin ada dalam hubungan sebuah keluarga.

Silaturahmi berasal dari bahasa Arab. *Shilah* yang berarti menyambung, dan *rahim* bermakna rahim perempuan, yang diartikan dengan bebas sebagai 'persaudaraan'.

Hubungan persaudaraan terutama dalam keluarga seharusnya dilandasi oleh kasih sayang, perhatian, kepercayaan, memberi-menerima, kesediaan mengungkapkan unek-unek diri, serta dukungan emosional. Semua ini perlu upaya kesungguhan untuk menyuburkannya.

Pentingnya silaturahmi tertuang dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bersilaturahmi."

Melalui silaturahmi, kita mempererat tali kekeluargaan, meningkatkan kualitas hubungan, saling keterbukaan, berbagi peluang, dukungan, menyelesaikan masalah bahkan momen pembentukan nilai-nilai karakter.

Berbagai kesibukan yang penting dan mendesak dari keseharian kita membuat prioritas silaturahmi menjadi nomor sekian dalam agenda. Jarak geografis memperlebar jarak keakraban bahkan mengikis rasa kasih-sayang di antara keluarga.

Perbedaan status sosial ekonomi,

sudut pandang, aliran keyakinan, tak jarang menimbulkan prasangka. Akibatnya malas saling berkunjung, interaksi makin jarang, bahkan kadang lupa mengundang satu sama lain dalam momen keluarga. Kian lamanya perpisahan, membuahakan keasingan satu-sama lain.

Generasi di bawah kita, atau kehadiran pasangan, yang tak terikat dengan budaya keluarga, tak jarang membuat hati terluka karena perlakuan di luar norma yang biasanya disepakati. Luka hati kadang tak hanya menimbulkan kekerasan verbal, seperti celaan, kesombong, keamarahan, namun juga kekerasan fisik.

Kurangnya kesabaran diri kita karena kesalahan kecil yang diperbuat saudara, membuat kita lebih suka berkumpul dengan teman yang dirasa menyenangkan. Spirit senasib sepenanggungan dalam hubungan kekeluargaan kian luntur.

Untuk memulihkan rasa cinta dan hubungan kekeluargaan yang kokoh, butuh ruang dan waktu serta upaya kesungguhan. Saat lebaran inilah waktu yang tepat menyegarkannya kembali.

Selain mempererat tali silaturahmi, momen lebaran dapat kita manfaatkan dalam mencairkan hubungan yang terganggu, dengan cara saling bermaaf-maafan. Kata 'maaf' bila diucapkan dengan kesungguhan merupakan diksi yang bermakna sangat dalam.

Kata 'maaf' dapat mencairkan komunikasi yang beku, memperbaiki hubungan, menenangkan dan menyembuhkan luka hati. Permintaan maaf dapat mengubah kehidupan seseorang. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan empati bagi orang dirugikan.

Permintaan maaf dapat mencegah kesalahpahaman lebih lanjut. Ketika kita melakukannya dengan tulus, permohonan maaf ini meminimalisasi efek negatif dari luka yang telah ada, bahkan sangat bermanfaat untuk kesehatan mental dan fisik kedua belah pihak.

Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa menerima permintaan maaf dapat menurunkan tekanan darah yang semula naik dan menormalkan pernafasan. Se-

seorang yang telah dirugikan merasa emosinya sembuh ketika hal yang menjengkelkannya diakui oleh pelaku kesalahan.

Bahkan, dia tidak lagi memandang pelaku kesalahan sebagai ancaman pribadi atau terjebak di masa lalu yang merusak jiwa. Sayangnya, ada asumsi salah bahwa meminta maaf mempertontonkan kelemahan diri seseorang.

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Okimoto dari Universitas Queensland, disimpulkan bahwa orang yang merasa kekuasaannya lebih besar dari orang yang akan dimintai maaf cenderung malas meminta maaf. Orang menjaga *self esteem*-nya dengan enggan meminta maaf.

Riset lain menyebut, laki-laki lebih susah meminta maaf daripada perempuan. Jikapun, meminta maaf, ucapan maaf yang diucapkan tidak disampaikan dengan ketulusan.

Banyak pula yang memanfaatkan budaya orang Indonesia yang biasa menyatakan "mohon maaf lahir dan batin" sekadarnya. Kalimat yang tidak jauh beda bagai sapaan "apa kabar". Untuk kondisi kesalahan yang kronis, gaya menyampaikan maaf basa-basi itu tidak menyembuhkan.

Inti penyampaian maaf adalah kerendahan hati, pengakuan, pernyataan diri atas kekhilafan yang pernah kita lakukan. Penyampaian maaf mampu melepaskan ego yang membelenggu diri dan akhirnya mencairkan sekat-sekat hubungan yang tidak harmonis.

Untuk mengoptimalkan komunikasi di momen penuh barokah ini, sangatlah tepat bila kita menyadari bahwa kita-lah yang bertanggung jawab untuk menciptakan suasana dan hubungan yang berkualitas. Ada baiknya kita menghindari hal-hal yang merusak suasana kebersamaan.

Saatnya kita menyegarkan jiwa dengan persatuan yang kuat di antara keluarga dan kerabat dengan bersilaturahmi. Mengingat fitrah khilaf yang melekat pada manusia, karena itu, jangan malu meminta maaf dan jangan ragu memberi maaf. ■

Mesir-Turki dan Indonesia

■ DIDIN S DAMANHURI

Guru Besar Ekonomi Politik FEM IPB, Staf Ahli Lemhannas

Ada dua pendekatan analisis besar tentang kejahatan Mursi sebagai presiden Mesir oleh militer. Pertama, karena kelemahan pemerintahan Mursi, terutama menyangkut tak dilakukannya rekonsiliasi secara serius dengan pihak oposisi, termasuk koalisi dalam kabinetnya yang tidak memprioritaskan penanganan ekonomi pascarevolusi.

Kedua, karena problem geopolitik Timur Tengah yang mengganggu keseimbangan politik yang mengusik Amerika Serikat (AS). Bantuan militer AS mencapai 1,5 miliar dolar AS per tahun. Mereka menekan militer Mesir agar mendorong diam-diam kudeta tersebut.

Hal yang menarik, bersamaan dengan demo besar-besaran di Mesir yang pada gilirannya terjadi penggulingan pemerintahan Mursi, sementara demo besar-besaran di Turki terhadap pemerintahan Erdogan tak menciptakan destabilisasi yang berarti dan militer relatif tetap mendukung pemerintahan (tidak tergoda seperti menghadapi pemerintahan Erbakan sebelumnya).

Sementara, demo pun surut di mana menurut survei lembaga independen, pendemo hanya didukung 22 persen dan pemerintahan Erdogan didukung publik sekitar 53 persen. Berbagai analisis banyak disampaikan. Intinya lebih disebabkan pemerintahan Erdogan yang berinspirasi Islam tersebut tidak terlalu mengumbar penerapan syariah Islam yang menggantikan prinsip sekularisme.

Namun, lebih mengurangi sekularisme secara kultural, dengan misalnya menggalakkan kegiatan masjid-masjid, baik untuk peribadahan maupun sosial.

Hal yang lain, bekerja sama dengan tokoh pendidikan, Fethullah Gulen, membangun Lembaga Pendidikan Islam bermutu internasional di dalam maupun luar negeri, termasuk di Indonesia ratusan unit. Ini dimaksudkan untuk mencetak pemimpin masa depan, terutama untuk Turki serta membangun citra Turki secara internasional yang

bermasyarakat Islam.

Hal yang lebih spektakuler lagi adalah langkah pembangunan ekonomi. Diawali dengan keberhasilan sebagai Wali Kota Istanbul yang menggunakan APBD-nya secara *cost effectiveness* dengan menghilangkan praktik korupsi, seperti yang dijalankan pemerintahan daerah sebelumnya serta membangun prasarana kota sehingga tercipta Istanbul yang bersih, teratur, dan nyaman seperti standar kota-kota di Eropa.

Dia membangun transportasi publik yang kredibel, seperti busway, monorel, subway, transportasi sungai, laut, hingga pembangunan bandara yang rencananya terbesar di dunia. Bahkan, setelah menjadi perdana menteri dilanjutkan dengan pembangunan terowongan (tunnel) dan jembatan terpanjang yang menghubungkan Asia dan Eropa.

Pertaniannya sekarang nomor satu di Eropa dengan menyejahterakan petani dan memajukan pedesaan, antara lain, dengan akses pada modal, teknologi, pemasaran dalam dan luar negeri, konsolidasi lahan, serta jaminan sosial dan asuransi. Industri pertahanannya sekarang telah mampu mandiri dengan produksi atas paten sendiri berbagai jenis kapal dan helikopter.

Sementara, riset dan pembangunan yang menunjang industri serta pertanian ditingkatkan sangat pesat. Pendidikan pun gratis dari tingkat SD-S3 dengan mutu standar Eropa. Hasilnya, PDB per kapita yang 2004 masih sekitar 3.300 dolar AS menjadi sekitar 12.500 dolar AS pada 2012, naik empat kali lipat.

Dalam fora internasional pun, Erdogan memperlihatkan kepemimpinannya, terutama dalam misi perdamaian di Timur Tengah. Salah satu contoh, dia mengirim misi kapal perdamaian, Mavi Marmara, untuk membantu Palestina yang dibombardir Israel waktu itu sehingga jatuh korban. Erdogan menuntut Israel meminta maaf, sementara keanggotaannya dalam NATO tidak mengurangi sikap kritisnya terhadap AS dan Eropa.

Terakhir, dia mengkritik pengulingan Presiden Mursi dan dengan didukung oleh Prancis, Jerman, Belgia, Pakistan, Malaysia, Uni Afrika, Erdogan memelopori untuk mendesak agar militer Mesir membebaskan Mursi dari tahanan. Dia pun mengancam pembantaian terhadap para pendemo pendukung Mursi yang menginginkan agar Mursi dikembalikan sebagai presiden.

Dengan modal yang sukses besar dalam pembangunan ekonomi dan peran yang dimainkan dalam perdamaian di Timur tengah, Erdogan tengah merekonstruksi Turki pada masa depan. Turki juga pernah menguasai kawasan Eropa ketika masa Turki Usmani.

Erdogan yang memiliki pendidikan madrasah Islam hingga sekolah lanjutan serta sarjana di perguruan tinggi modern, dan pelajaran dari Erbakan, maka Erdogan membawakannya lebih moderat, tapi substansial. Yaitu, memakmurkan dan menegakkan keadilan, baik di internal negaranya maupun dalam fora internasional.

Dengan catatan tentang Mesir serta Turki tersebut, beruntung Indonesia memiliki Konstitusi UUD 45 dan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan, sedang dan akan menjadi platform bersama dalam mengatasi konflik seperti di Mesir. Juga bagaimana substansi konstitusi untuk diimplementasikan dalam rangka memakmurkan sebesar-besarnya ekonomi rakyat, memodernkan segala aspek kehidupan sehingga sejajar dengan negara maju, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan nasional maupun dalam fora internasional.

Dengan peristiwa Mesir tersebut dan kisah sukses Erdogan kita bisa belajar. Meski kita pun punya sejarah gemilang pada masa lalu serta peran para pemimpin nasional kita yang kredibel sejak kemerdekaan hingga sekarang, hendaknya cita-cita mereka semua itu mampu kita realisasikan dengan mewujudkan pesan kaonstitusi secara nyata dalam kehidupan. Semoga. ■

Puasa dan Umat Terbaik

■ PROF ROKHMİN DAHURI

Ketua Bidang Kelautan, Pertanian, dan Kehutanan Dewan Pakar ICMI

(Ikatan Cendekiawan Muda Indonesia) Pendidik
Pendidik

D i hari-hari terakhir Ramadhan 1434 H ini, sangat tepat bila umat Islam melakukan kontemplasi (muhasabah) tentang firman Allah yang artinya, "Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah..." (QS 3: 110). Penegasan Allah itu mengandung makna, bahwa umat Islam mestinya bukan hanya akan hidup bahagia di akhirat sebagai penghuni surga-Nya, tetapi juga baik (sukses dan bahagia) kehidupan dunianya (QS 2: 201).

Ironisnya, sejak tumbangannya khilafah Islam terakhir di Turki pada 1924 M, umat Islam di seluruh dunia pada umumnya menjadi terpuruk hampir di setiap bidang kehidupan. Dalam hal penguasaan dan inovasi iptek yang menjadi kunci kemajuan bangsa, tidak ada satu pun negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim yang termasuk dalam kelompok negara produsen teknologi (*technology innovator countries*).

Saat ini, kelompok negara kampiun iptek baru beranggotakan 20 negara termasuk AS, Kanada, Jepang, negara-negara Eropa Barat, Australia, dan Korea Selatan. Satu tingkat di bawah kelompok negara elite itu adalah *technology implementor countries*, yakni kumpulan negara yang mampu mengaplikasikan teknologi tinggi dan baru melakukan inovasi.

Sebagian besar negara yang selangkah lagi menjadi negara maju seperti Singapura, Malaysia, Cina, India, Iran, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Brasil, Cile, dan Afrika Selatan. Di bawahnya lagi adalah kelompok negara yang hanya mampu sedikit mengadopsi teknologi, tetapi belum sampai pada tahap implementasi secara luas (*technology adaptor countries*). Yang mencemaskan, Indonesia sekarang menduduki peringkat ke-60 dari 63 negara yang masuk dalam kelompok ini. Jika tidak segera berbenah, Indonesia bisa terjerembab ke kelompok terbawah (*technologically marginalized countries*) yang terdiri atas negara-negara terbela-kang di Asia, Afrika, dan Pasifik Selatan.

Di bidang ekonomi tak kalah memilukan, hingga saat ini belum ada satu pun negara Muslim yang masuk dalam

kelompok negara industri maju nan kaya, yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Kebanyakan negara Muslim masih menghadapi sejumlah masalah kehidupan yang elementer, seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, dan konflik sosial. Kekuatan hankam negara-negara Muslim jauh tertinggal dari negara-negara industri maju. Hampir semua jaringan media massa dan informasi dikuasai oleh kelompok negara industri maju.

Akar masalah umat

Banyak faktor yang menyebabkan umat Islam terpuruk. Tetapi, inti masalahnya adalah karena sejak akhir masa keemasannya (634-1753 M) umat Islam tidak lagi melaksanakan Islam secara kaffah (keseluruhan) dan *ittiba* (menurut cara Rasulullah SAW). Dengan perkataan lain, umat Islam meninggalkan agamanya. Padahal, menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua warisan, yakni Alquran dan hadis. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka ia tidak akan sesat selamanya."

Menurut para pendiri kapitalisme, seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John M Keynes, bahwa lima etos kerja utama yang membuat bangsa Barat (kapitalis) maju dan makmur adalah: (1) bekerja keras, (2) cinta ilmu, (3) gemar menabung, (4) disiplin, dan (5) taat hukum. Perkembangan Cina sejak membuka hubungan internasionalnya pada 1979 dari isolasi politik tirai bambu, dilandasi oleh nilai-nilai konfusianisme yang juga memiliki lima karakter itu plus hormat kepada senior, orang tua (Zhu Rongji, 2003).

Islam sejak 14 abad lalu telah mewajibkan atau setidaknya mensunahkan para pemeluknya untuk melaksanakan kelima etos kerja (akhlak) tersebut. Begitu banyak ayat Alquran dan hadis yang menguraikan tentang kelima etos kerja itu beserta fadhilahnya (manfaat) bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Sebut saja, surat perintah membaca (QS 96: 1). Islam juga sangat menganjurkan umat-Nya bekerja keras.

Semua ibadah dalam Islam tujuan utamanya adalah agar manusia taqwa kepada hukum Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia dan alam semes-

ta, maka hukum Allah pasti sesuai dengan fitrah manusia, adil, dan berlaku sepanjang masa tidak mengenal sekat geografi. Ibadah shaum Ramadhan diwajibkan kepada orang-orang beriman supaya kita taqwa kepada Allah. Demikian juga shalat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Bertebaran pula ayat yang mendorong supaya manusia tidak boros dan menghormati dan santun kepada orang tua, para senior kita dalam koridor kebenaran.

Ketika umat Islam melaksanakan ajaran-Nya secara kaffah dan *ittiba*, sejak Rasulullah SAW beserta kaum Muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah hingga sebelum masa pencerahan Eropa (Revolusi Industri 1753 M), selama sebelas abad itu umat Islam berjaya, maju, dan sejahtera menguasai lebih dua per tiga wilayah dunia. Interaksi ekonomi, sosial, politik, dan budaya berjalan atas dasar persaudaraan karena Allah.

Agama, keyakinan, jiwa, harta, dan hak-hak sipil warga non-Muslim dilindungi. Kehidupan sosial berjalan harmonis. Anak-anak yatim terpelihara, yang kaya membantu dan memberdayakan yang miskin, yang miskin tidak iri terhadap yang kaya dan bekerja sama dengan yang kaya dengan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Oleh sebab itu, di tengah kemunduran negara-negara kapitalis Barat, yang ditandai oleh penurunan daya saing serta krisis ekonomi Eropa dan AS berkepanjangan dan hingga kini belum diketahui kapan berakhirnya dan dengan semangat Ramadhan, semestinya umat Islam mulai sekarang semakin meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, termasuk melaksanakan Islam secara kaffah dan *ittiba*.

Sebab, Allah berjanji, "jikalau penduduk suatu negeri beriman dan taqwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan berkah (kemajuan dan kesejahteraan) yang datang dari langit dan bumi..." (QS 7: 96). Dan, bagi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, rizki yang datangnya tidak disangka-sangka, kecukupan hidup, kemudahan, mengampuni kesalahannya, dan melipatgandakan pahala (QS 65: 2-5); menjadikannya berkuasa di bumi (QS 24: 55); dan menasukkannya ke dalam surga-Nya di akhirat kelak (QS 64: 9). ■

46

Kesadaran Spiritual Mudik

■ ALI MASYKUR MUSA

Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

Tidak setiap momen kehidupan bisa dijelaskan secara rasional, salah satunya mudik. Buktinya, setiap menjelang Idul Fitri kita selalu disibukkan dengan momen tersebut. Istilah mudik menjadi populer setiap menjelang berakhirnya bulan Ramadhan.

Tradisi mudik menjadi penanda bahwa hubungan emosional masyarakat dengan tempat kelahiran sangatlah kuat. Mudik dilatarbelakangi oleh kecenderungan menengok ke belakang, memandang masa lampau, dan menegaskan kesejatian diri, "apa, siapa, dan dari mana ia berasal."

Tradisi mudik merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang tidak dijumpai di negara lain. Bahkan, inilah mobilisasi penduduk yang diperkirakan paling akbar di dunia.

Tahun 2013 ini, pemerintah memperkirakan ada 17.393.016 pemudik yang menggunakan angkutan umum menjelang dan setelah Lebaran. Bayangkan, jika dijumlahkan dengan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, mungkin bisa mencapai 20 juta orang atau lebih. Tradisi mudik memang sebuah fenomena menarik. Perjalanan itu mampu menembus batas-batas rasionalitas.

Mudik juga mengindikasikan adanya kesenjangan pembangunan ekonomi antara desa dan kota. Sebagian besar pemudik adalah masyarakat desa yang merantau ke kota. Penyebab dominan mereka merantau adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat masyarakat desa berbondong-bondong ke kota dalam rangka perbaikan ekonomi. Hal ini terjadi karena di desa tak tersedia lapangan kerja yang memadai, lahan-lahan pertanian dikuasai pemodal yang kebanyakan orang kota sehingga kehidupan ekonomi masyarakat desa semakin tersisih.

Dalam perspektif sosial ekonomi, fe-

nomena mudik mempunyai efek positif dan negatif. Efek positifnya adalah minimal ada aliran uang dari kota ke desa yang dibawa pemudik. Seiring dengan itu, perekonomian di desa yang selama ini relatif statis dibandingkan dengan di kota dengan adanya pemudik sedikit lebih dinamis.

Hasil riset sebuah lembaga zakat menunjukkan, potensi aliran ekonomi ke daerah selama mudik 2013 mencapai Rp 90,08 triliun. Dana tersebut berasal dari transportasi, wisata, dan keterampilan pemudik ke sanak keluarga. Bank Indonesia tak ketinggalan membuat perhitungan, perkiraannya jumlah uang yang beredar sampai H-3 Lebaran mencapai Rp 300 triliun.

Tak hanya itu, banyak pemudik di samping "bagi-bagi THR" juga membawa produk atau buah tangan untuk keluarganya di desa, seperti produk makanan dan minuman dari industri-industri kecil. Ini tentu saja mempunyai efek positif bagi kelangsungan hidup produsen atau industri-industri kecil. Perajin parcel dan industri fashion dengan segala pernak-perniknya serta penyedia jasa transportasi pun tak pernah sepi dari konsumen, terutama menjelang Lebaran. Dengan demikian, mudik Lebaran secara ekonomi mempunyai efek *multiplier* yang sangat besar.

Namun, di samping efek positif, mudik juga membawa efek negatif, yaitu efek demonstrasi bagi masyarakat desa. Ini merupakan akibat pemudik yang cenderung bergaya hidup mentereng dan berpenampilan modis ala kota.

Gaya seperti itu setidaknya menjadi magnet tersendiri bagi warga desa lainnya untuk turut serta merantau ke kawasan kota. Warga desa menganggap bahwa menaikkan taraf kesejahteraan ekonomi bisa dicapai dengan mudah bila bekerja di kota.

Yang lebih penting adalah tujuan-tujuan produktif dengan membantu pere-

konomian saudara-saudaranya di desa. Mereka yang kelebihan modal bisa berinvestasi usaha di desa, tentunya untuk memberdayakan sumber daya yang ada di desa. Dengan demikian, di satu sisi mereka mampu menghidupkan kembali ekonomi desanya dan meminimalisasi warga desa lainnya yang ingin merantau ke kota.

Lihatlah budaya Lebaran kita. Mari kita menelaah mobilisasi energi dan ekonomi Idul Fitri kita. Saksikanlah, kita menghiasi penemuan rohani dan jasmani. Tataplah jutaan orang mengalir, memenuhi kendaraan antarkota, berduyun-duyun mendatangi kembali sumber sejarahnya.

Menurut Emha Ainun Najib, orang mudik itu melaksanakan teologi *Ilahi haji'un*. Kembali ke Allah, melalui asal keluarga dan wasilah kesejarahan lainnya. Meresapi makna Idul Fitri kita akan belajar menyemai semangat spiritual-vertikal. Setelah menjalani pencucian melalui puasa sebulan penuh dan zakat, Tuhan Yang Mahabaik mengembalikan kita kembali pada fitrah sebagai hamba Tuhan.

Spiritual-vertikal manusia disempurnakan oleh kesalehan sosial-horizantal, silaturahmi dan berbagi adalah wujud konkretnya. Karena, dalam seluruh prosesi hidup manusia kaum beriman, hidup tidak lebih daripada ziarah menepi tangga menuju tingkat yang lebih tinggi-sempurna untuk memperoleh kesejatian diri hingga mendapatkan kesempurnaan bersama Sang Khalik.

Melalui mudik, sejarah yang usang hendak didaur ulang, disegarkan kembali dan dicerahkan guna memberi nafas baru bagi perjalanan kehidupan kita satu tahun ke depan. Mudik adalah sebuah kesadaran dan keridhaan, sejauh dan setinggi apa pun berjalan, kita pasti kembali kepada Allah 'Azza wa Jalla, Sang Pemilik Segala. ■

6 OPINI

Berubah pada Hari Fitri

■ KH SAID AQIL SIROJ
Ketua Umum PBNU

Sebulan sudah umat Islam menjalani puasa Ramadhan. Berbagai tantangan yang berkelelak-gelelak dalam diri, baik secara fisik maupun mental-spiritual, rasanya sudah terlewat. Apakah berjalan mulus, datar, atau beriak-riak memang bergantung pada individu masing-masing.

Kebergantungan ini bisa disebabkan oleh kondisi setiap individu. Mereka yang hidup makmur, secara fisik dalam berpuasa mungkin tidak terlalu memberatkan. Tetapi, bagi mereka yang didera oleh ekonomi sulit, bisa-bisa merasakan getir-getir hidup yang menekan. Beruntunglah, keberhasilan berpuasa dalam ajaran Islam tidak ditentukan oleh "modal luaran", melainkan "modal penghayatan" serta dampak positif-konstruktif lanjutan terhadap perilaku individu.

Pada Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini, rasanya bangsa kita masih dihadapkan berderet persoalan nasional, seperti politik, ekonomi, krisis pangan, krisis lingkungan, kriminalitas, dan keagamaan. Semua ini telah menyodorkan "fragmen kehidupan" yang mengirisakan. Seiring dengan itu, pungli, percaloan, korupsi, dan penyimpangan kekuasaan lainnya masih saja belum terbatat secara elok dan tuntas. Tragisnya, para pelakunya justru banyak yang dekat dengan "tampilan" keagamaan. Tak ayal, beban hidup rakyat terasa tak kunjung reda. Sulitnya mencari uang, seperti menjadi celotehan harian dari mereka yang berada pada posisi tidak atau kurang beruntung.

Kita pun dipertontonkan oleh budaya konsumerisme yang menjadi-jadi. Perilaku konsumtif mewarnai masyarakat yang hendak melaksanakan puasa Ramadhan hingga Idul Fitri.

Mobil-mobil bermerek rasanya tak pernah sepi dari pembeli. Rental mobil menjelang Lebaran sudah *fully booked*. Mal-mal senantiasa ramai berjubel oleh peminat yang hendak melampiaskan hasrat *shopping*-nya. Tayangan-tayangan televisi terus memompa hipnosis pemirsa dengan tawaran berbagai produknya.

Melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok tampak dihadapi masyarakat secara ambigu. Masyarakat berteriak-teriak atas kian tingginya biaya hidup. Sebaliknya, pola hidup sederhana tampak masih jauh panggang dari api. Nah, ibadah sekarang tampaknya tidak lagi dimaknai sebagai pengabdian kepada

Tuhan, tetapi menjadi ajang perputaran modal. Terjadilah "kapitalisasi agama" dan agama belum mampu bergerak pada penyadaran praksis-emansipatoris demi mengubah keadaan.

Melampaui ritual

Idul Fitri artinya "kembali lahir" dalam kesucian. Manusia diciptakan dalam kefitrian atau "tabula rasa". Dalam perjalanan hidupnya, manusia bertatap muka dan bergumul dengan berbagai warna-warni dunia. Ada kesedihan, tawa canda, kealpaan, kesungguhan, ketulusan, atau kemunafikan. Semuanya menjadi "teman hidup" bagi manusia. Dan semuanya itu, tak lepas dari cara manusia untuk menyikapi. Keberadaan manusia dengan segala sifat, karakter, dan ikhtiarnya menjadi "modal kapital" untuk menghadapi segala bentuk tantangan kehidupan.

Di sekitar kehidupan sehari-hari, kita menemui banyak ragam perilaku orang. Ada mereka yang berlagak angkuh, cuek terhadap lingkungan sosial atau juga ada yang santun, suka berderma, dan memiliki solidaritas yang tinggi.

Masjid atau mushala yang penuh dengan jamaah mungkin saja membuat rasa bangga bagi kita. Tetapi, kita sontak kaget saat mendengar atau melihat langsung adanya sandal atau barang-barang lainnya yang hilang di masjid. Atau juga, kita mungkin menatap seseorang yang tadinya tidak mau beribadah, tiba-tiba rajin shalat ke masjid.

Sebaliknya, kita jadi geram melihat orang yang tampak beragama, lalu menjadi pongah dan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Kita mungkin meringis melihat kesenjangan di sanasini. Ada mereka yang hidup mewah dengan penampilan klmis.

Terasa "bumi-langit" manakala kita menatap seseorang yang gembel, camping-camping, hidup bergelandangan di bawah jembatan dan jalanan. Atau juga, seseorang yang harus berbuat kriminal hanya karena sesupat nasi.

Inilah, kehidupan dunia yang penuh rona dan tak pernah henti dari berbagai gerak. Yang positif dan negatif, yang mahlakah maupun yang mafsadah bagaikan "saudara kembar" yang lahir dari rahim kehidupan.

Alquran sejak dini sudah mengingatkan, "Contoh-contoh dalam kehidupan ini diperuntukkan agar manusia mau bertafakkur". Ayat ini sungguh

memberikan wawasan, agar apa yang terjadi dalam hidup ini selayaknya disikapi dengan bijak, tidak ceroboh, serta penuh kasih sayang dan kedamaian.

Tetapi, kehidupan ini tidak lantas didekati secara pasif dan lembek. Alquran mengingatkan bahwa kehidupan ini harus dijalani secara aktif dan semua tindakan akan bergantung serta berpulang pada manusia sendiri. Alquran menjelaskan, "Manusia itu akan dinilai dari apa yang diusahakannya."

Di similah, Islam meletakkan fondasi bagi "manajemen hidup". Kenyataan dunia bisa menjadi "tipu daya" sekaligus "hikmah" bagi manusia. Manusia harus aktif baik untuk berikhtiar demi mencapai ketenteraman duniawi maupun untuk merenungi jalannya hidup agar tidak mudah tererosok dalam kealpaan.

Hidup ini sesungguhnya menjadi arena untuk "berjihad" dalam rangka pencapaian prestasi pribadi, kenyaamanan hidup, dan juga kebaikan umum. Kehidupan dunia bukan kenistaan, tetapi justru bisa menjadi kemuliaan.

Sabda Nabi, "Dunia adalah tempat untuk menanam bagi akhirat." Karena itulah, jihad yang sebenarnya adalah jihad untuk memperbaiki diri yang kemudian bisa menjalar secara sosial demi kebaikan sesama (*al-muta'adi afdhalu min al-qhashir*). Bukan jihad dalam artian pemboman bunuh diri (*intihar*) dengan berdalih menghancurkan kezaliman dan demi memburu pahala akhirat. Islam sangat menentang sikap ekstrem (*tatharruf*) dalam segala hal, apalagi yang kemudian berakibat merusak ketenteraman umum.

Di hari yang fitri ini, saatnya kita berubah secara "revolusioner" untuk mereformasi sikap dan perilaku kita. Puasa dan Idul Fitri hanyalah media untuk menjadi momentum bagi pelatihan diri (*riyadhah al-nafs*) dan penyucian hati (*tashfiyah al-qalb*).

Perintah agama hanya akan menjadi "pepesan kosong" jikalau tidak ada penghayatan serta perubahan nyata yang berarti bagi pelakunya. Ia sekadar rutinitas yang dijalani setiap tahun. Inilah otokritik yang harus terus-menerus perlu kita sadari, agar ritual agama mempunyai makna yang praksis-emansipatoris.

Dan Idul Fitri kali ini kiranya dapat semakin menggugah kesadaran bersama untuk bergiat secara nyata dengan turut melempangkan jalan bagi tercapainya kedamaian dan keadilan bangsa. ■

Idul Fitri dan Politik Humanis

■ IDING R HASAN

Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Jakarta dan Deputi Direktur The Political Literacy Institute

Bagi umat Islam, Idul Fitri merupakan momen yang paling penting setelah menjalani ritual puasa selama kurang lebih sebulan. Ia merepresentasikan sebuah kemenangan dan terutama kesucian diri lainnya fitrah manusia seperti tecermin dalam ungkapan *minal aidin wal-faizin*. Dengan Idul Fitri manusia seolah ditempa kembali menjadi orang yang benar-benar terbebas dari semua noda dan dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan.

Tak heran kalau umat Islam di seluruh dunia menyambut tibanya hari Idul Fitri tersebut dengan penuh sukacita. Berbagai hal mereka persiapkan untuk menyambutnya dari yang bersifat fisik-lahiriah sampai psikis-batiniah.

Meski kerap muncul perbedaan dalam menetapkan hari tersebut di kalangan umat Islam, seperti halnya juga dalam penentuan awal Ramadhan, tetapi tidak menghilangkan keagungan dan kesakralan momentum Idul Fitri.

Namun, sayangnya ada satu fenomena yang cukup ironis jika melihat praktik pemaknaan umat Islam di negeri terhadap Idul Fitri. Yakni, kecenderungan untuk menjadikan Idul Fitri sebagai puncak dari semua bentuk ritual selama Ramadhan. Idul Fitri seolah terminal akhir di mana perjalanan manusia.

Dengan kata lain, setelah sampai pada hari Idul Fitri, pola dan gaya hidup mereka cenderung kembali ke masa sebelum puasa. Seolah berbagai pelajaran dan hikmah selama Ramadhan tidak berbekas sama sekali di dalam kehidupan mereka. Ada mata rantai yang terputus (*missing link*) antara praktik kehidupan mereka selama bulan Ramadhan dengan bulan-bulan setelahnya.

Salah satu cara kasat mata terlihat bahwa pada Ramadhan umat Islam berlomba-

lomba untuk menampilkan diri mereka sepiantas mungkin dengan momentum puasa. Menjauhi tempat-tempat maksiat, kecenderungan untuk menutup aurat bagi sebagian perempuan, menjadi hal yang lazim di bulan tersebut. Tetapi, semua itu berhenti ketika Idul Fitri berlalu.

Padahal, seharusnya ada semacam kontinuitas yang mesti dilakukan umat Islam setelah mereka sampai pada hari Idul Fitri dan sesudahnya. Ia bukanlah puncak, atau terminal akhir dari sebuah perjalanan. Ia justru merupakan langkah awal, kawah candradimuka sebagai tempat penempatan umat Islam sehingga menjadi pribadi yang bersih dan suci.

Justru setelah menjadi pribadi-pribadi yang sucilah diharapkan mampu mempraktikkan semua pelajaran selama Ramadhan pada bulan-bulan berikutnya. Nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan kepedulian seyogianya menjadi denyut nadi kehidupan umat Islam di sepanjang waktu.

Politik humanis

Sebegitu agungnya makna Idul Fitri maka seharusnya bisa menyentuh semua aspek kehidupan manusia termasuk politik. Sudah selayaknya bagi para elite politik di republik ini untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum humanisasi politik. Meski kerap menampilkan berbagai hal yang buruk: intrik, kepalsuan, dan kecurangan, tetapi politik sebenarnya tidak harus tampil seperti itu.

Politik juga bisa tampil berwajah humanis, mengedepankan kepedulian dan kebersamaan sosial. Filsuf Plato sendiri menekankan politik pada aspek kebaikan bersama (*common goodness*). Dalam bahasa agama (Islam) sesuai dengan makna kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-ammah*). Dengan demikian, politik semestinya diorien-

tasikan untuk kebaikan bersama.

Karena itu, Idul Fitri sebagai akhir dari ritual puasa yang membawa nilai-nilai kebaikan bersama itu seyogianya menjadi momentum untuk menampilkan politik secara lebih humanis dan manusiawi. Kedisiplinan, kejujuran, dan kepedulian akan sesama yang terpancar dari ibadah puasa semestinya juga terejawantahkan dalam praktik-praktik politik di negeri ini.

Seperti yang dapat kita saksikan bersama, pada saat Ramadhan ada kecenderungan dari para politisi atau calon-calon politisi (baca: caleg) memanfaatkan momentum Ramadhan untuk memperlihatkan kepedulian mereka akan sesama. Sebagian ada yang menyelenggarakan mudik gratis, ada pula yang membangun posko-posko bantuan untuk membantu para pemudik.

Tentu saja semua itu merupakan perbuatan baik karena jelas-jelas menunjukkan kepedulian para politisi terhadap nasib sesama. Masalahnya adalah apakah mereka melakukan itu hanya sekadar meraih simpati publik sehingga bersifat temporer, atau hanya napas kehidupan politik sesaat untuk mengabdikan pada kepentingan bersama.

Jika pilihan kedua yang terjadi, tentu merupakan kabar baik bagi dunia politik di Indonesia. Bagaimanapun yang paling menentukan dalam politik adalah siapa yang menggunakannya (*man behind the gun*). Sedangkan politik itu sendiri hanyalah sebuah cara (*means*).

Maka, kalau yang melakukan praktik-praktik politik adalah pribadi-pribadi fitri yang telah lulus dari proses penggodokan puasa, jelas politik akan berwajah humanis. Inilah hal terpuji dari momentum Idul Fitri bagi kehidupan politik di republik ini. ■

CURRICULUM VITAE



PERSONAL DETAIL

Full Name : IRMA SURYANI
Nick Name : Yani (Ayani Wijaya)
Age : 22 tahun
Brith : Kulon Progo, 30 Juli 1991
Blood Type : O
Address : RT 22 / RW 06, Ngaseman, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo
Current Address : Jl. Kasatriyan No. 872, Perum AD Gedongkuning, Yogyakarta
Religion : Islam
Gender : Female
Mobile Phone : +6285 725 985 326
Email : ayani.wijaya@gmail.com

GENERAL CHARACTER

Familiar with a nick name Ayani Wijaya. A Javanese girl, Simple, humble, and always try to do better everythings. Was born and living in heterogen society, so can improve an asertive skill. Believe that procesess more important than the goal.

FORMAL EDUCATION

1. State Islamic Universityof Sunan Kalijaga Yogyakarta, Communication Science Department, seventh semester (2010 – 2014)
2. Pengasih State Senior High School (2009)

NON FORMAL EDUCATION

1. Indonesian Leadership Camp, Universitas Indonesia 2012

Be Held by University of Indonesia (UI), at November 9 – 12th 2012. I joined this program as vice of Generasi Baru Indonesia (Bank Indonesia Scholarship Receiver Community)

2. Latihan Kader 1 (LK I), HMI Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, November 2010.
3. Special Course KOHATI (LKK), HMI Cabang Yogyakarta, June 2011.
4. Pelatihan Dasar Kepemudaan (PDK), Balai Pemuda dan Olahraga DIY, in Youth Center, Mlati, Sleman, June 16-19th 2009.

ORGANIZATION EXPERIENCE

1. Secretary at Generasi Baru Indonesia (Gen-BI) UIN Sunan Kalijaga (2012 – now)
2. Internal Division, Puzzle PR Consultant, Communication Science, State Islamic University of Sunan Kalijaga, (Januari – Juni 2013)
3. Human Resources Development (HRD) Division, Public Relations Oriented (PRO) Communication Science, State Islamic University of Sunan Kalijaga, (2011-2012)
4. Pembinaan Anggota (Development of Member), Islamic Student Association (Himpunan Mahasiswa Islam or HMI) Komisariat of Social and Humaniora Faculty (2011-2012)
5. Dewan Kerja Cabang Pramuka Kulonprogo, Eksternal Division, year 2008 – 2010.
6. As the committee many of event, example :
 - a. Organizing Committee Interfaith Youth Pilgrimage (IYP) 2013, in Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Magelang November 10-20th, 2013.
 - b. Organizing Committee International Seminar “Religion and Television in Indonesia : Dakwahtainment and Its Discontent”, October 9th, 2013
 - c. Secretary Gendhis Event Organizer at “Padolanan Anak Jogja Istimewa”, Juli 01, 2013, Gembiraloka Zoo.

- d. Organizing Committee Cyber PR Expo “Explode Your Brand”, Kedai Nusantara, Juni 18th 2013

SOFT SKILL

1. Basic Computer Microsoft Office : Ms. Word, Ms. Power Point, Ms. Excel, Ms. Access (database).
2. Journalism Reportation (in Bahasa Indonesia)

RESULT

1. Mahasiswa Bicara
A collaboration book of Akademia Joglosemar. Issued on Februari 26th 2013 with Galuh Patria Publisher.
2. Dinamika PR dan Media Online
This is work result of TitikLima Team. Its consist of simple literature research with a theme “online media in supporting the public relations work”.

WORK EXPERIENCES

1. Volunteer at Indonesian Consorsium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta September – November 2013.
2. Secretary at Gendhis Event Organizer, State Islamic Univeristy of Sunan Kalijaga, Februari – July 2013.
3. Internal Division Puzzle PR Consultant, State Islamic Univeristy of Sunan Kalijaga, Januari – June 2013.
4. Reporter at Akademia Column, JogloSemar Daily Newspaper, Solo, year 2011 – 2012.
5. Part time in “My Comp” Computer Rental, Jalan Raya Janti Numb. 05 Yogyakarta, as a single employer on October 2009 – September 2010.

REWARD

1. Runner Up 3 from 20 participant , LKK (Latihan Khusus Kohati) Regional, Himpunan Mahasiswa Islam Yogyakarta, June 2011.
2. Certificate of Pelatihan Dasar Kepemudaan (PDK), Balai Pemuda dan Olahraga DIY, June 2009.
3. Certificate of Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, as an active participant Raimuna Nasional, Bumi Perkemahan Cibubur (Cibubur Camp Land) Jakarta, 2008.